

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan

Koperasi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Sipil
CIRCLE Indonesia
Cooperative for Civil Society Resources Development



Australian Government

LAPORAN AKHIR | DESEMBER 2015

TANTANGAN PENGHIDUPAN PEREMPUAN



**Tantangan Penghidupan dan
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan oleh
Mitra dan Sub-Mitra MAMPU**

Penelitian ini dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, meskipun demikian, analisis dan temuan yang dihasilkan oleh studi ini mewakili pandangan dari penulis dan tidak serta merta menggambarkan pendapat atau pandangan pihak Pemerintah kedua negara tersebut.

MAMPU

Setiabudi Atrium, 3rd Floor, Suite 306
Jl HR Rasuna Said, Kav 62, Jakarta
12950 INDONESIA
T: +62 21 521 0315
F: +62 21 521 0339
E: info@mampu.or.id
W: www.mampu.or.i

Tantangan Penghidupan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan oleh Mitra dan Sub-Mitra MAMPU

Henri Sitorus
Poppy Ismalina
Sabastian Saragih
Lilis Suryani

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini merupakan sebuah kajian tentang Pemberdayaan Ekonomi dan Sumber Penghidupan Mitra MAMPU - Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (*Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction*), suatu proyek yang telah berjalan sejak tahun 2012. Kajian ini menyelidiki tantangan-tantangan pada sumber penghidupan peserta perempuan dalam program MAMPU. Kajian ini juga memaparkan penjelasan tentang strategi-strategi organisasi mitra dalam pemberdayaan ekonomi. Kajian ini melibatkan kerja lapangan yang dilaksanakan dari bulan Agustus hingga Oktober di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Kami selaku pihak konsultan ingin berterima kasih kepada Tim Cowater/MAMPU atas kesempatan yang diberikan kepada Circle Indonesia dan para konsultan untuk memberikan sumbangsih dalam proyek strategis ini. Demikian pula, kepada semua organisasi mitra dan sub-mitra MAMPU yang telah memberikan bantuan berharga pada tahap kerja lapangan dan pengumpulan data. Kami juga sangat berterima kasih. Tanpa adanya fasilitasi yang begitu efektif dari rekan-rekan sekalian, kerja lapangan dan pengumpulan data yang dilakukan tidak akan berhasil sebaik ini. Selain itu, para konsultan juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta di berbagai provinsi yang telah membantu kami dengan begitu bersemangat dalam wawancara, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*- DKT) dan pemberian tanggapan atas kuesioner-kuesionernya.

Tim konsultan juga hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Lies Marcoes atas komentar-komentar beliau dalam rancangan laporan, yang telah kami tampung (sebanyak mungkin) dalam laporan ini. Kami juga ingin berterima kasih atas bantuan Dr. Gary Campbell yang telah memeriksa naskah awal daripada rancangan laporan ini. Kami menganggap tinjauan sumber penghidupan ini merupakan suatu proses pendidikan yang sangat penting dalam keterlibatan konsultan.

Oktober 2015

Tim Konsultan

ABSTRAK

MAMPU telah bekerja sama dengan sejumlah mitra yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia untuk upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dengan penekanan pada aspek-aspek kehidupan seperti pendapatan, modal sosial, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan struktur sosial, peningkatan pengetahuan, kepemimpinan, serta kondisi kesehatan. Penghidupan perempuan penerima manfaat MAMPU terhambat oleh kemiskinan. Sebagian besar sumber penghidupan perempuan penerima manfaat termarginalisasi ke dalam sektor informal akibat adanya hambatan sosial dan struktural. Studi ini dilakukan untuk memahami berbagai upaya pemberdayaan ekonomi dengan dimensi aset yang berbeda-beda yang saat ini dilakukan oleh mitra MAMPU. Desain penelitian campuran (*mix-method*) digunakan dalam studi ini dengan sejumlah metode pengumpulan data seperti penyebaran kuesioner, DKT, wawancara mendalam, dan peninjauan dokumen. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa sebagian besar (58,5%) dari pendapatan para penerima manfaat meningkat berkat diversifikasi sumber penghidupan dan mata pencaharian alternatif. Kebanyakan dari mereka (64%) merasakan adanya penguatan jaringan horizontal, dan (80,2%) telah melaporkan adanya peningkatan rasa percaya diri. Hal penting yang ditemukan dalam studi yaitu di mana terdapat 40% dari wanita melaporkan bahwa keterampilan kerja mereka telah meningkat, kemudian, hampir semua (78,7%) penerima percaya bahwa kedudukan mereka dalam hal pengambilan keputusan di dalam rumah tangga telah meningkat, dan mereka mengakui adanya perbaikan dalam pemenuhan hak perempuan (63,2%). Hasil studi ini menunjukkan bahwa penting bagi mitra dan sub-mitra untuk terus memperkuat akses perempuan terhadap layanan keuangan, peningkatan produksi dan kualitas produk, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan. Hal terpenting yang perlu digarisbawahi adalah untuk terus menanganai tindakan untuk kesetaraan gender untuk mencapai mata pencaharian yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi perempuan, sumber penghidupan, aset finansial, aset non-finansial

DAFTAR ISTILAH

ACILS	:	American Center for International Labour Solidarity (Pusat Solidaritas Buruh Internasional Amerika)
ADB	:	Asian Development Bank
Aisyiyah	:	Mitra Utama MAMPU
AOI	:	Aliansi Organic Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APINDO	:	Asosiasi Pengusaha Indonesia
APM	:	Aliansi Perempuan Merangin
Arisan	:	Rosca, rotating saving and credit association
AUD	:	Dolar Australia
BaKTI	:	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
Bandeng Presto	:	Ikan olahan
Bappenas	:	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BITRA Indonesia	:	Bina Keterampilan Indonesia, LSM di Sumatera Utara
BNPTI	:	Badan Nasional Perlindungan TKI
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BSA	:	Bina Sakinah Aisyiyah
BUEKA	:	Bina Usaha Ekonomi Keluarga Asyiyah
CSO	:	<i>Civil Society Organizations</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
CU	:	<i>Credit Union</i> (Serikat Kredit)
DAMAR	:	LSM di Bengkulu
DFAT	:	<i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> (Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan)
Dhuafa Mustadh'afin	:	Kaum miskin
FAO	:	<i>Food and Agriculture Organization</i> (Organisasi Pangan dan Pertanian)
FFS	:	<i>Field Farmers School</i> (Sekolah Lapangan Petani)
DKT	:	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terarah)
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAPSARI	:	Himpunan Serikat Perempuan Indonesia
Harta gono gini	:	Harta didapat setelah perkawinan
HIV/Aids	:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HKSR	:	Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
ICDHRE	:	<i>Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment</i> (Pusat Keislaman untuk Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia)
ICT	:	Information and Communication Technology (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
IDR	:	Rupiah Indonesia

IFAD	:	The International Fund for Agricultural Development (Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian)
ILC	:	The International Land Coalition (Koalisi Tanah Internasional)
ILO	:	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
ILOSTAT	:	Pusat data ILO
INDIPT	:	Institute for Social Strengthening Studies (Institut Kajian Pemberdayaan Sosial)
IPM	:	<i>Integrated Pest Management</i> (Pengendalian Hama Terpadu)
IPPF	:	<i>International Planned Parenthood Federation</i> (Federasi Keluarga Berencana Internasional)
IVA	:	Inspeksi Visual dengan Asam Asetat
KAPAL Perempuan	:	Lingkar Pendidikan Alternatif untuk Perempuan, Mitra MAMPU
KB	:	Keluarga Berencana
Kementerian PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KLIK	:	Klinik Nasehat Hukum
Komnas Perempuan	:	Komisi Nasional Perempuan
KOPWAN	:	Koperasi Wanita
KP2SK	:	LSM di Jawa Timur, Kelompok Perempuan dan Sumber - Sumber Kehidupan
KPI	:	Koalisi Perempuan Indonesia, mitra MAMPU
KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
Lintah Darat	:	Peminjam uang
LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
LP2EM	:	LSM di Sulawesi Selatan, Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
LP2M	:	LSM di Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat
LPSDM	:	Sub-mitra KAPAL Perempuan. LSM di Nusa Tenggara Barat, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Majelis Taklim	:	Sidang Pengajian
MAMPU	:	Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan
MAUPE	:	LSM di Maros, Sulawesi Selatan, Lembaga pemberdayaan perempuan
MDG	:	<i>Millennium Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Milenium)
Migrant Care	:	LSM bergerak di bidang pekerja migran
MIS	:	<i>Management Information System</i> (Sistem Informasi Manajemen)
MoU	:	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)

MWPRI	: Serikat pekerja rumah, Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia
NA	: <i>Not applicable</i> (tidak berlaku)
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
NGOs	: Non-Governmental Organizations (Organisasi Non Pemerintah)
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OECD-DAC	: The Organisation for Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi/ Komisi Bantuan Pembangunan)
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PEKKA	: Mitra MAMPU, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Pencari Kerang	: Pengumpul kerang
Permampu	: Konsorsium di Sumatera, Perempuan Sumatera Mampu
PESADA	: Perkumpulan Sada Ahmo
PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PMPK	: Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPK	: Program Pembangunan Kecamatan
PPK	: Sub-mitra Migrant Care, Perkumpulan Panca Karsa
PPSW	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Sumatera
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SARI	: <i>Social Analysis Research Institute</i> (Institut Penelitian Analisis Sosial)
Sembako	: Sembilan Bahan Pokok
SERBUMI	: Serikat Buruh Migran
SHG	: <i>Self Help Group</i> (Kelompok Swabantu)
SIDA	: <i>Swedish International Development Cooperation Agency</i> (Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia)
SofEI	: <i>Supporting Office for Eastern Indonesia</i> (Kantor Pembantu untuk Indonesia Timur)
SPEK HAM	: LSM di Solo. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
SRI	: <i>System Rice Intensification</i> (Sistem Intensifikasi Padi)
Tauke/Tengkulak/Punggawa	: Pembeli
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TUKKEPAR	: Tujuan-Kerajinan Menabung, Kemampuan Mengembalikan, Prestasi dan Partisipasi
UNCSW	: The United Nations Commission on the Status of Women
UNFPA	: <i>The United Nations Population Fund</i> (Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa)
USD	: Dolar Amerika
WALHI	: LSM lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Warung	: Rumah makan kecil

WCC	:	<i>Woman Crisis Center</i> (Pusat Krisis Perempuan)
YAO	:	Yayasan Alfa Omega
Yayasan Kombongan Situru	:	Sub-mitra BaKTI
YKP	:	Mitra MAMPU, Yayasan Kesehatan Perempuan
YKS	:	Yayasan Kesehatan untuk Semua
YPKM	:	Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat
YSA	:	Yayasan Sada Ahmo

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	IV
DAFTAR ISTILAH	V
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
ABSTRAK	XI
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
TEMUAN KUNCI PADA SUMBER PENGHIDUPAN PENERIMA MANFAAT REKOMENDASI	XV
	XVIII
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 SUMBER PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN	2
1.3 KERANGKA IDENTIFIKASI DAMPAK	9
METODE DAN ANALISIS	11
2.1 PERTANYAAN PENELITIAN	11
2.2 METODOLOGI PENGUMPULAN DATA	11
2.2.1 STRATEGI PENELITIAN KUALITATIF	11
2.2.2 SURVEI	13
2.3 KARAKTERISTIK RESPONDEN	14
KARAKTERISTIK SUMBER PENGHIDUPAN PEREMPUAN	16
3.1 PENDAHULUAN	16
3.4 PEKERJAAN DAN KETERGANTUNGAN PEREMPUAN PADA SUMBER PENGHIDUPAN SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA: ANALISIS MAKRO	17
3.3 ASET MANUSIA	18
3.4 KARAKTERISTIK MODAL KEUANGAN DAN EKONOMI SUBSISTEN	20
3.5 DISKRIMINASI GENDER DAN TANTANGAN DALAM KENDALI ATAS SUMBER DAYA	22
3.5.1 KURANGNYA AKSES DAN KENDALI ATAS SUMBER DAYA PRODUKTIF	22
3.5.2 KESENJANGAN AKSES TERHADAP LAYANAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN	24
3.5.3 KEMISKINAN WAKTU DAN BEBAN KERJA YANG TIDAK SETARA	24
3.5.4 TANTANGAN INSTITUSIONAL ATAS KEIKUTSERTAAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN	30
3.5.5 DISKRIMINASI GAJI	30
3.5.7 PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	31
3.6 MATA PENCAHARIAN MENDASAR, TEKNOLOGI SEDERHANA, TANTANGAN PEMASARAN DAN RISIKO LAINNYA	32
3.6.1 SUMBER PENGHIDUPAN PESISIR	32
3.6.2 PERTANIAN DI PEDESAAN	34
3.6.3 CIRI-CIRI SUMBER PENGHIDUPAN USAHA MIKRO DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	35
3.6.4 PEKERJA RUMAHAN	37

3.6.5 KERENTANAN TERHADAP SYOK, KRISIS DAN STRATEGI BERTAHAN	40
--	----

KEGIATAN MITRA MAMPU DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

PEREMPUAN	44
4.1. PENDAHULUAN	44
4.2. PEKKA (PEREMPUAN KEPALA KELUARGA)	49
4.3. AISIYAH	53
4.4. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA	56
4.5. KAPAL PEREMPUAN	59
4.5.1 YPKM (YAYASAN PENGAJIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN)	60
4.5.2 KPS2K	61
4.6. ILO MAMPU (BITRA DAN MWPRI)	63
4.6.1 BITRA INDONESIA	64
4.6.2 MWPRI	67
4.7. MIGRANT CARE	69
4.7.1 INDIPT (<i>INSTITUTE FOR SOCIAL STRENGTHENING STUDIES</i> – INSTITUT KAJIAN PENGUATAN SOSIAL)	70
4.7.2 SARI (<i>SOCIAL ANALYST AND RESEARCH INSTITUTE</i> – INSTITUT PENELITIAN DAN ANALISIS SOSIAL)	72
4.8. PERMAMPU	74
4.8.1 PESADA	76
4.9. BAKTI (BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA)	78
4.9.1 LP2EM PAREPARE	80
4.9.2 YAYASAN KOMBONGAN SITURU	81
4.9.3 MAUPE, MAROS	82
4.10. KOMNAS PEREMPUAN (KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN)	83
4.10.1 HAPSARI	83
4.10.2 SPEKHAM SOLO	84

HASIL DAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI/SUMBER

PENGHIDUPAN	87
5.1. PENDAHULUAN	87
5.2. ASET KEUANGAN DAN SUMBERDAYA LAINNYA	88
5.3. DAMPAK PADA MODAL SOSIAL	90
5.4. DAMPAK TERHADAP ASET MANUSIA (KEKUATAN DIDALAM)	92
5.5. DAMPAK TERHADAP ASET KELEMBAGAAN (KEKUATAN UNTUK)	94
5.6. LINGKUNGAN PENDUKUNG DAN PERBAIKAN KERANCKA HUKUM	97

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KARAKTERISTIK SUMBER PENGHIDUPAN PEREMPUAN PENERIMA MANFAAT MITRA/SUB-MITRA MAMPU	99
6.2. KETERLIBATAN MITRA/SUB-MITRA MAMPU	101
6.3. DAMPAK PROGRAM	103
6.4. SARAN	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: RINCIAN PERTANYAAN PENELITIAN	109
---	-----

LAMPIRAN 2: DAFTAR INFORMAN	112
LAMPIRAN 3: GRAFIK PENDUKUNG	117
LAMPIRAN 4: PROYEK DAN BIDANG TEMATIK MITRA	122
LAMPIRAN 5: KUESIONER	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	6
Tabel 2. Jenis Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	8
Tabel 3. Kerangka Indikator Aset Potensial Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	9
Tabel 4. Daftar Mitra yang Diwawancarai	12
Tabel 5. Responden Menurut Organisasi Mitra	14
Tabel 6. Perempuan sangat terlibat dalam budidaya kopi	26
Tabel 7. Profil Kegiatan Sehari-hari Perempuan di Toraja	27
Tabel 8. Keterlibatan Perempuan dalam Pembuatan Gerabah	28
Tabel 9. Ciri-Ciri Sumber Penghidupan di Wilayah Pesisir	32
Tabel 10. Ciri-Ciri Sumber Penghidupan Pertanian	34
Tabel 11. Ciri-Ciri Usaha mikro dan Sumber Penghidupan Perempuan	36
Tabel 12. Ciri-Ciri Pekerja Rumahan	38
Tabel 13. Jenis Intervensi Pemberdayaan Ekonomi	44
Tabel 14. Rangkuman Strategi Pemberdayaan Ekonomi oleh Mitra/Sub-Mitra	46
Tabel 15. Strategi Pemberdayaan PEKKA	49
Tabel 16. Pendekatan Aisyiyah	53
Tabel 17. Strategi Program KPI	56
Tabel 18. Strategi Pemberdayaan KAPAL Perempuan	60
Tabel 19. Strategi Pemberdayaan BITRA	66
Tabel 20. Strategi Pemberdayaan MWPRI	68
Tabel 21. Strategi Migrant Care	69
Tabel 22. Strategi Pemberdayaan PERMAMPU dan PESADA	75
Tabel 23. Pendekatan Pemberdayaan BaKTI	79
Tabel 24. Pandangan Responden tentang Perubahan pada Modal Keuangan	89
Tabel 25. Sumber Pinjaman/Bantuan Keuangan	90
Tabel 26. Pandangan Responden tentang Aset Manusia	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dinamika Konteks dan Aset Sumber Penghidupan	4
Gambar 2. Status Perkawinan Responden	14
Gambar 3. Pekerjaan Utama Responden (Persentase)	18
Gambar 4. Tingkat Pendidikan Responden	19
Gambar 5. Akses terhadap Layanan Kesehatan	20
Gambar 6. Sumber penghidupan Perempuan di Wilayah Pesisir	33
Gambar 7. Ibu Muli, Pemecah batu di Parepare	40
Gambar 8. Syok akibat kenaikan harga makanan dan kekurangan pangan	41
Gambar 9. Peristiwa Syok dan Bencana	42
Gambar 10. Risiko yang Dihadapi Sumber Penghidupan di Pedesaan	42
Gambar 11. Strategi Bertahan dalam Peristiwa atau Keadaan Sulit	43
Gambar 12. Kerajinan Batik di Kendal	58
Gambar 13. Mantan Buruh Migran dan Industri Rumah Tangga Keripik di Kebumen	71
Gambar 14. Pengemasan Tiwul di Wonosobo	73
Gambar 15. Panen Padi SRI di Dairi	78
Gambar 16. Frekuensi Responden Mengikuti Program Sumber Penghidupan Mitra	88
Gambar 17. Perubahan Modal Sosial para Penerima Manfaat Perempuan	91
Gambar 18. Dampak keterlibatan KPI dalam Kerajinan Batik di Cepering, Kendal, Jawa Tengah	94
Gambar 19. Pembuatan Keputusan dalam Rumah Tangga	95
Gambar 20. Indikator Dampak Lembaga	96
Gambar 21. Dampak Aset Pendukung	97

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan sebuah analisis tentang kondisi penghidupan (*livelihood*) para penerima manfaat program dan strategi-strategi pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh para Mitra kerja sama MAMPU. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengidentifikasi macam-macam pendekatan yang dilakukan oleh Mitra dan Sub-Mitra MAMPU di antara berbagai strategi pemberdayaan ekonomi yang ada. Melalui laporan ini, dipaparkan juga tantangan dan pengalaman terkait sumber penghidupan para perempuan penerima manfaat dan berbagai kegiatan di antara mitra yang mencakup berbagai macam aset dan dimensi pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kajian ini juga menganalisis celah yang terdapat pada kapasitas para mitra untuk memajukan pemberdayaan ekonomi.

Kajian ini menggunakan metode kuantitatif campuran yang melibatkan wawancara dengan informan kunci (Mitra dan Sub-Mitra MAMPU), DKT dengan para perempuan penerima manfaat, dan survei kuesioner terhadap sejumlah responden terpilih (yang merupakan penerima manfaat program).

TEMUAN KUNCI PADA SUMBER PENGHIDUPAN PENERIMA MANFAAT

PENGHIDUPAN PEREMPUAN DAN SEKTOR INFORMAL

Penghidupan para perempuan penerima manfaat MAMPU terhambat oleh kemiskinan, selain itu, mereka memiliki sumber penghidupan yang kurang pasti karena adanya hambatan struktural dan sosial. Sebagian besar sumber penghidupan para penerima manfaat termarginalisasi ke dalam sektor informal. Penerima manfaat cenderung memiliki pekerjaan yang bersifat fleksibel, seperti wirausaha, sebagai contoh dengan menjadi pedagang kecil atau petani, dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan industri rumah tangga. Sifat pekerjaan di sektor formal yang cenderung kurang fleksibel mengakibatkan sangat rendahnya akses perempuan terhadap sektor tersebut.

HAMBATAN PADA KESETARAAN AKSES DAN KENDALI ATAS SUMBER DAYA

Marginalisasi pekerjaan sebagai sumber penghidupan berkaitan erat dengan hambatan dalam kemampuan mengakses sumber daya, termasuk 'kemiskinan waktu' (*time poverty*) akibat ketidaksetaraan pembagian beban kerja dalam rumah tangga. Dominasi pengaruh nilai budaya terlihat dalam pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki, peran wanita berhubungan dengan pekerjaan mengasuh anak dan mengelola rumah tangga, sedangkan laki-laki mendominasi interaksi pasar dan produksi. Hal tersebut mengakibatkan perempuan memiliki beban dan pekerjaan berlipat ganda tanpa adanya pengakuan atas sumbangan kerja mereka, misalnya seperti dalam bidang

pertanian. Pada tingkat rumah tangga, perempuan memiliki posisi tawar lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam hal membuat keputusan politik dan ekonomi. Perempuan masih memerlukan izin dari suaminya untuk pergi ke luar rumah, tanda tangan serta harus memenuhi berbagai syarat jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Diskriminasi gender juga terwujud dalam hal pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Pada tingkat masyarakat, terjadi ketidaksetaraan akses dan kendali terhadap sumber daya produktif oleh perempuan akibat nilai budaya/tradisi. Akses perempuan terhadap jasa pelatihan dan penyuluhan juga lebih rendah. Penyuluhan (*extension service*) masih didominasi laki-laki yang kemudian berdampak pada kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan sumber kehidupan mereka di bidang pertanian. Akses terhadap dana pinjaman juga masih rendah, khususnya pada sistem perbankan formal. Para penerima manfaat melaporkan bahwa mereka sering kekurangan layanan jasa keuangan yang dapat mendukung sumber kehidupan mereka. Perempuan menghadapi hambatan besar, termasuk dalam mengakses dana pinjaman karena tidak adanya jaminan. Hal ini membuat para perempuan mengusahakan sumber daya mereka sendiri melalui asosiasi simpan pinjam, dan fasilitas kredit-mikro yang disediakan oleh organisasi mitra.

KETERLIBATAN MITRA DAN SUB-MITRA MAMPU DALAM PEMBERDAYAAN SUMBER PENGHIDUPAN

MAMPU bermitra dengan organisasi perempuan Indonesia, LSM dan organisasi perempuan berbasis keagamaan. Berbagai strategi keterlibatan para mitra dipaparkan pada poin berikut:

PENINGKATAN KESADARAN GENDER DAN PENDIDIKAN KESADARAN KRITIS

Semua mitra turut terlibat dalam peningkatan kesadaran kritis yang diikuti dengan pendidikan 'Sadar Gender' (*gender awareness*). Mitra dan Sub-Mitra turut serta dalam peningkatan kesadaran untuk mendidik penerima manfaat tentang ketidakadilan ekonomi dan sosial serta cara-cara untuk mewujudkan potensi mereka. Hal-hal tersebut merupakan syarat awal dalam perubahan hubungan gender, yang memperkuat kemampuan perempuan untuk mempertanyakan penggunaan kekuasaan, membuat mereka lebih tegas dalam menyuarakan tuntutan atas hak-hak mereka dan juga mendorong dilakukannya pembuatan keputusan secara inklusif di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN ORGANISASI DAN MODAL SOSIAL PEREMPUAN PENERIMA MANFAAT

Strategi penting kedua adalah mengorganisir perempuan mulai dari tingkat akar rumput (*grassroots level*) melalui kelompok swabantu (*self-help group* - SHG), koperasi, *credit union* (CU) dan kelompok perempuan. Strategi ini memfasilitasi proses pembelajaran melalui pertemuan kelompok rutin, kegiatan simpan pinjam, diskusi tentang kegiatan produktif dan isu-isu sosio-ekonomi lainnya. Forum-forum tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran kritis di antara anggota perempuan dalam kelompok. Para mitra juga terlibat meningkatkan jaringan kelompok, termasuk

memperkuat keikutsertaan dalam pembuatan keputusan. SHG dan organisasi akar rumput perempuan juga menyatukan suara perempuan dalam pembuatan keputusan masyarakat atau desa, meskipun dalam banyak kasus, hal ini tidak diakomodasi secara sistematis.

KEANEKARAGAMAN SUMBER PENGHIDUPAN

Para Mitra telah lama aktif dalam diversifikasi sumber penghidupan, seperti mensosialisasikan kegiatan industri rumah tangga atau usaha mikro, termasuk pengadaan alat dan perlengkapan untuk proses produksi. Namun tidak semua organisasi memberikan bantuan sumber penghidupan seperti alat, perlengkapan, benih dan bantuan lain. Inisiatif MAMPU tidak menyisihkan anggaran khusus untuk bantuan seperti benih, ternak, atau perlengkapan serta alat produksi.

MENINGKATKAN AKSES TERHADAP SUMBER KEUANGAN

Organisasi Mitra telah mempromosikan akses terhadap berbagai layanan jasa keuangan dari kredit-mikro sampai mobilisasi simpanan dan pengembangan lembaga keuangan mikro. Akan tetapi, kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman atau kredit yang dilakukan berskala kecil, oleh karena itu hanya mampu mendukung usaha mikro. Selain itu, tidak semua pemberian pinjaman dan kredit disertai dengan layanan pengembangan usaha, sehingga mayoritas produksinya berskala kecil dengan daya saing pasar yang rendah.

PERLINDUNGAN SOSIAL

Para Mitra menganjurkan para penerima manfaat untuk memanfaatkan jaminan perlindungan sosial seperti BPJS dan raskin¹. Meski demikian, tidak ada mitra yang terlibat dalam advokasi untuk mengembangkan perlindungan sosial yang bertujuan melindungi kaum miskin-produktif dan meningkatkan kemampuan mereka untuk terlibat dalam sumber penghidupan yang menghasilkan keuntungan. Selain itu, tidak ada pula mitra yang terlibat dalam advokasi kebijakan perlindungan sosial yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan sumber penghidupan, gagal panen atau kerusakan tanaman dan aset produksi lain akibat bencana.

¹Beras untuk Rumah Tangga Miskin—merupakan program subsidi nasional di Indonesia (Bulog, 2010; ILO, 2012)

DAMPAK PROGRAM

Kajian ini mengidentifikasi adanya indikasi yang kuat akan dampak yang menyeluruh baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan. Para Mitra berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kondisi kesehatan perempuan yang membantu mengembangkan aset manusia (*power within*) sebagai suatu aspek inti daripada perubahan. Kapasitas perempuan berhasil ditingkatkan dengan adanya lebih banyak kendali atas aspek-aspek penting dalam sumber penghidupan mereka, melalui sumber-sumber keuangan dan produktif lainnya (*power to*). Kapasitas perempuan dikuatkan secara kolektif (modal sosial) melalui kelompok perempuan, serikat dagang dan jaringan yang lebih kuat (*power with*). Hal ini diikuti dengan meningkatkan kapasitas lembaga. Mitra/Sub-Mitra juga telah berusaha meningkatkan kemampuan para perempuan penerima manfaat untuk mengadakan perubahan sosial, termasuk turut serta dalam pembuatan keputusan termasuk dalam musrenbangdes, peraturan daerah, dan negosiasi dalam rumah tangga (negosiasi dengan suami). Peningkatan kapasitas lembaga memberikan kontribusi positif pada kemampuan penerima manfaat untuk menggunakan posisi tawar mereka dalam melakukan menyeimbangan hubungan (dimensi kekuasaan) dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat dan pengambilan keputusan.

REKOMENDASI

Saran dari kajian ini adalah sebagai berikut:

MELANJUTKAN TINDAKAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN GENDER STRATEGIS

Terlihat adanya keberhasilan dalam hal kesetaraan gender dan perbaikan peluang dalam sumber penghidupan, seperti adanya akses dan kendali atas sumber daya produktif. Namun, tindakan-tindakan strategis masih perlu terus dilakukan dalam menangani struktur-struktur ekonomi, politik, dan sosial yang belum setara. Tindakan strategis yang berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi isu sosial yang lebih luas, memengaruhi para pembuat kebijakan dan entitas bisnis, guna mengedepankan kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber penghidupan.

MENINGKATKAN PRODUKSI DAN MEMPERBAIKI KUALITAS

Sebagian besar kegiatan sumber penghidupan yang teramati dalam kajian ini berskala kecil dan bersifat tradisional. Oleh karena itu, kami menyarankan pentingnya upaya-upaya yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta memperkuat kapasitas kewirausahaan perempuan. Demi mencapai hal ini, integrasi rancangan usaha strategis antar kelompok masyarakat sangatlah penting dalam hal mengidentifikasi komoditas yang berpotensi, menganalisis pasar dan memperbaiki kualitas produksi.

MENGEMBANGKAN KAPASITAS ORGANISASIONAL MITRA/SUB-MITRA

Organisasi didukung oleh staf yang berkemampuan baik dalam menangani isu gender, akan tetapi, staf tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan sesuai mengenai penghidupan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, kami menyarankan agar organisasi mitra mempekerjakan staf dengan pengetahuan teknis yang sesuai. Dengan demikian, organisasi mitra akan lebih mampu memenuhi kebutuhan sumber penghidupan, juga didukung oleh pengetahuan teknis yang luas dalam bekerja sama secara strategis dengan organisasi lain.

MELANJUTKAN PENINGKATAN AKSES TERHADAP LAYANAN JASA KEUANGAN

Secara strategis, memenuhi kebutuhan finansial perempuan sangatlah penting. Selain itu mendukung masyarakat dengan pelatihan pasca-pinjaman juga perlu dilakukan, khususnya bagi organisasi mitra yang hanya memusatkan perhatian pada koperasi/kegiatan simpan pinjam. Kami juga menyarankan agar kapasitas pengelolaan usaha ditingkatkan, termasuk dukungan non-finansial seperti memberikan nasihat dalam hal pemasaran, komoditas, kualitas produksi dan peningkatan laba agribisnis.

MENINGKATKAN ANALISIS GENDER DAN RANTAI NILAI (VALUE CHAIN)

Para Mitra disarankan agar mengerahkan upaya untuk meningkatkan kapasitas analisis gender dan rantai nilai guna mencapai kesetaraan gender dan persaingan. Memahami produk atau komoditas yang dapat dikelola oleh perempuan yang juga memiliki potensi pasar yang bagus, harus dinilai sebelum pihak Mitra/Sub-Mitra melibatkan diri dalam program usaha dengan para perempuan penerima manfaat yang mereka dampingi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan Mitra dan Sub-Mitra dalam analisis rantai nilai dan pemasaran, MAMPU sebaiknya mempertimbangkan untuk melibatkan sektor bisnis guna mengembangkan keahlian, sekaligus mencari kemungkinan adanya inovasi dalam rantai nilai dan intervensi dalam meningkatkan peran sekaligus memberi manfaat bagi perempuan.

PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK RISIKO/KEHILANGAN SUMBER PENGHIDUPAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PRODUKTIF

Indonesia rentan terhadap bencana alam yang mengancam sumber penghidupan para penerima manfaat dari program ini. Oleh karena itu, kami menyarankan agar melakukan advokasi untuk adanya perlindungan sosial yang melindungi penerima manfaat dari kerugian yang terkait dengan sumber penghidupan, seperti gagal panen, hilangnya ternak serta kerusakan tanaman akibat bencana.

Terdapat poin strategis dibalik advokasi penyediaan perlindungan sosial serta peningkatan dukungan ekonomi bagi masyarakat miskin melalui pengembangan sumber penghidupan dan usaha. Meningkatkan bantuan sosial dapat menjadi suatu

cara efektif untuk mewujudkan pertumbuhan secara menyeluruh. Meningkatkan bantuan sosial juga akan mendukung keberlanjutan sumber penghidupan dan produktivitas usaha kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasi ulang program bantuan agar tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan dan perlindungan namun lebih kepada program-program yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas, yang akan memfasilitasi masyarakat miskin meraih sumber penghidupan yang berkelanjutan.

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia, ketidaksetaraan gender terwujud dalam berbagai macam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe dan beban kerja tak berimbang (Fakih, 1997). Perempuan di Indonesia seringkali terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik (Supeni and Sari, 2011). Sebagaimana halnya pada banyak negara Asia lain, ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih terjadi dalam hal akses dan kendali atas sumber daya, ketidaksetaraan atas kekuasaan dan keikutsertaan dalam pembuatan keputusan rumah tangga dan masyarakat, serta pola risiko berbasis gender (Nazneen, 2008). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014), kualitas hidup perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya Indeks Ketidaksetaraan Gender (*Gender Inequality Index - GII*)².

Pada tahun 2012, Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) dimulai sebagai tanggapan atas seruan untuk memberdayakan perempuan miskin. Dengan disponsori oleh Pemerintah Australia (melalui DFAT), program ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap layanan dan sumber penghidupan dengan memperkuat organisasi-organisasi perempuan, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang gender, serta para anggota parlemen perempuan dalam lima bidang tematik (AusAID, 2012):

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah;
2. Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja;
3. Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri;
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi;
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

² Pada tahun 2013, GII Indonesia adalah 0,500, peringkat ke-103 dari 139 negara. GII mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga aspek penting pengembangan manusia—kesehatan reproduksi, yang diukur dengan angka kematian ibu dan angka kelahiran pada remaja; pemberdayaan, yang diukur dengan proporsi kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan serta proporsi perempuan dan laki-laki dewasa umur 25 tahun ke atas dengan setidaknya pendidikan menengah; dan status ekonomi yang diungkapkan sebagai keikutsertaan dalam pasar kerja yang diukur dengan angka keikutsertaan tenaga kerja perempuan dan laki-laki umur 15 tahun ke atas (UNDP, 2014).

MAMPU memiliki sembilan mitra, yaitu organisasi-organisasi perempuan dan organisasi-organisasi yang berkomitmen menghadapi isu gender dalam masyarakat, dan bergerak di 26 provinsi di Indonesia. Sebagai timbal baliknya, para mitra menerapkan program-program MAMPU melalui koneksi akar rumput atau LSM yang memiliki visi serupa. Hasil jangka pendek MAMPU adalah: (i) kapasitas dan kesiapan para mitra untuk aksi bersama, dan (ii) dukungan para anggota parlemen yang merupakan aktor perubahan. Hasil jangka menengahnya (dalam 3-5 tahun) adalah: (i) menguatnya suara dan meningkatnya pengaruh para Mitra dan jejaringnya, serta para anggota parlemen; dan, (ii) meningkatnya keterlibatan dan partisipasi bersama, termasuk dengan para pemangku kepentingan, dalam menghasilkan perubahan bagi Mitra, jejaringnya dan anggota parlemen. Hasil jangka panjangnya adalah: meningkatnya akses perempuan miskin terhadap layanan dan sumber penghidupan yang lebih baik. Meskipun komponen sumber penghidupan secara khusus direncanakan berlaku efektif dalam kurun lima tahun, para mitra juga telah terlibat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan termasuk melalui berbagai proyek di luar dukungan MAMPU.

Kajian ini berfokus pada identifikasi upaya-upaya dalam pemberdayaan ekonomi yang saat ini sedang diterapkan oleh Mitra MAMPU, dan melibatkan mitra dalam pembahasan tentang bagaimana mereka memandang keberhasilan strategi pendekatan yang mereka lakukan. Laporan ini juga bertujuan untuk menyajikan gambaran awal mengenai bagaimana pengalaman perempuan miskin dengan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi tersebut. Melalui kajian ini, akan dianalisis pula bagaimana upaya-upaya tersebut memengaruhi permasalahan gender yang ada di lingkup masyarakat. Secara khusus, laporan ini akan menyediakan informasi tentang perkembangan strategi MAMPU dalam memperbaiki pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode campuran (*mix method* - sebagaimana diuraikan dalam Bab 2). Bab 3 pada laporan ini menyajikan tantangan-tantangan sumber penghidupan yang dihadapi oleh perempuan penerima manfaat, sedangkan Bab 4 membahas strategi para mitra dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, dan diikuti dengan pembahasan tentang dampak-dampaknya (Bab 5). Serangkaian saran disajikan dalam Bab 6 (Kesimpulan). Bagian berikutnya akan secara singkat menyoroti istilah dan pengertian yang digunakan dalam laporan ini.

1.2 SUMBER PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Perempuan di Indonesia telah memberikan sumbangsih yang penting, melalui berbagai cara, dalam strategi penghidupan demi menafkahi rumah tangga. Akan tetapi, perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi dan sumber penghidupan di Indonesia. Kesetaraan ekonomi mengacu pada standar hidup dan penyebaran kesempatan serta hasil dalam ekonomi formal dan informal antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga menuntut akses setara terhadap sumber daya dan keterlibatan setara dalam semua aspek kegiatan ekonomi (Masika & Joekees, 1996). Berlanjutnya diskriminasi serta ketidaksetaraan terhadap perempuan menciptakan tekanan pada perempuan dalam mempertahankan sumber penghidupan mereka. Kabeer dan Natalis (2013) menggarisbawahi bahwa ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan infisiensi yang akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Jurang pemisah di antara gender masih menjadi isu di Indonesia dalam berbagai lingkup sosial, kesehatan, ekonomi, dan politik. Marginalisasi pekerjaan perempuan masih biasa terjadi, dan rumah tangga yang paling rentan dikepalai oleh perempuan. Perempuan juga acap kali dipandang sebagai bawahan, dan umumnya melakukan pekerjaan berbayar rendah, termasuk dalam sektor informal (UNFPA, 2014). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Indonesia, perempuan cenderung melakukan pekerjaan di sektor informal, sehingga 70% pekerja sektor informal adalah perempuan (Kementerian PPPA, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi kesulitan atau hambatan dalam mengakses pekerjaan formal, dan perempuan cenderung memasuki sektor informal karena kelonggaran kondisi kerjanya. Fenomena banyaknya keterlibatan perempuan dalam ekonomi informal adalah mengindikasikan adanya subordinasi perempuan di ranah ekonomi, sosial dan politik (Muttaqin, 2014).

Sebuah studi oleh Noerdin dkk (2006) mengemukakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pasar kerja formal disebabkan oleh berbagai faktor. Hal tersebut termasuk: (1) serangkaian beban yang timbul bila perempuan bekerja di luar rumah dan secara bersamaan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga; (2) saat bekerja di luar rumah, perempuan memerlukan izin dari orang tua atau suami (jika sudah menikah); (3) Pembagian kerja yang cenderung menitikberatkan peran kerja perempuan dalam lingkup rumah tangga sedangkan kerja laki-laki dalam lingkup publik.

Ketimpangan beban kerja antara ranah rumah tangga dengan ranah publik menyebabkan kemiskinan waktu, yaitu kurangnya akses dan kendali atas waktu oleh perempuan. Kemiskinan waktu terjadi karena adanya kerja produktif-tidak-dibayar yang dilakukan oleh perempuan ditambah lagi dengan proses reproduksi mulai dari kehamilan hingga mengasuh anak. Kemiskinan perempuan juga disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif serta pengucilan dari proses pembuatan keputusan, sementara keduanya berperan sangat penting dalam mempertahankan sumber penghidupan perempuan. Kedudukan perempuan yang tidak menguntungkan di bidang pertanian dapat terlihat dalam ketimpangan gender dan ketidaksetaraan kekuasaan serta akses terhadap: kendali atas tanah; teknologi; penyuluhan dan layanan keuangan; pasar dan rantai nilai. Begitu pula terdapat ketimpangan gender dalam hak, pemberdayaan, dan suara politik (Bank Dunia, FAO & IFAD (2009), Marcoes et al. (2015) dan Gurung et al. (2011), sebagai contoh, mencatat bahwa lebih rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya alam diperparah dengan dibatasinya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan yang menentukan akses mereka terhadap tanah dan sumber daya hutan yang menjadi gantungan sumber penghidupan mereka.

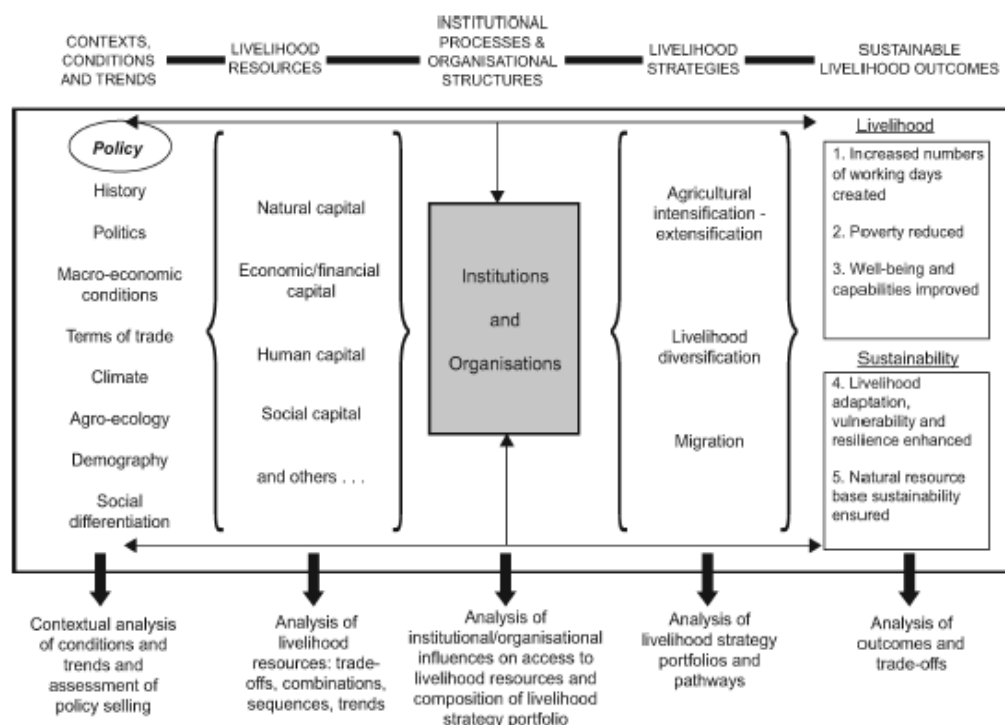
Peningkatan sumber penghidupan perempuan merupakan aspek kunci pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Sumber penghidupan dapat dipahami sebagai interaksi antara kemampuan, aset dan kegiatan, risiko dan kerentanan, dan kebijakan serta institusi yang akan memengaruhi akses perempuan terhadap sumber daya. Chambers dan Conway (1992:6) mengartikan sumber penghidupan terdiri dari

"kemampuan, aset (termasuk sumber daya materiil maupun sosial) dan kegiatan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Suatu sumber penghidupan dapat dikatakan berkelanjutan apabila seseorang dapat mengatasi dan memulihkan keadaannya dari syok serta tekanan dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan serta aset-asetnya saat ini maupun di masa yang akan datang)."

Karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi, pengentasannya perlu mencakup aset-aset yang berbeda. Oleh karena itu, suatu pendekatan sumber penghidupan berkelanjutan menerima strategi-strategi pemberdayaan dalam ranah modal/aset yang berbeda-beda. Menurut Scoones (2009) aset sumber penghidupan umumnya merupakan fungsi yang saling memengaruhi antar beragam jenis modal: modal sosial (contoh: jaringan masyarakat), modal alam (contoh: laut, tanah), modal keuangan (akses terhadap kredit), modal fisik (contoh: infrastruktur) dan modal manusia (contoh: pendidikan, kesehatan); dan dijumpai oleh lembaga, hubungan sosial dan perantara (Ellis, 2000).

Oleh karena itu, indikator kesejahteraan sumber penghidupan perempuan tidak terbatas pada modal keuangan atau pendapatan, namun juga akan tercermin dalam aset manusia, modal sosial, serta kemampuan untuk menegosiasikan kepentingan perempuan dalam proses kebijakan. Penghidupan yang berkelanjutan memerlukan kemampuan untuk menggabungkan aset-aset tersebut dalam suatu strategi, dan hal ini dipengaruhi oleh struktur dan pranata yang berlaku beserta konteks kerentanannya. Struktur dan proses ini melibatkan institusi, organisasi, kebijakan dan legislasi, yang kemudian menentukan akses terhadap lima jenis modal yang berbeda. Hubungan dinamis antara perekonomian dan jenis modal yang berbeda-beda merupakan hal yang sangat penting bagi strategi sumber penghidupan. Terdapat tiga konteks kerentanan utama: trend, syok dan musiman (*seasonality*), yang memengaruhi aset dan strategi sumber penghidupan. Gambar di bawah merangkum ikatan pengaruh antar komponen-komponen keberkelanjutan sumber penghidupan (Scoones, 2009; Ellis, 2000).

Gambar 1. Dinamika Konteks dan Aset Sumber Penghidupan



Sumber: Scoones (2009:7).

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber penghidupan perempuan merupakan hasil dari interaksi dinamika antara sistem sosial, politik, dan ekonomi, termasuk strategi penggunaan sumber daya yang juga dipengaruhi oleh institusi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi juga mencakup peningkatan kemampuan perempuan demi memengaruhi institusi yang lebih luas.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Golla et al. (2011) mencatat bahwa seorang perempuan diberdayakan secara ekonomi ketika ia memiliki kemampuan untuk menyokong dan memajukan kegiatannya, serta mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi dan membuat keputusan ekonomi. Menurut Taylor dan Perezniето (2014) pemberdayaan adalah 'suatu proses multidimensi-sosial yang membantu orang meraih kendali atas hidup mereka sendiri'. Mayoux (2008) mencatat bahwa pemberdayaan akan menghasilkan persamaan hak bagi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan, termasuk terhadap sumber daya dan kekuasaan.

Penting untuk dicatat bahwa konsep pemberdayaan ekonomi perempuan itu rumit, dengan mempertimbangkan pula kenyataan bahwa keadaannya akan berbeda-beda dalam konteks dan kelompok yang beragam. *The International Centre for Research on Women* menyatakan:

*"Seorang perempuan berdaya secara ekonomi ketika ia mempunyai (dua hal yaitu) kemampuan untuk menyokong dan memajukan perekonomiannya dan memiliki kekuatan untuk memutuskan dan menjalankan keputusan ekonomi."*³

Agar "mampu menyokong serta maju secara ekonomi", perempuan memerlukan keterampilan dan sumber daya untuk bersaing di pasar, dan juga akses yang adil dan setara terhadap lembaga perekonomian. Guna mengembangkan kekuatan dan lembaga, perempuan perlu memiliki kemampuan untuk membuat dan melakukan keputusan serta mempunyai kendali atas sumber daya.

Kajian ini memakai konsep pemberdayaan ekonomi yang digunakan oleh VeneKlasen dan Miller (2002), Kabeer (2012) dan Perezniето. Taylor (2014) dan Golla et al. (2011), yang mengidentifikasi empat bidang pemberdayaan ekonomi perempuan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

³ Dikutip oleh Golla, A.M. Malhotra, A. Nanda, P. dan Mehra, R. (2011) *"Understanding and Measuring Women's Economic Empowerment; Definition, Framework and Indicators"* (Memahami dan Mengukur Pemberdayaan Ekonomi Perempuan; Definisi, Kerangka dan Indikator) *International Center for Research on Women* (ICRW).

Tabel 1. Komponen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

<p>Kekuatan di dalam (Aset Manusia)</p>	<p>Kekuatan berasal dari kemampuan manusia seperti pengetahuan, kemampuan individu (contoh: keterampilan usaha atau pemahaman keuangan), rasa berhak (pemahaman dan pengakuan akan subordinasi diri sendiri serta rasa berhak dalam diri sendiri), harga diri, dan kepercayaan diri untuk membuat perubahan dalam hidup, termasuk keterampilan belajar agar mendapat pekerjaan atau agar terlibat dalam usaha bisnis.</p>
<p>Kekuatan untuk (Lembaga)</p>	<p>Kapasitas perempuan untuk berkuasa atas aspek-aspek strategis dalam hidupnya dan untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan pada lingkup yang lebih luas. Hal-hal ini termasuk kekuatan pembuatan keputusan ekonomi dalam rumah tangga, masyarakat, dan ekonomi setempat (pasar) termasuk posisi tawar di bidang yang sebelumnya merupakan ranah eksklusif laki-laki.</p>
<p>Kekuatan atas (Sumber daya)</p>	<p>Kekuatan mencakup akses pada dan kuasa atas aset berbasis pengetahuan, keuangan dan fisik, termasuk juga akses terhadap pekerjaan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.</p>
<p>Kekuatan dengan (Modal Sosial capital)</p>	<p>Pemberdayaan yang didapat melalui kebersamaan. Modal sosial adalah aset strategis yang diperoleh perempuan karena keikutsertaan mereka dalam kelompok dan aksi bersama. Kemampuan untuk mengelola hasil dalam kegiatan ekonomi dan perbaikan realisasi hak – termasuk dalam koperasi, serikat, jasa keuangan berbasis kelompok, pemasaran dan kesempatan belajar</p>

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, masing-masing bidang dapat berinteraksi dan saling memengaruhi. Lingkungan lembaga dan norma merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi persepsi gender dan mempunyai dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Norma yang dimaksud termasuk stereotipe, ekspektasi dan hal-hal tabu yang dapat secara kaku mendefinisikan peran gender dalam ketenagakerjaan, menentukan pihak yang mengelola pendapatan di dalam keluarga, bagaimana perempuan sebaiknya berlaku di ruang publik dan seterusnya. Lembaga terdiri dari struktur kebijakan dan hukum, sistem ekonomi, struktur pasar, warisan, pendidikan, dan seterusnya. Oleh karena hal-hal tersebut, Diana Wu (2013) menekankan bahwa untuk memahami apa arti pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, berbagai aspek kehidupan perempuan dan aneka hubungan yang mereka alami perlu dipertimbangkan, termasuk di ranah pribadi dan publik. Ruang pribadi berkaitan dengan rasa harga diri, hubungan rumah tangga serta ekspektasi gender yang ada. Jaringan kerabat dan rumah tangga juga merupakan bagian dari ruang pribadi yang

mencakup pembagian kerja menurut gender, norma warisan, distribusi beban kerja dan daya tawar atas proses pembuatan keputusan dalam rumah tangga. Ruang publik berkaitan dengan konteks yang lebih luas, mencakup jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi kehidupan perempuan. Secara khusus, Wu (2013) menggarisbawahi dua masalah penting yaitu kekerasan dan rasa takut akan kekerasan sebagai faktor kritis yang memperlemah daya perempuan.

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi tidak hanya melibatkan sumber daya keuangan, namun juga bentuk kekuatan dan aset lain yang sangat penting bagi lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung terjadinya pengentasan kemiskinan perempuan mencakup pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara yang memenuhi hak-hak perempuan, penggalakan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi yang menyediakan kesempatan yang sama pada akses pelatihan, persamaan akses dan kekuasaan atas sumber daya, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin (UNCSW, 2004). Suatu lingkungan yang kondusif mendukung keterkaitan antara keempat aset tersebut guna mencapai hasil terbaik terhadap sumber penghidupan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi merupakan suatu proses yang mengarah pada hasil sumber penghidupan yang lebih baik.

Lembaga-lembaga pembangunan di Indonesia, seperti LSM dan organisasi lain dalam masyarakat telah menjalankan pemberdayaan yang dimulai dari penyadaran (*conscientization*). Suatu langkah dasar dalam pemberdayaan adalah meningkatkan kesadaran kritis, membuat perempuan lebih peka terhadap struktur dan konteks sosial, ekonomi dan politik yang seringkali mendiskriminasikan perempuan. Penyadaran juga merupakan suatu proses menggugah perempuan dari kesadaran palsu⁴.

Pemberdayaan masyarakat juga tercapai dengan membangun kemandirian yang mendorong masyarakat untuk mengerahkan inisiatif lokal, keterampilan yang dimiliki serta aset-aset lainnya guna pembangunan lebih lanjut (Nikkah & Redzuan, 2010). Selain itu, kredit-mikro juga telah diintegrasikan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap berbagai layanan jasa keuangan. Dalam hal ini, penyediaan aset, termasuk pelatihan, pemberian peralatan yang sangat penting untuk keberlangsungan sumber penghidupan, serta pemasaran juga telah digunakan.

Taylor dan Perezniето (2014) telah mengidentifikasi beberapa intervensi berikut yang dapat menyokong pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh banyak institusi dan berkaitan dengan kajian ini.

⁴ (khususnya dalam teori Marxis) merupakan sebuah cara berpikir yang mencegah seseorang menyadari situasi sejati sosial atau ekonominya

Tabel 2. Jenis Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Keterlibatan	Catatan
Layanan Jasa Keuangan	Menyediakan akses keuangan bagi perempuan untuk sumber penghidupan, termasuk bisnis keuangan (kredit, ekuitas, dan jaminan), <i>microfinance</i> , asuransi mikro, dan simpanan – termasuk intervensi menggunakan teknologi baru seperti telepon genggam.
Layanan Jasa pengembangan usaha	Meningkatkan keterampilan usaha perempuan termasuk dalam hal pengelolaan bisnis seperti pembukuan, sumber daya manusia dan pemasaran
Pelatihan keterampilan	Mengembangkan keterampilan sumber penghidupan perempuan, termasuk pemahaman keuangan, pekerjaan dan pengembangan keterampilan terkait industri
Pemberian aset	Menyediakan <i>aset keuangan</i> : termasuk tapi tidak terbatas pada hibah, jaminan keuangan, pengiriman valas (<i>remittance</i>) Menyediakan <i>aset non-keuangan</i> : termasuk tapi tidak terbatas pada pendapatan dari kerja, barang, tanah dan properti, aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan (termasuk ternak, teknologi, dan teknologi informasi dan komunikasi, barang konsumsi tahan lama, peralatan IT, alat penghemat-tenaga, dll.
Perlindungan Sosial	Program-program yang melindungi perempuan agar tidak terjerumus dalam kemiskinan seperti pemberian uang tunai, pekerjaan umum, jasa perawatan anak.
Peningkatan kapasitas jaringan dan organisasi perempuan	Memperkuat organisasi perempuan, seperti kelompok, asosiasi dan kelompok untuk aksi bersama

Keterlibatan	Catatan
Perdagangan dan akses terhadap pasar	Pendampingan untuk perdagangan dan akses pasar. termasuk perdagangan adil, perdagangan etis, dukungan perdagangan lintas-batas, peraturan dan persetujuan dagang
Kerangka peraturan dan hukum	Upaya advokasi atas lingkungan yang mendukung termasuk untuk kepemilikan dan kuasa bisnis dan aset, begitu pula kerangka peraturan persamaan gender guna menyokong lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi perempuan.

1.3 KERANGKA IDENTIFIKASI DAMPAK

Berdasarkan sub-tema sumber penghidupan dan pemberdayaan ekonomi di atas, kajian ini menggunakan kerangka berikut sebagai himpunan untuk mengidentifikasi strategi serta perubahan/dampak yang berpotensi. Kerangka ini disarankan oleh MAMPU.

Tabel 3. Kerangka Indikator Aset Potensial Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

A. Aset manusia (Kekuatan di dalam) seperti:	
Kesehatan (akses terhadap perawatan kesehatan dan informasi)	Pengetahuan hak-hak manusia dan hukum
Pendidikan	Keterampilan yang berguna untuk mencari kerja
Melek huruf dan angka	Rasa harga diri dan rasa percaya diri
Pemahaman keuangan	
B. Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan atas), seperti:	
Uang tunai/pendapatan	Peralatan
Simpanan	Masukan (benih, pupuk, bahan mentah)
Akses terhadap pinjaman	Ternak
Kupon	Stok (persediaan)
	Informasi bisnis dan pasar
C. Aset lembaga (Kekuatan untuk) seperti:	

<p>Turut serta dalam keputusan ekonomi rumah tangga Terlibat dalam pembuatan keputusan masyarakat Akses terhadap layanan dan perlindungan sosial</p>	<p>Akses terhadap pekerjaan dan/atau menciptakan kesempatan penghasilan Terlibat dengan pasar termasuk agen penempatan pekerja migran dan majikan</p>
D. Aset sosial (Kekuatan dengan), seperti:	
<p>Teman Jaringan sosial Penasehat Keanggotaan kelompok</p>	<p>Tautan dengan pemerintahan desa Tautan dengan pemerintah daerah dan penyedia jasa Tautan dengan masyarakat madani dan kelompok lain</p>
E. Aset Pendukung, seperti:	
<p>Kartu identitas Kerangka hukum, kebijakan, dan hak Transportasi</p>	<p>Infrastruktur penghemat waktu dll. Perawatan anak</p>

Berpijak pada kerangka di atas, untuk mengukur pemberdayaan ekonomi perempuan perlu mempertimbangkan indikator kemajuan ekonomi perempuan (perubahan pendapatan, produktivitas, tabungan) dan juga lembaga serta kekuatan perempuan (kesadaran akan hak, perbaikan mobilitas perempuan, kuasa atas investasi rumah tangga, dll.). Penting pula mempertimbangkan, pada tingkat rumah tangga, bagaimana hubungan mendalam dapat membentuk pemberdayaan, namun juga, pelemahan daya. Mayoux dan Mackie (2008) mencatat bahwa hubungan rumah tangga dan norma lembaga yang memengaruhi rumah tangga akan menyebabkan penolakan hak perempuan atas kepemilikan, mobilitas dan kesempatan belajar. Di samping itu, nilai tradisi juga berpengaruh terhadap kemiskinan perempuan karena menentukan alokasi waktu atas beban kerja domestik dan produktif.

2 METODE DAN ANALISIS

2.1 PERTANYAAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik akan upaya-upaya dalam berbagai dimensi aset pemberdayaan ekonomi yang saat ini diterapkan oleh mitra MAMPU, dan melibatkan para mitra dalam pembahasan tentang bagaimana mereka memandang keberhasilan pendekatan-pendekatan mereka. Tujuan kajian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di bawah ini:

1. Apa saja ragam pendekatan Mitra MAMPU yang terlibat dalam berbagai dimensi pemberdayaan ekonomi?
2. Apa saja tantangan dan pengalaman yang dialami oleh para penerima manfaat dari upaya-upaya pemberdayaan ekonomi/sumber penghidupan Mitra MAMPU?
3. Apa saja jenis kegiatan mitra untuk dimensi aset pemberdayaan ekonomi yang berbeda-beda, dan apakah terdapat hambatan dalam kapasitas mitra menggalakkan pemberdayaan ekonomi?

Rincian dari sub-pertanyaan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian di atas, kajian ini menerapkan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Desain metodologi penelitian campuran merupakan desain yang sesuai untuk proyek ini karena pendekatan ini dapat menyediakan pemahaman yang menyeluruh akan kenyataan sosial yang ada (Morse, 2003) jika dibandingkan dengan teknik kualitatif atau kuantitatif saja (Creswell & Clark, 2007).

Oleh karena itu, strategi penelitian yang diterapkan akan mencakup penyebaran kuesioner, DKT, wawancara dan peninjauan dokumen, sebagaimana dijabarkan dalam bagian berikut.

2.2.1 STRATEGI PENELITIAN KUALITATIF

Strategi penelitian kualitatif akan melibatkan wawancara mendalam serta diskusi kelompok terarah, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

WAWANCARA MENDALAM

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data primer. Selain itu, tinjauan atas berbagai dokumen akan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang program atau intervensi yang dilakukan oleh Mitra/Sub-Mitra berkaitan dengan masalah sumber penghidupan. Berdasarkan tinjauan dokumen serta konsultasi dengan staf MAMPU, kami meminta petunjuk kepada seluruh organisasi mitra MAMPU agar melakukan seleksi penerima manfaat dan sub-mitra. Rincian daftar Sub-Mitra terpilih akan dijabarkan di Tabel 4.

DISKUSI KELOMPOK TERARAH (DKT) & TINJAUAN DOKUMEN

Diskusi kelompok terarah dilakukan pada penerima manfaat dan sejumlah mitra. Penerima manfaat dalam DKT tersebut termasuk para penerima manfaat MAMPU dan non-MAMPU. Para peneliti berkonsultasi dengan mitra/sub-mitra tentang seleksi dan pendaftaran penerima manfaat sebagai peserta DKT. Daftar DKT yang dijalankan saat kerja lapangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tinjauan dokumen merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan membaca kembali dokumen yang ada. Dalam kajian ini, dokumen yang dibaca kembali termasuk berbagai macam dokumen yang disediakan oleh MAMPU, dokumen mitra dan dokumen penerima manfaat.

Tabel 4. Daftar Mitra yang Diwawancarai

No.	Mitra Utama MAMPU	Lokasi, Provinsi	Sub-Mitra/ Catatan	Daerah
1.	Aisyiyah	Yogyakarta	Aisyiyah Sidoarjo	Sidoarjo
2.	Bakti	Makassar Sulawesi Selatan	Aisyiyah Ngawi	Ngawi
			MAUPE, Maros	Maros
			LP2EM Pare-Pare	Pare-Pare
3.	ILO Mampu	Jakarta	Yayasan Kombongan Situru	Toraja
			BITRA Indonesia	Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai
4.	KAPAL Perempuan	Jakarta	MWPRI	Malang
			YPKM	Pangkep
5.	Komnas Perempuan	Jakarta	KP2SK	Sidoarjo
			HAPSARI	Deli Serdang
			SPEKHAM Solo	Solo

No.	Mitra Utama MAMPU	Lokasi, Provinsi	Sub-Mitra/ Catatan	Daerah
6.	Koalisi Perempuan Indonesia	Jakarta	KPI Kendal, Jawa Tengah	Kendal
			KPI Lombok Barat, NTB	Lombok Barat
7.	Migrant Care	Jakarta	SARI	Solo
			INDIPT	Kebumen
8.	PEKKA	Jakarta	PEKKA Sumatera Utara, Tanjung Balai	Tanjung Balai
			PEKKA NTB	West Lombok
9.	Permampu	Medan	PESADA	Medan, Langkat, Dairi, Pak Pak Barat
10.	Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)	Jakarta	Tidak ada studi lapangan ⁵	

2.2.2 SURVEI

Pengumpulan data primer dilaksanakan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif responden sasaran tentang kondisi sumber penghidupan mereka dan perubahan yang dialami setelah turut serta dalam kegiatan-kegiatan Mitra MAMPU. Responden sasaran terutama adalah penerima manfaat perempuan dari Mitra dan Sub-Mitra MAMPU. Kuesionernya (Lembar Tambahan 5) di uji-awal dahulu oleh pihak Konsultan dan kemudian oleh pihak pencacah saat praktik uji coba dan dibuat perbaikannya. Survei tersebut melibatkan pencacah yang diajukan

⁵ YKP tidak secara langsung terlibat dalam pemberdayaan ekonomi, karena itu pihak konsultan hanya mewawancarai pihak manajemen YKP.

oleh organisasi mitra, yang telah dilatih sebelum pengumpulan data kuesioner sebenarnya.

2.3 KARAKTERISTIK RESPONDEN

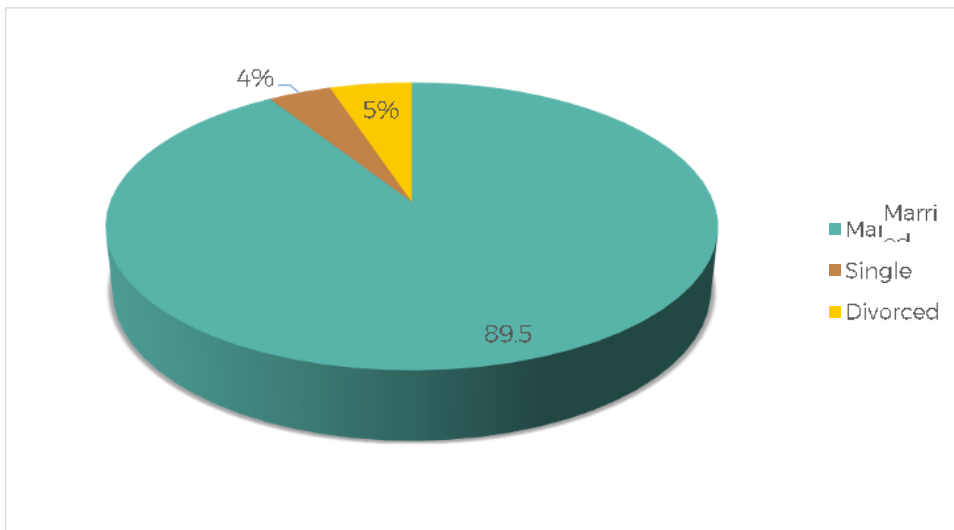
Survei ini melibatkan 258 responden yang merupakan peserta kelompok swabantu, koperasi dan anggota akar rumput Organisasi Mitra di 5 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara). Rinciannya terlihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Responden Menurut Organisasi Mitra

Mitra Utama	Frekuensi	Persentase
Aisyiyah	20	7.8
Bakti	35	13.6
ILO Mampu	30	11.6
KAPAL Perempuan	30	11.6
Komnas Perempuan	29	11.2
KPI	29	11.2
Migrant Care	25	9.7
PEKKA	30	11.6
Permampu	30	11.6
Total	258	100.0

Dalam hal status perkawinan reponden, survei ini menemukan bahwa hampir 90% responden berstatus kawin, dan 3.9% merupakan perempuan kepala rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. Status Perkawinan Responden



Terkait dengan besarnya rumah tangga responden, 96% keluarga responden berjumlah kurang dari 9 orang, sedangkan setengahnya memiliki 1-4 anggota keluarga dan setengahnya lagi memiliki 5-8 anggota keluarga. Hanya 4 persen responden memiliki 8 anggota keluarga atau lebih, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

3 KARAKTERISTIK SUMBER PENGHIDUPAN PEREMPUAN

3.1 PENDAHULUAN

Temuan yang berkaitan dengan sumber penghidupan perempuan di lokasi kajian akan di bahas pada bagian ini. Kajian ini melibatkan kelompok perempuan, koperasi, dan kelompok swabantu yang merupakan penerima manfaat atau anggota dari 9 mitra utama dan 18 sub-mitra di 18 daerah yang melintasi 6 provinsi di Indonesia (lihat Bab 2). Temuan utama dari kajian ini ialah bahwa perempuan di Indonesia, sebagaimana halnya perempuan penerima manfaat MAMPU, masih secara tidak setara terbebani oleh kemiskinan dan masih memiliki sumber penghidupan yang kurang terjamin akibat adanya hambatan sosial dan struktural.

Sumber penghidupan sebagian besar perempuan yang terlibat dalam kajian ini terpusat di sektor informal - hanya 2,4% dari responden bekerja di sektor formal⁶. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan para penerima manfaat, yang relatif lebih tinggi dari rata-rata pendidikan perempuan di Indonesia. Mayoritas penerima manfaat (34,9%) menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dan 7% menyelesaikan pendidikan tinggi. Perempuan penerima manfaat cenderung bekerja dalam jenis-jenis pekerjaan yang bersifat fleksibel, seperti wirausaha sebagai pedagang kecil-kecilan. Kurangnya fleksibilitas dalam pekerjaan formal menjadi hambatan strategis bagi perempuan yang memasuki pekerjaan formal. Kajian ini menemukan bahwa kegiatan penerima manfaat yang menghasilkan pendapatan (*income*) berlangsung di lingkungan rumah tangga, didapatkan melalui kebiasaan secara otodidak dan tidak sesuai dengan keterampilan yang mereka pelajari di sekolah. Kajian ini juga mencatat bahwa terdapat kelemahan pada sumber penghidupan para pekerja rumahan yang diakibatkan oleh meningkatnya penggunaan sistem *putting-out*. Hal ini dikarenakan sistem produksinya, yang mengembangkan rantai-nilai, tidak lagi menaruh perhatian pada kegiatan produksi secara terpusat, namun menyebarkan produksi ke sejumlah skala yang berbeda-beda, termasuk ke tingkat rumah tangga. Sektor pekerja rumahan sendiri didominasi oleh perempuan, dan perlindungan terhadap mereka tergolong rendah karena tidak diikutsertakan dalam perlindungan sosial pekerja, gaji yang diperoleh juga terbilang rendah dan mereka juga masih harus menanggung sejumlah biaya produksi.

⁶ Sektor formal dalam kajian ini adalah menjadi pekerja di perusahaan swasta dan pegawai negeri sipil di instansi pemerintah.

Perempuan menghadapi hambatan akses terhadap sumber daya, termasuk kemiskinan waktu sebagai wujud dari pembagian kerja yang tidak setara dalam rumah tangga. Beberapa kemajuan dalam hal perubahan pengambilan keputusan teridentifikasi dalam kajian ini (sebagaimana akan dibahas pada Bab 4). Perempuan melibatkan diri dalam kegiatan produktif, misalnya petani yang menghabiskan jam kerja lebih lama di rumah untuk melakukan kegiatan pertanian demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, meski sumbangsih mereka sering kali tak diakui adanya. Akibatnya, kemiskinan waktu merupakan hal biasa di antara perempuan penerima manfaat, dan mereka terlibat penuh dalam kerja rumah tangga (reproduktif), kegiatan produktif, dan kegiatan sosial.

Dimensi lain dari kekuasaan terwujud dalam berkurangnya akses perempuan terhadap sumber daya produktif seperti tanah dan keuangan. Rendahnya akses mereka terhadap pembuatan keputusan formal juga umum terjadi meski ada beberapa peningkatan keterlibatan perempuan dalam musrenbangdes. Lembaga sosial yang patriarkis menghambat akses perempuan terhadap sumber daya serta forum pembuatan keputusan, dan keadaan ini tetap tidak berubah.

3.4 PEKERJAAN DAN KETERGANTUNGAN PEREMPUAN PADA SUMBER PENGHIDUPAN SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA: ANALISIS MAKRO

Jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,17 juta jiwa pada tahun 2014, dan 49,74% dari penduduknya adalah perempuan. Sebagian besar penduduk adalah orang muda usia produktif.⁷ Angka partisipasi tenaga kerja perempuan di tahun 2010 terhitung sebanyak 50,3%. Artinya hanya sekitar 50% perempuan Indonesia aktif secara ekonomi.⁸

Kebanyakan pekerjaan di Indonesia bergantung pada sektor informal⁹. Pekerjaan di sektor informal mencapai 64,7% di tahun 2003 dan turun menjadi 59% di tahun 2010 (ILO, 2011). Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan Iryani (2013), hanya 3 persen pekerja yang dipekerjakan di Indonesia mempunyai kontrak permanen, dan 3 persen lainnya memiliki kontrak berjangka tetap. Sedangkan 38% pekerja tidak mempunyai

⁷ Lihat Lembar Tambahan 3.2: Piramida Penduduk Indonesia.

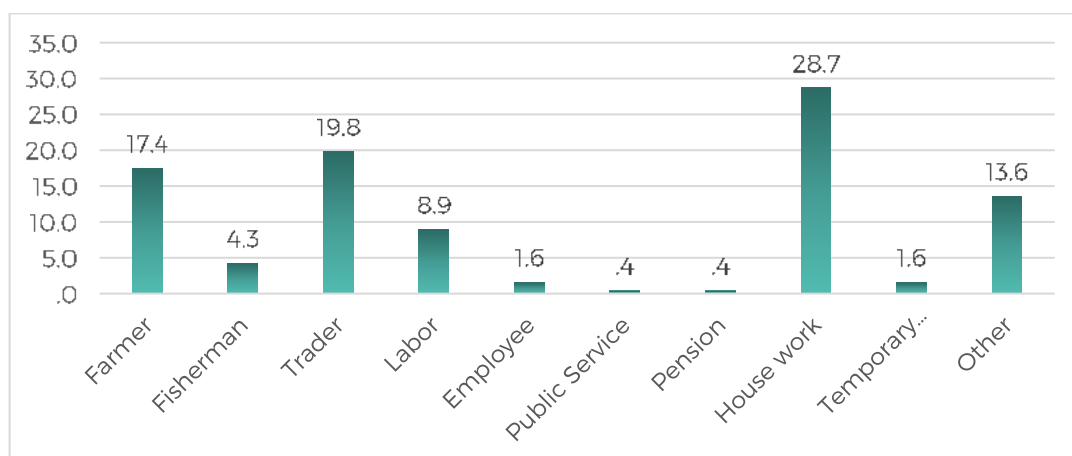
⁸ Lihat Lembar Tambahan 3.3: Angka Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan

⁹ Boeke dengan jelas mengidentifikasi hal ini sebagai dualisme dalam ekonomi Indonesia. Ini berarti bahwa dua sektor telah ada secara bersamaan untuk begitu lamanya yaitu sebuah sektor urban-industri dan sebuah sektor pedesaan-pertanian informal yang besar (Boeke, 1953: 1978). Kebanyakan produksi berlangsung di sektor informal yang dipenuhi oleh pekerja pedesaan yang digaji rendah dan berproduktivitas rendah. Fenomena ini terjadi tidak hanya dalam latar pedesaan, tetapi juga di daerah perkotaan yang tercermin oleh tingginya angka urbanisasi (Sitorus, 2015).

kontrak dan 54% dari mereka berada di sektor informal (di bidang pertanian maupun non-pertanian) yang tidak memiliki kontrak formal.

Umumnya perempuan yang bekerja di sektor informal hanya memiliki sedikit keterampilan dan terjebak dalam kegiatan ekonomi yang subsisten (demi bertahan hidup) (Firdaus dan Dewayanti, 2012). Tidak adanya fleksibilitas dalam pekerjaan formal, dan diskriminasi dalam penempatan kerja, menyulitkan perempuan untuk memasuki sektor formal. Ragam jenis pekerjaan informal perempuan dapat dilihat di dalam studi ini (Gambar 3)

Gambar 3. Pekerjaan Utama Responden (Persentase)

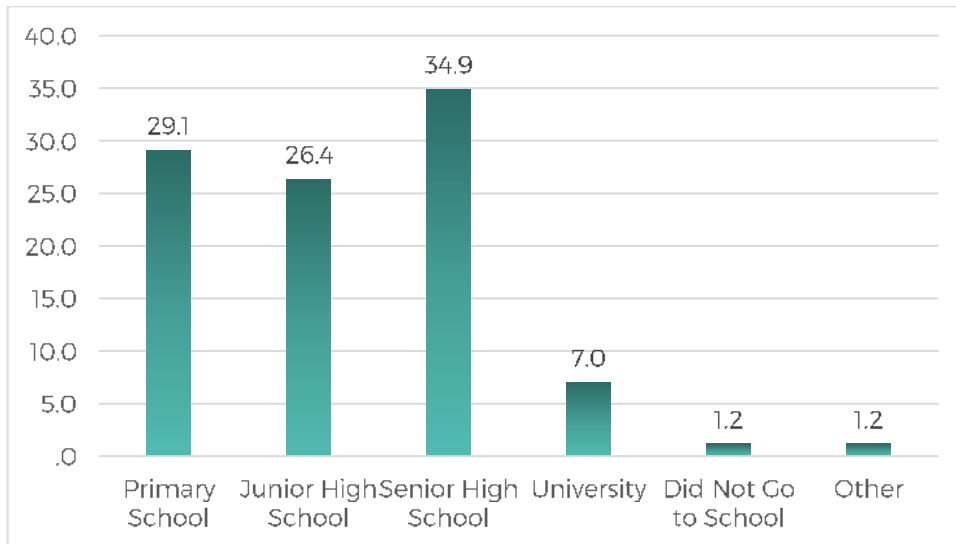


N=258

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3 di atas, 28.7% responden melakukan pekerjaan rumah tanpa dibayar. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar. Selain itu, 19.8% dari mereka mendapat penghasilan sebagai pedagang kecil-kecilan, dan 17.4% sebagai petani. Jenis pekerjaan lain di sektor formal adalah pegawai sementara yang dihitung sebanyak 1.6 persen. Lima puluh persen responden mengakui bahwa mereka mempunyai pekerjaan sampingan.

3.3 ASET MANUSIA

Dalam hal tingkat pendidikan, mayoritas responden (34.9%) telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas, sebagaimana terlihat pada Gambar 4 di bawah.

Gambar 4. Tingkat Pendidikan Responden

N= 258

Responden yang hanya selesai sampai bangku sekolah dasar merupakan kelompok terbesar kedua menurut tingkat capaian pendidikan, yaitu 29,1%, sedangkan 26,4% responden tamat sekolah menengah pertama. Dan 7 persen responden lulus perguruan tinggi.

Sebagian besar responden perempuan mendapatkan keterampilan sumber penghidupan di luar sekolah, dari pembelajaran secara informal hingga tradisi turun temurun. Partisipasi dalam program LSM/Mitra juga telah memberi kesempatan belajar yang membantu dalam menyediakan keterampilan untuk menciptakan variasi dalam mata pencaharian, seperti:

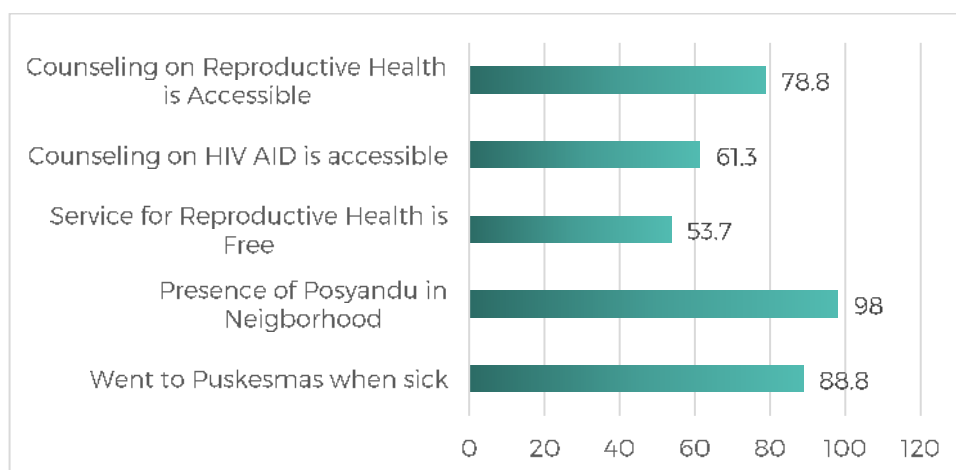
- Keterampilan pengolahan makanan
- Keterampilan kerajinan tangan
- Pembuatan krupuk
- Pijat
- Kerajinan Batik
- Menjahit dan merenda
- Keterampilan bertani
- Keterampilan bidang salon
- Penggunaan dan daur ulang kertas dan plastik
- Keterampilan pengolahan ikan
- Keterampilan pembuatan kue
- Keterampilan pembuatan cideramata
- Pembuatan gerabah

- Obat tradisional seperti jamu

Keanekaragaman sumber penghidupan/mata pencaharian bergantung pada keterampilan yang ada serta didukung oleh sumber daya yang tersedia di lingkungan rumah tangga, seperti peralatan memasak, peralatan menjahit, dan peralatan kerajinan tangan.

Dimensi lain dari modal manusia adalah kesehatan. Mayoritas responden melaporkan bahwa layanan kesehatan telah tersedia, 88,8% responden melaporkan bahwa mereka telah mengakses layanan kesehatan dari Puskesmas saat mereka sakit. Hampir semua responden melaporkan bahwa Posyandu tersedia di lingkungan mereka. Layanan kesehatan lain seperti kesehatan reproduksi dan konseling HIV/AIDS juga mudah diakses.

Gambar 5. Akses terhadap Layanan Kesehatan



N=258

3.4 KARAKTERISTIK MODAL KEUANGAN DAN EKONOMI SUBSISTEN

Aset keuangan mempunyai pengaruh strategis terhadap sumber penghidupan. Modal keuangan yang dimaksud termasuk pendapatan (*income*), kredit/pinjaman, tabungan, dan transfer valas (*remittances*) sangat penting bagi perempuan dan rumah tangga. Survei menemukan bahwa mayoritas (41,5%) rumah tangga responden mempunyai pendapatan kurang dari 1 (satu) juta rupiah per bulan, sebagaimana terlihat pada Lampiran 3.9. Sekitar 38% responden mempunyai pendapatan antara satu hingga dua juta rupiah per bulan. Namun, survei menunjukkan bahwa sekitar 6% responden berpendapatan lebih dari 3 juta rupiah per bulan.

Menurut pendapatan bulanan, kebanyakan responden dikategorikan sebagai rakyat miskin, padahal mereka terlibat dalam kegiatan produktif. Terkait pola pengeluaran, mayoritas responden (54,31%) menghabiskan 50 hingga 75% pendapatan rumah tangga mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, sekitar 10% responden melaporkan bahwa pengeluaran untuk bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya menacapai 20



lebih dari 75% pendapatan rumah tangga mereka, sebagaimana terlihat pada Lampiran 3.10.

Berdasarkan akses terhadap layanan jasa keuangan, perempuan merupakan pihak yang paling termarginalisasi di masyarakat Indonesia. Menurut Bank Dunia (2010), hanya 49% dari jumlah penduduk bisa mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. 31% rumah tangga Indonesia dilayani oleh sektor keuangan informal dan semi-informal, sedangkan 17% penduduk kurang mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan. Di samping itu, hanya 41% rumah tangga mempunyai rekening tabungan di bank. Survei Bank Indonesia (2012) menemukan bahwa 52% rumah tangga tidak punya tabungan di bank, dan 40% masuk dalam kategori yang tidak mempunyai akses terhadap fasilitas bank (Kusuma, 2014).

Survei tersebut juga membeberkan bahwa para responden menyimpan tabungan mereka di bank, koperasi atau dalam bentuk perhiasan. Secara keseluruhan, 32,5% responden memiliki tabungan di bank, 29,6% menyimpan uang mereka di koperasi atau *credit union* dan 21,7% menanam uang mereka dalam bentuk perhiasan (lihat Lampiran 3.7).

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa koperasi, lembaga keuangan mikro atau *credit union* yang didukung oleh organisasi mitra telah semakin mempermudah akses keuangan bagi perempuan.

Meskipun demikian, perempuan penerima manfaat melaporkan bahwa seringkali mereka kesulitan mengakses layanan jasa keuangan yang diperlukan untuk menyokong sumber penghidupan mereka. Sebagai contoh, mantan pekerja migran melaporkan bahwa saat kembali ke tanah air pilihan mereka terbatas dalam mengakses modal keuangan, sebagai mana ditunjukkan oleh kutipan DKT di bawah:

"Kami terkejut saat kembali dari luar negeri. Sebelumnya kami mempunyai aliran kas tunai secara rutin tetapi sekarang kita kembali di rumah, tidak ada sumber penghasilan tetap. Tidak ada pekerjaan layak di desa sehingga kami berusaha mencari usaha baru. Namun, kami tidak memiliki modal sementara akses kredit untuk meminjam uang itu sulit."

(DKT dengan penerima manfaat SARI, Wonosobo, September 2015).

Sektor keuangan informal—terdiri dari peminjam uang dan lembaga informal seperti arisan—juga memiliki peran penting. Arisan merupakan sebuah kelompok yang terbentuk di lingkungan bertetangga dengan tujuan simpan pinjam uang atau barang dengan cara bergilir antar setiap anggotanya. Selain arisan, terdapat pula jasa pinjaman uang yang disediakan oleh pihak perseorangan—sering juga disebut 'lintah darat'. Orang-orang tersebut menyediakan pinjaman tanpa prosedur yang rumit dan memberi kelonggaran dalam pembayarannya, namun bunga yang dikenakan sangat tinggi. Pinjaman bunga tertinggi biasanya disediakan oleh para tauke atau punggawa (pembeli yang dikenal juga sebagai tengkulak) dan koperasi palsu. Sumber-sumber pinjaman lainnya berasal dari pihak penyedia barang/pejual seperti penjaga toko, pedagang kelontong dan pemilik warung.

3.5 DISKRIMINASI GENDER DAN TANTANGAN DALAM KENDALI ATAS SUMBER DAYA

Peran gender mengacu pada hak, tanggung jawab, ekspektasi serta hubungan antara laki-laki dan perempuan. Subordinasi dan diskriminasi gender masih merupakan hal yang lazim meskipun pemerintah telah meratifikasi CEDAW, dan berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memajukan kesetaraan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang ada tidak secara otomatis terwujud dalam praktik sosial dan ekonomi. Perempuan masih terus menghadapi kerugian dan hambatan dalam mencapai kesetaraan akses serta kendali atas aset-aset produktif.

3.5.1 KURANGNYA AKSES DAN KENDALI ATAS SUMBER DAYA PRODUKTIF

Tanah bukan satu-satunya dasar kepemilikan rumah dan sumber penghidupan, namun dapat memberi keuntungan dalam mengakses layanan produktif lainnya seperti kredit-mikro, dan juga sebagai suatu simbol harga diri. Dalam hal kepemilikan tanah pertanian, lebih dari setengah (54%)¹⁰ responden tidak memiliki tanah untuk pertanian dan hanya 44% mempunyai ternak. Kajian ini menemukan bahwa kendali atas tanah didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan memiliki akses penuh namun mempunyai kendali yang terbatas atas sumber daya tanah. Tanah merupakan aset produktif utama dalam kebanyakan rumah tangga, karena tanah menjadi sumber pendapatan kas dan pangan rumah tangga. Meskipun laki-laki yang mempertahankan kendali atas keputusan mengenai penggunaannya, perempuan berperan penting dalam mengelola tanah. Begitu pula halnya dengan aset produktif lain seperti rumah yang terdaftar atas nama suami, meskipun secara fisik perempuan dapat mengakses dan menggunakan rumah tersebut. Sistem waris yang patriarkis memengaruhi akses perempuan terhadap sumber produktif, terutama tanah dan rumah. Dalam suatu studi tentang pengarusutamaan gender dalam pertanian dalam konteks Indonesia, Bappenas (2001) menyimpulkan bahwa sistem waris di sebagian besar masyarakat di Indonesia memperkecil peluang perempuan terhadap akses dan kendali atas sumber daya. Hal ini terjadi karena hukum kebiasaan/adat, yang berdasarkan agama atau budaya lain, cenderung mengutamakan pembagian warisan untuk anak laki-laki.

Para responden ditanya tentang jenis ternak yang mereka miliki, dan di antara mereka yang mempunyai ternak, 34,6% memiliki ayam, dan tidak banyak yang mempunyai sapi (4,6 persen) atau kambing (6,9 persen). Ini menunjukkan bahwa perempuan punya kendali atas ternak kecil seperti ayam, sedangkan ternak berukuran sedang dan besar,

¹⁰ Lihat Lampiran 3.5: Kepemilikan Tanah dan Ternak

seperti sapi dan kambing dikuasai oleh laki-laki¹¹. Meskipun demikian, perempuan tetap terlibat penuh dalam mengasuh ternak besar, namun kepemilikan dan kendalinya dikuasai oleh pihak laki-laki, kecuali ayam, yang dianggap sebagai aset perempuan.

DKT yang dilangsungkan saat kerja lapangan memastikan bahwa perempuan mempunyai lebih sedikit akses terhadap tanah daripada laki-laki. Satu DKT tentang akses terhadap sumber daya mencerminkan tantangan terhadap kesetaraan gender sebagai berikut:

"Di Sulawesi Selatan sistem waris berdasarkan hukum Islam, meski tidak mutlak. Kebiasaan yang berlaku adalah bahwa antara anak laki-laki dan perempuan ada perbandingan 2:1. Beberapa perubahan terjadi karena adanya pengaruh hukum adat dan modernisasi. Oleh karena itu konsensus juga bisa diterima. Keputusan pengadilan menjadi pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa, dan dalam hal ini akan masuk ke Pengadilan Agama. Dalam sistem Islam perempuan kurang dianggap dan lebih sedikit haknya dalam hal warisan dibandingkan laki-laki. Ancaman yang sama terjadi ketika terjadi cerai atau menjadi janda. Hak seorang istri pada kasus cerai akan terbatas pada harta gono gini. Sedangkan asetnya yang lain akan diwarisi oleh anak laki-lakinya,

(DKT dengan BaKTI, Agustus 2015).

Diskriminasi dalam hal warisan diperburuk dengan berlanjutnya stigma yang dialami oleh perempuan, sebagaimana tercermin dalam DKT dengan KP2SK, sebagai berikut:

"Diskriminasi terhadap perempuan masih merupakan hal biasa. Dalam sistem pembagian hak waris, para perempuan tidak mendapat porsi yang sama dengan saudara laki-laki mereka. Perempuan sering kali disalahkan jika mengutamakan pekerjaan daripada urusan rumah tangga. Pemberian stigma negatif biasa diberikan jika perempuan keluar dari rumah untuk bekerja atau untuk pertemuan kelompok"

(DKT dengan KPS2K, September 2015).

Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian dalam hal akses dan kuasa atas tanah, seperti di Toraja, yang menjalankan sistem warisan yang lebih setara, di mana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama terhadap aset warisan. Begitu pula dalam hal pekerjaan produktif seperti bertani, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang setara.¹²

¹¹ Lihat Lampiran 3.6. Jenis ternak yang dikuasai oleh perempuan penerima manfaat

¹² FGD dengan BaKTI.

3.5.2 KESENJANGAN AKSES TERHADAP LAYANAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN

kesenjangan antar gender juga terjadi pada tingkatan akses terhadap layanan penyuluhan dan pelatihan. Pekerja yang mendapat penyuluhan sebagian besarnya merupakan laki-laki, dan seringkali terdapat bias dalam pemberian layanan penyuluhan, meskipun jumlah petani perempuan cukup banyak. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagaimana digambarkan di bawah ini:

"Berkaitan dengan akses terhadap kesempatan pelatihan, perempuan masih mengalami diskriminasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan negara yang menyatakan bahwa kepala keluarga adalah suami/laki-laki (Undang-Undang tentang Perkawinan). Hal ini menjadi hambatan bagi keikutsertaan perempuan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan layanan penyuluhan atau program bantuan sosial, orang yang terdaftar sebagai penerima adalah kepala keluarga. Wanita dianggap telah diwakili oleh suami mereka yang merupakan kepala keluarga. Akibatnya, perempuan jarang ikut serta dalam penyuluhan dan pelatihan. Ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penyuluh adalah laki-laki."

(DKT dengan BaKTI, Agustus 2015)

3.5.3 KEMISKINAN WAKTU DAN BEBAN KERJA YANG TIDAK SETARA

Moser mengidentifikasi hal-hal yang menjadi beban kerja tiga kali lipat (*triple work load*) yang dialami oleh perempuan yang juga ditemukan di semua lokasi studi ini. Peran *triple* bagi perempuan berpenghasilan rendah diidentifikasi oleh Moser sebagai peran produktif, reproduktif, dan peran masyarakat.

Kotak 1: Peran Lipat tiga Perempuan

Kerja produktif: Pekerjaan ini menghasilkan barang dan jasa yg dapat dikonsumsi oleh rumah tangga atau menghasilkan pemasukan dan dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kerja produktif perempuan sering dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga mereka (kerja reproduktif) dan cenderung lebih tak terlihat dan lebih kurang dihargai dibandingkan kerja produktif laki-laki.

Kerja reproduktif: Pekerjaan ini mencakup mengandung dan mengasuh anak serta tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga dan pemeliharaan semua anggota keluarga. Tugas-tugas ini termasuk memasak, mencuci baju, bersih-bersih, mengambil air dan bahan bakar serta menjaga yang sakit dan sudah lanjut usia. Wanita dan anak perempuan terutama bertanggung jawab atas pekerjaan ini, yang biasanya tidak berbayar.

Peran masyarakat: Kegiatan masyarakat bagi perempuan termasuk pengadaan dan pemeliharaan sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air, perawatan kesehatan dan pendidikan. Kegiatan-kegiatan ini dijalankan sebagai perpanjangan daripada peran reproduktif mereka dan umumnya tidak berbayar dan dilakukan di waktu luang mereka.

Sumber: Ringkasan dari Moser, C.N. (1993)

Pekerjaan rumah tangga yang dimaksud juga termasuk merawat/mengasuh anggota keluarga, misalnya jika dalam rumah tangganya terdapat orang tua atau orang sakit. Tugas-tugas rumah tangga sangat membebani perempuan bila mereka juga harus bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga. Anak perempuan biasanya lebih banyak membantu pekerjaan rumah tangga, dibandingkan dengan anak laki-laki. Pekerjaan rumah tangga tersebut biasanya yang menyangkut pengadaan kebutuhan rumah tangga, misalnya seperti menyiapkan makan, membersihkan rumah dan sekelilingnya, mengambil air (beberapa desa mempunyai pipa air), memasak air untuk minum, mengumpulkan kayu bakar, dan mencuci pakaian.

"Dalam masyarakat Karo, sebagai kepala keluarga, laki-laki biasa tidak terlibat dalam bertani. Para istri bertanggung jawab atas kegiatan bertani, sedangkan para suami biasanya ada di warung. Perempuan pergi ke kebun atau sawah dan melakukan sebagian besar kegiatan tani dan suami berperan sebagai pengawas dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ringan. Selain itu, perempuan dibebani oleh pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan mengasuh anak. Pandangan buruk ditujukan pada laki-laki yang melibatkan diri dalam pekerjaan rumah tangga seperti itu dan membuat mereka tidak dipandang sebagai pria terhormat.

(DKT dengan Masyarakat Penerima Manfaat BITRA, Agustus 2015).

Pembagian tugas/kerja merupakan hal biasa dalam rumah tangga para responden. Fenomena di lokasi studi menunjukkan adanya ketidaksetaraan beban kerja antara laki-laki dan perempuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Secara umum, perempuan dan laki-laki berbagi tanggung jawab dalam hal mata pencaharian, namun, terdapat pola yang jelas pada pembagian tugas berdasarkan gender dalam hal kegiatan rumah tangga, bertani dan pekerjaan lainnya yang menghasilkan pendapatan. Ketidaksetaraan beban kerja masih merupakan hal yang umum di antara kelompok masyarakat yang terlibat dalam kajian ini. Perempuan mempunyai tanggung jawab utama dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga dan di saat yang bersamaan juga masih harus melibatkan diri dalam pekerjaan produktif.

Studi Kasus Petani Kopi Perempuan di Desa Buluh Telang, Sidikalang, Dairi

Di desa ini mata pencaharian utama masyarakatnya adalah menanam padi dataran tinggi dan kopi arabika. Dengan wilayah pertanian yang tidak terlalu besar (rata-rata kurang dari 1 hektar per keluarga), mereka menanam kopi dengan teknologi rendah. Kebanyakan petani di desa memanen kopi mereka dengan cara pemetikan selektif daripada pemetikan strip (biji merah atau kuning). Pemasaran kopi mereka kebanyakan dilakukan melalui pasar

setempat dengan cara petani membawa kopi mereka atau kopi itu dikumpulkan oleh pembeli/agen setempat yang mendatangi desa-desa.

Tabel 6. Perempuan sangat terlibat dalam budidaya kopi

Kegiatan	Perempuan	Laki-laki
Pembersihan lahan	**	**
Penanaman	*	***
Penyiangan	***	*
Panen	***	*
Pengupasan kulit buah	**	**
Pengeringan	***	*
Transportasi	**	**
Penjualan	***	*

Studi Kasus Budidaya Sayur di Siporennu – Tarongko, Makale, Tana Toraja.

Bertani merupakan mata pencaharian utama masyarakat di desa Tarongko, Kabupaten Toraja Utara. Masyarakat menanam sayur mayur dan tanaman hortikultura seperti kol, bayam dan kacang-kacangan. Guna mengantisipasi keterbatasan air, khususnya di musim kemarau, mereka menanam sayuran di dekat sungai. Di musim kemarau, para petani harus menggunakan pompa listrik untuk mengairi tanaman. Sayuran yang dipanen biasanya dijual langsung ke pasar setempat, tetapi kadang pembeli datang langsung ke lokasi dan membeli dengan harga lebih murah. Terkait dengan pembagian kerja, suami biasanya bertanggung jawab membersihkan lahan, sedangkan para istri terlibat penuh dalam penanaman, penyiangan, dan pengairan tanaman. Panen merupakan tanggung jawab bersama tetapi penjualan merupakan tanggung jawab utama perempuan.

Tabel 7. Profil Kegiatan Sehari-hari Perempuan di Toraja

Time	Perempuan (Istri)	Laki-laki (Suami)
04.00 - 04.30	Bangun	Tidur
04.30 - 06.00	Memasak Mencuci	Bangun
06.00 - 07.00	Mengurus anak Menyiapkan kopi/teh untuk suami Menyiapkan sarapan pagi	Minum teh/kopi Sarapan pagi
07.00 - 08.00	Sarapan pagi Persiapan pergi ke kebun kopi	Sarapan pagi Persiapan pergi ke kebun/ladang
08.00 - 12.00	Pergi ke kebun kopi dan bekerja di ladang	Pergi ke ladang/kebun dan bekerja di ladang
12.00 - 13.30	Persiapan makan siang Istirahat makan siang	Istirahat makan siang
13.30 - 16.00	Bekerja di ladang berlanjut	Bekerja di ladang berlanjut
16.00 - 19.00	Pulang ke rumah Memasak Membersihkan rumah Mengurus anak	Pulang ke rumah Bersantai
19.00 - 21.00	Bersantai Kegiatan sosial	Bersantai Kegiatan sosial
21.00	Istirahat malam	Istirahat malam

Pembagian kerja juga dipengaruhi oleh gender. Sebuah studi kasus pembuatan gerabah di bawah menggambarkan ketidaksetaraan beban kerja antara laki-laki dan perempuan.

Studi Kasus Pembagian Kerja Berbasis Gender dalam Pembuatan Gerabah di Lombok Barat

Banyumulek adalah pusat pembuatan gerabah di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak sekitar 14 kilometer di selatan Mataram, ibu kota provinsi. Di desa ini, sekitar 80% penduduk terlibat dalam pembuatan gerabah sebagai sumber utama penghidupan mereka sejak tahun 1990an. Sebagian besar penduduk desa berasal dari suku Sasak dan mereka belajar membuat gerabah sebagai keterampilan tradisional turun temurun.

Seperti yang kita temukan pada kegiatan budidaya sayur, proses pembuatan gerabah juga turut didominasi oleh perempuan sebagaimana terlihat pada Tabel 8 di bawah.

Tabel 8. Keterlibatan Perempuan dalam Pembuatan Gerabah

Kegiatan Pembuatan Gerabah	Perempuan (%)	Laki-laki (%)
Mencari atau memesan bahan	75	25
Menguli tanah liat	75	25
Membasahi dan memulai tanah liat	100	-
Mencampur tanah liat dengan pasir	100	-
Mengeringkan	100	-
Mengaduk dan menggulung	100	-
Membentuk gerabah	100	-
Menghaluskan gerabah	100	-
Memutar	100	-
Mengoles dengan tanah halus	100	-
Mengusap halus	75	25
Mengeringkan	75	25

Kegiatan Pembuatan Gerabah	Perempuan (%)	Laki-laki (%)
Membakar	50	50
Variasi ukiran	50	50
Menghias supaya indah	25	75
Transportasi	25	75
Penjualan	75	25

Sebagaimana terlihat pada Tabel 8, hanya sedikit kegiatan yang melibatkan laki-laki. Kebanyakan produksi gerabah dilakukan di dalam atau di lingkungan sekitar rumah. Oleh karena itu, dalam hal ini akses dan kendali atas rumah dan tanah adalah hal yang sangat penting. Kendali dan akses terhadap aset produktif tidak terbagi secara merata di berbagai kelompok masyarakat. Keberadaan aset-aset produktif dibawah pihak laki-laki/suami.

Aspek lain yang berkaitan dengan kemiskinan perempuan adalah pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi di berbagai daerah, sebagaimana pembahasan pada bagian berikutnya.

3.5.4 TANTANGAN INSTITUSIONAL ATAS KEIKUTSERTAAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN

Diskriminasi gender juga terwujud dalam masalah pembuatan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat. Di tingkat masyarakat, setelah reformasi terjadi sejumlah perubahan struktural di Indonesia, di mana ruang dan ranah publik lebih terbuka dan tersedia bagi perempuan. Tetapi, masih ada beberapa tantangan dalam pemerataan keikutsertaan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih luas.

Tantangan tersebut tergambar dalam kotak di bawah ini.

Kotak 2. Tantangan Institusional dan Keikutsertaan Perempuan dalam Proses Pembuatan Keputusan

- Skema atau program pembangunan yang tersedia jarang berdasarkan pada kebutuhan perempuan
- Pendapatan perempuan masih dianggap sekunder
- Kesadaran politik perempuan tentang bagaimana turut serta dalam proses pembuatan kebijakan setempat masih rendah
- Keikutsertaan perempuan cenderung terbatas pada memenuhi persyaratan kuota
- Pemimpin politik kebanyakan masih laki-laki, tetapi jika seorang perempuan menduduki jabatan seperti Kepala Desa, pembuatan keputusan sering dipengaruhi suaminya
- Tim Delegasi sering didominasi peserta laki-laki sehingga kurang peka isu gender
- Ada kecenderungan perempuan kurang percaya diri dalam bersaing meraih kedudukan/jabatan yang strategis
- Kedudukan publik pada tingkat lokal, seperti dusun, tidak terbuka untuk calon perempuan
- Pada sebagian besar acara di tingkat desa, peran perempuan sering terbatas pada urusan konsumsi, sekretaris dan bendahara

Sumber: dokumen MAUPE

3.5.5 DISKRIMINASI GAJI

Diskriminasi ekonomi terhadap perempuan terus terjadi, termasuk dalam hal kesenjangan upah dan kesempatan mendapat promosi (ACILS, 2010). Berdasarkan data BPS (2015) masih ada perbedaan besar antara upah laki-laki dan perempuan: di bidang pertanian, upah perempuan 34% lebih rendah dari laki-laki, sedangkan di bidang industri, 27,18% lebih rendah (BPS, 2015). Kajian ini juga menemukan bahwa perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan masih merupakan hal yang umum sebagaimana ditunjukkan oleh kutipan di bawah ini.

"Terdapat diskriminasi upah untuk pekerjaan yang sama. Seorang petani perempuan dibayar Rp25.000 per hari sedangkan laki-laki mendapatkan Rp35.000 ditambah uang rokok. Jika perempuan mencoba menawar, mereka akan dikucilkan dari pasar pekerja harian"

Berkaitan dengan akses terhadap layanan kredit, perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kredit pada sistem perbankan formal. Pada banyak lokasi penelitian, para peserta DKT menyatakan hal ini, sebagaimana kutipan berikut:

"Ketika sebuah rumah tangga perlu akses terhadap kredit, laki-laki diasumsikan sebagai perwakilannya. Karena itu, saat seorang perempuan memerlukan pinjaman, pemberian kredit tersebut akan memerlukan tanda tangan suaminya."

(DKT dengan Bakti, Agustus 2015).

3.5.7 PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Meskipun tidak terjadi di semua lokasi studi, pernikahan dini masih merupakan hal yang lazim ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Di provinsi tersebut, banyak perempuan terjebak oleh praktik pernikahan dini. Kutipan berikut menunjukkan betapa pernikahan dini masih mengancam anak perempuan:

"Sehubungan dengan pernikahan dini, hal ini masih sering ditemukan di Sulawesi Selatan. Masalah ini juga dipengaruhi oleh lebih diutamakan laki-laki daripada perempuan dalam hal pendidikan. Akibatnya, perempuan muda yang tidak pergi sekolah akan diminta untuk menikah. Sering kali dikatakan bahwa 'karena pada akhirnya perempuan akan bekerja di rumah, maka pendidikan bagi anak perempuan tidak menjadi prioritas.' Pernikahan dini masih merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga miskin. Masalah ini juga akan menyebabkan feminisasi kemiskinan. Kekerasan terhadap perempuan juga menjadi tinggi resikonya karena laki-laki diasumsikan berkuasa."

(DKT dengan BaKTI, Agustus 2015)

"Pernikahan dini masih biasa di daerah pesisir. Orang tua sering meminta anak perempuan umur 16 tahun untuk menikah dan mereka tidak memiliki pilihan lain."

(DKT dengan Komunitas Penerima Manfaat YPKM, Pangkep, Agustus 2015).

Pernikahan dini bahkan dapat terjadi karena adanya paksaan orang tua dan kehamilan dini, dan hal ini juga dipengaruhi oleh pilihan orang tua yang lebih mengutamakan membiayai pendidikan anak laki-laki dengan mengorbankan anak perempuan (DKT dengan KPS2K, September 2015). Pernikahan dini erat hubungannya dengan kemiskinan. Masalah ini menggambarkan suatu lingkaran setan kerentanan dan ketidakberdayaan yang dikaitkan dengan perempuan yang terjebak dalam pernikahan dini. Kebanyakan perempuan yang terjebak dalam pernikahan tersebut termasuk dalam kelompok miskin dan terpinggirkan. Sering kali pernikahannya tidak berjalan dengan baik, kemudian berakhir dengan perceraian atau perempuannya ditinggalkan. Bila terjadi perceraian, kebanyakan perempuan tidak berhak mendapat warisan karena adanya adat sistem waris patriarkis. Perempuan sering terpapar kekerasan. Berbagai macam DKT juga melaporkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan masih menghambat

perempuan dalam mewujudkan hak-hak mereka. Kekerasan terhadap perempuan biasanya disebabkan oleh pihak suami dan dapat berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi maupun psikologis.

3.6. MATA PENCAHARIAN MENDASAR, TEKNOLOGI SEDERHANA, TANTANGAN PEMASARAN DAN RISIKO LAINNYA

Menurut Pingali (2005) dan Pingali dan Rosegrant (1995), sumber penghidupan dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian mendasar, semi-komersial, dan komersial. Sumber penghidupan tergolong sebagai nafkah hidup mendasar ketika produksinya kebanyakan hanya untuk konsumsi sehari-hari. Dengan menggunakan klasifikasi ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber penghidupan perempuan di Indonesia merupakan mata pencaharian mendasar dan terpusat pada kegiatan dengan daya produktivitas rendah.

3.6.1 SUMBER PENGHIDUPAN PESISIR

Perempuan seringkali tidak dilibatkan di bidang perikanan, khususnya oleh para nelayan karena melaut untuk mencari ikan sering dipandang sebagai mata pencaharian laki-laki. Perempuan biasanya melakukan penangkapan ikan dalam wilayah pasang surut, seperti mengumpulkan kerang dan pengolahan pascapanen.

Berbagai lokasi penelitian di wilayah pesisir mencerminkan pola yang sama, perempuan kebanyakan terlibat dalam pengolahan ikan, pengumpulan kerang dan udang, di desa-desa setempat. Hal tersebut terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Ciri-Ciri Sumber Penghidupan di Wilayah Pesisir

Sub-Mitra/ Kabupaten	Ciri-Ciri Sumber Penghidupan
MAUPE, Maros	Perempuan di Maros terlibat dalam industri perikanan pada tahap pascapanen, seperti pengolahan ikan bandeng presto. Namun, produksinya dilakukan secara manual. Pemasaran dan keterampilan yang terbatas, serta kemasan berkualitas rendah merupakan hal yang seringkali ditemukan dalam proses ini. Pelatihan telah cukup banyak disediakan oleh pemerintah untuk berbagai aspek, kecuali pemasaran. Masalah lainnya adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas, menimbulkan kesulitan menyimpan produk sebelum dipasarkan. Mereka juga terlibat dalam kegiatan jahit-menjahit tetapi peralatan produksi hanya dimiliki oleh seorang anggota kelompok. Pemasaran produk terbatas pada pembeli setempat.

Sub-Mitra/ Kabupaten	Ciri-Ciri Sumber Penghidupan
PEKKA Tanjung Balai, Sumatera Utara	Di daerah ini, perempuan bekerja di bidang perikanan termasuk sebagai pengumpul kerang. Sumber penghidupan di sini bergantung pada penangkapan ikan namun kini terancam oleh perseteruan dengan pukat harimau. Tidak hanya itu, akses perempuan di bidang perikanan sebagai mata pencaharian mendasar di wilayah tersebut belum terjamin.
PESADA	PESADA aktif dalam memfasilitasi CU di Desa Jaring Halus. Desa ini berada di pulau kecil di Kabupaten Langkat. Masyarakat di desa ini semua terlibat dalam bidang perikanan. Perempuan terlibat dalam perikanan sebagai pencari kerang. Sumber penghidupan subsisten dalam hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah tangkapan, rendahnya harga dan kurangnya sumber perikanan akibat eksploitasi hasil laut oleh industri perikanan modern. Perempuan juga terlibat dalam proses pascapanen seperti pembuatan petis udang. Sayangnya, proses produksi cenderung tidak stabil karena naik turunnya akses terhadap bahan mentah.
YPKMS, Pangkep	Pangkep terletak di wilayah pesisir. DKT dengan para penerima manfaat YPKM di Desa Pulau Sabutung membahas masalah mata pencaharian mendasar masyarakat pesisir. Dengan tangkapan terbatas, produktivitas sangatlah rendah. Mereka bergantung pada bantuan dari punggawa/pembeli untuk sebagian besar kebutuhan mereka. Punggawa biasanya membeli tangkapan mereka dengan harga lebih murah, tetapi para nelayan tidak dapat menjual ke pihak lain karena rasa hutang budi kepada punggawa. Perempuan terlibat dalam penangkapan dan pembuatan jaring.

Gambar 6. Sumber penghidupan Perempuan di Wilayah Pesisir



Nelayan perempuan tradisional di Jaring Halus



Perempuan mengolah ikan di Kendal

3.6.2 PERTANIAN DI PEDESAAN

Pertanian memberikan pengaruh signifikan terhadap ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian masih merupakan yang terbesar, namun kapasitasnya terbatas. Kurangnya kapasitas petani diperburuk dengan terbatasnya akses terhadap sumber keuangan dan luas lahan yang terbatas. Selain itu, masalah lain yang signifikan mencakup infrastruktur yang tidak memadai dan akses pasar yang buruk. Bahkan kebanyakan petani Indonesia bertani untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup mendasar dan bergantung pada sumber daya alam. Di samping itu, kerusakan lingkungan hidup yang terus berlanjut turut meningkatkan kerentanan para petani.

Perempuan di bidang pertanian juga terancam oleh perubahan iklim, risiko bencana dan produktivitas rendah sebagaimana digambarkan di Tabel 10.

Tabel 10. Ciri-Ciri Sumber Penghidupan Pertanian

Sub-Mitra/Kabupaten	Ciri-Ciri Sumber penghidupan
YKS-Toraja	Di lokasi ini, masyarakat penerima manfaat terlibat dalam pertanian. Mereka umumnya menanam sayuran. Saat musim kemarau, produksi mereka rendah karena memerlukan irigasi. Selain itu, irigasi memakan biaya tambahan. Banjir juga merupakan tantangan lain saat musim penghujan.
BITRA Indonesia	Di lokasi ini, para petani terlibat dalam penanaman padi, kakao, hortikultura dan budidaya tanaman tahunan (<i>perennial</i>). Kebanyakan petani hanya memiliki sepetak kecil tanah. Petani selama ini mengalami ketidakpastian harga, risiko perubahan iklim, dan dampak bencana, khususnya abu vulkanis dari ledakan Gunung Sinabung. Tidak ada kompensasi yang diterima dari pemerintah untuk menanggung kerugian petani akibat dampak abu vulkanis pada pertanian di wilayah Deli Serdang dan Tanah Karo.
PEKKA NTB	Mayoritas petani bergantung pada sawah tadah hujan dan mengalami kekurangan air untuk irigasi. Ukuran tanah mereka juga rata-rata kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga. Akibatnya daya produksi pertanian rendah dan panen yang tidak pasti.

3.6.3 CIRI-CIRI SUMBER PENGHIDUPAN USAHA MIKRO DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.12/PMK.06/2005, tertanggal 14 Februari 2005, usaha kecil mikro¹³ diartikan sebagai usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi, dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100,000,000.00 (seratus juta rupiah) per tahun. Ciri-ciri sumber penghidupan ini adalah: (1) barang dan komoditas yang dihasilkan tidak stabil; (2) nilai usaha tidak tetap; (3) keuangan usaha dan keluarga tidak terpisah; (4) kurangnya keterampilan kewirausahaan; (5) kurangnya akses terhadap layanan keuangan resmi, tetapi terdapat akses terhadap lembaga keuangan non-perbankan; dan (5) tidak ada izin usaha resmi atau syarat hukum lainnya seperti NPWP.

Tantangan utama perempuan dalam usaha mikro antara lain kurangnya pemasaran, modal finansial, kemampuan yang kurang memadai, teknologi sederhana dan rendahnya akses terhadap aset produktif (Kementerian PPPA, 2012). Pada beberapa lokasi dalam penelitian ini, para penerima manfaat telah menjalankan usaha mikro mereka secara perorangan maupun kelompok. Hampir semua mitra terlibat dalam menyokong usaha mikro tersebut sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

¹³ Usaha kecil mikro berbeda dari usaha kecil. Usaha kecil mempunyai laba kotor setidaknya 200 juta rupiah per tahun dengan penjualan di atas 1 Miliar rupiah per tahun, mempunyai entitas hukumnya sendiri (termasuk koperasi), dan bukan merupakan cabang atau bagian dari entitas usaha lain. Usaha kecil biasanya mempunyai lokasi tetap dan menerapkan administrasi keuangan sederhana dan terpisah dari keuangan rumah tangga. Dalam hal sumber daya manusia, usaha kecil didukung oleh adanya keterampilan wirausaha para pemilik/pekerjanya dan mempunyai izin usaha serta layanan keuangan secara resmi.

Tabel 11. Ciri-Ciri Usaha mikro dan Sumber Penghidupan Perempuan

Sub-Mitra/ Kabupaten	Sumber penghidupan/ Jenis Usaha Kecil Mikro	Ciri-ciri Utama
KPI Kendal	Kerajinan Batik	Batik diproduksi oleh perempuan di Cipiring, Kendal. Perempuan terlibat dalam proses perancangan, pewarnaan, pembuatan bordir/sulam, dekorasi kain, hingga pemasaran. Batik tradisional dihasilkan melalui metode tradisional buatan tangan dan menggunakan bahan baku serta teknologi konvensional. Produksi batik merupakan usaha independen dan tidak terhubung dengan produsen lain. Hasil produknya dipasarkan secara lokal dan stok/persediaan tidak tetap. Metode penjualan secara online mulai diuji coba dalam sektor kerajinan ini.
BITRA	Pijat Tradisional	Tukang pijat dilatih dalam pelayanan kesehatan alternatif dan wirausaha. Mereka menyediakan layanan pijat panggilan bagi pelanggan dan menagih biaya untuk pelayanannya. Namun permintaan layanan tidak ada kepastiannya.
	Petani Kakao	Para penerima manfaat menanam kakao, disokong dengan pelatihan produktivitas oleh BITRA dan Dinas Penyuluhan Pertanian. Produksi masih rendah dan kualitas sulit untuk dipertahankan yang berakibat pada ketidakpastian harga.
PESADA	Petani Kopi	Teknik budidaya kopi sering kali tradisional sementara pengelolaan saat panen dan pascapanen masih belum profesional yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan kualitas produksi kopi.
KPI NTB	Pembuatan Gerabah	Pembuatan gerabah selama ini dijalankan secara konvensional oleh perempuan di desa Banyuwilek, Lombok Barat. Meski produksinya stabil, akses pasar masih terbatas dan permintaan akan produk tidak pasti. Koperasi telah didirikan.

Sub-Mitra/ Kabupaten	Sumber penghidupan/ Jenis Usaha Kecil Mikro	Ciri-ciri Utama
PEKKA NTB	Berdagang sembako, pembuatan kerupuk, persemaian, jahit- menjahit.	Modal terbatas, pasar tak umum, bahan baku terbatas, teknologi manual dan keuntungan rendah
HAPSARI	Pembuatan sabun cuci, sandal hotel, kerupuk	Produksi tidak berkelanjutan, dipasarkan secara lokal, bahan baku terbatas dan keuntungan rendah

Melalui pengamatan lokasi penelitian, dapat terlihat bahwa para penerima manfaat usaha mikro mempunyai keuntungan yang cenderung kecil, menggunakan teknologi sederhana untuk produksi dan akses pasar yang terbatas. Di samping itu, perempuan penerima manfaat umumnya tidak mempunyai rencana usaha (*business plan*) secara tertulis. Selain kelompok usaha mikro, sebagian besar penerima manfaat tidak memisahkan pengelolaan antara keuangan dalam usaha dengan keuangan keluarga.

3.6.4 PEKERJA RUMAHAN

Bentuk pekerjaan rendahan lain bagi perempuan yang kian meningkat adalah fenomena pekerja rumahan. Menurut APINDO-ILO (2013), pekerja rumahan mencakup semua pekerjaan yang dilakukan di rumahnya atau di tempat lain yang bukan tempat dari pemberi kerja, yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa untuk mendapatkan upah. Seluruh peralatan dan bahan atau input lain yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan merupakan tanggung jawab para pekerja (APINDO-ILO, 2013). Jumlah pekerja rumahan semakin meningkat karena terpecahnya proses produksi dan penggunaan *putting-out system* yang menyebabkan terpecahnya elemen-elemen proses produksi di berbagai lokasi yang berbeda. Banyak perempuan dapat mengakses pekerjaan ini karena pekerjaan dapat sepenuhnya dilakukan di rumah. Selain itu, sebagian besar tugas dari pekerja rumahan mencerminkan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga, dan hal tersebut, secara tidak langsung mencerminkan nilai-nilai adat patriarkis (Sofiani, 2010).

Dalam kajian ini, mitra MAMPU yang telah membantu para pekerja rumahan adalah BITRA dan MWPRI. Ciri-ciri sumber penghidupan para pekerja rumahan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Ciri-Ciri Pekerja Rumahan

Mitra	Ciri-ciri Pekerja Rumahan
MWPRI	<p>Pekerjaan rumahan yang paling umum dilakukan oleh keluarga yang didukung oleh MAMPU adalah pembuatan payet dan bordir, dengan upah harian Rp5,000. Meskipun upahnya rendah, para pekerja masih harus menyediakan peralatan mereka sendiri, seperti mesin jahit, alat pemidang (<i>embroidery hoops</i>), gunting dan lain-lain.</p> <p>Menurut para penerima manfaat, <i>catering</i> merupakan kelompok yang paling berhasil dan menghasilkan keuntungan terbesar di antara program-program yang didampingi oleh MWPRI. Para anggota kelompok <i>catering</i> mendapatkan Rp25,000–Rp100,000 per hari. Manfaat lain dari pekerjaan ini adalah bahan masak yang tersisa dapat digunakan oleh keluarga peserta. Selain itu, biasanya para anggota juga menyantap makanan tersebut saat mereka bekerja bersama atau mengadakan rapat.</p> <p>Jarak antara tempat tinggal dengan lokasi kerja para anggota kelompok sangat berdekatan sehingga semua pekerjaan tersebut dapat dilakukan di rumah. Kebanyakan warga yang tinggal di desa yang berdekatan dengan wilayah usaha pernah bekerja sebagai pekerja rumahan. Sebagian besar dari pekerja tersebut terdiri dari perempuan dan sebagian kecil lainnya merupakan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidak terdapat perbedaan jumlah upah pada seluruh kelompok usia maupun gender, karena pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan unit produksi/per satuan. Meskipun pekerja mendapatkan upah sangat sedikit—mulai dari Rp5,000 (payet dan bordir) sampai Rp30,000 per hari—mereka tetap melakukan pekerjaan ini karena merupakan sumber penting bagi pendapatan rumah tangga. Pekerjaan semacam ini mampu menyumbangkan 30%–100% pendapatan rumah tangga. Bahkan hasil DKT menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk desa bergantung hanya pada pekerjaan rumahan, yang menghasilkan rata-rata satu juta rupiah per bulan per rumah tangga. Pendapatan ini masih di bawah rata-rata pendapatan minimum rumah tangga yaitu Rp1,2 juta/bulan. Hal tersebut menyebabkan pekerja rumahan terhimpit dalam hutang dan harus mencari pekerjaan lain demi bertahan hidup.</p>
BITRA	<p>BITRA telah aktif bekerja memberdayakan pekerja rumahan di Deli Serdang dan Medan sejak Mei 2014. Lokasi pekerja rumahan tersebar karena pekerjaan dilakukan di rumah masing-masing pekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan termasuk memotong sandal, memotong bawang, mengemas kertas sembahyang (untuk sembahyang Cina), memotong cabai, dan menjahit pakaian bayi. Pekerjaan-pekerjaan tersebut</p>

Mitra	Ciri-ciri Pekerja Rumahan
	<p>merupakan bagian tersembunyi dari rantai pasok produksi massal.</p> <p>Sebagian besar pekerja rumahan tidak mempunyai pilihan untuk mencari pekerjaan lain. Status mereka bukan sebagai pegawai perusahaan/pemberi kerja. Para pekerja tidak mempunyai akses terhadap asuransi dan keselamatan kesehatan kerja atas risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja karena mereka bekerja di rumah. Mereka juga harus menanggung biaya listrik karena menggunakan daya listrik rumah sendiri. Para pekerja sering meminta bantuan anggota keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa bayaran tambahan. Hampir semua pekerja rumahan adalah perempuan. Sistem upah yang berlaku berdasarkan hasil yang diukur dalam unit kilo atau lusin. Pemotong sandal menghasilkan Rp6,000 per satu sak (30 lusin = 360 unit sandal) yang dapat diselesaikan dalam waktu dua-tiga hari. Untuk pemotongan cabai, pekerja mendapatkan Rp6,000 per satu sak atau 10 kg cabai. Untuk menyelesaikan satu sak, mereka memerlukan dua hari dengan bantuan anggota keluarganya: anak-anak dan/atau suami. Jika mereka tidak bekerja maka tidak akan ada pemasukan. Seperti pada daerah lainnya, mereka tidak mempunyai asuransi atas risiko kerja apa pun, termasuk atas penyakit pernapasan dan kecelakaan kerja seperti luka pada jari jemari.</p>

Sumber: Kerja Lapangan (2015)

Mitra dan Sub-Mitra lain di Sulawesi Selatan juga menangani pekerja rumahan. Di Parepare, kebanyakan pekerjaan rumahan dilakukan oleh perempuan, tanpa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ada satu gambaran dari seorang pemecah batu di Parepare dalam Kotak 1 di bawah ini.

Kotak 3: Seorang pemecah batu di Parepare

Salah satu mata pencaharian perempuan di Parepare adalah memecah batu. Perempuan bekerja memecah batu di desa Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Desa ini bertempat di dekat sungai Karajae. Mengambil batu untuk bahan bangunan menjadi sumber penghidupan di desa ini. Sebelum dipecah oleh para pekerja perempuan, batu tersebut dibawa oleh para punggawa dari sungai. Punggawa mempekerjakan perempuan untuk memecahkan batu sebelum dibawa ke toko bangunan.

Ibu Muli (40 tahun) adalah salah seorang perempuan yang telah bekerja sebagai pemecah batu selama lebih dari 10 tahun di desa ini. Setiap hari, ia membawa palu dan bantalan karet yang terbuat dari karet bekas untuk memecah batu menjadi lebih kecil agar dipakai sebagai kerikil. Dalam satu hari ia biasanya menghasilkan 5 (lima) keranjang kerikil dan mendapatkan Rp600 (0.06 USD) untuk satu keranjang kerikil. Secara total ia mendapatkan 0.25 USD per hari.

Ibu Muli bekerja sebagai pemecah batu membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh tani. Pendapatannya membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Mereka memiliki dua anak: yang paling tua menempuh pendidikan tinggi di universitas di Parepare sedangkan yang paling kecil masih duduk di bangku kelas 6 SD. Bila Ibu Muli mengalami kesulitan dalam hal keuangan, ia akan meminjam uang dari punggawa.

Bu Muli menghadapi risiko kerja seperti luka dari palu, penyakit pernafasan, wajah terkena pecahan batu dan sakit punggung.

Sumber: Kerja lapangan, Agustus 2015.

Gambar 7. Ibu Muli, Pemecah batu di Parepare

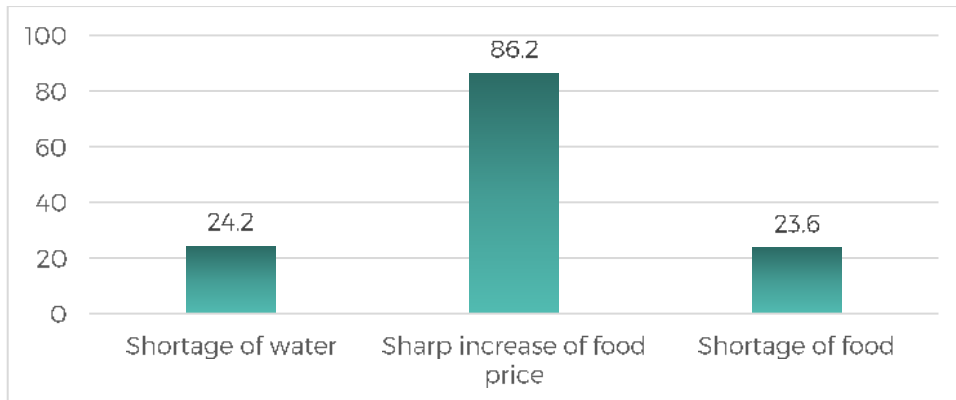


3.6.5 KERENTANAN TERHADAP SYOK, KRISIS DAN STRATEGI BERTAHAN

Syok mengacu pada keadaan tidak pasti pada tingkat individu (seperti sakit, cedera atau pengangguran), dan pada tingkat masyarakat atau di suatu daerah dapat berupa bencana alam dan efek perubahan iklim (ADB, 2015). Biasanya, syok yang terjadi di wilayah pedesaan disebabkan oleh kekurangan air dan bahan pangan, khususnya pada musim kemarau. Kenaikan harga makanan secara tajam juga dapat menyebabkan syok bagi penduduk pedesaan. Data di lapangan mengungkapkan bahwa para responden yang bekerja sebagai petani mengalami kekurangan pangan saat panen, sedangkan responden nelayan lebih sering mengalami kekurangan pangan akibat ketidakpastian cuaca di laut. Salah satu contoh yang dapat diamati adalah nelayan di Pangkep, Sulawesi Selatan, tempat di mana kekurangan pangan dapat terjadi dari bulan April hingga Desember setiap tahunnya. Selama masa tersebut, kebanyakan nelayan bergantung pada pinjaman dari punggawa dan sebagai bayarannya, mereka membantu pekerjaan punggawa. Di lokasi lain, para penerima manfaat di Sumatera Utara (DKT dengan HAPSARI dan PEKKA Tanjung Balai) mengungkapkan turunnya harga minyak sawit beberapa bulan terakhir ini. Harga minyak sawit yang turun drastis, dari yang semula

Rp1.700 per kg menjadi Rp200 per kg, menyebabkan kekurangan pangan di daerah tersebut.

Gambar 8. Syok akibat kenaikan harga makanan dan kekurangan pangan



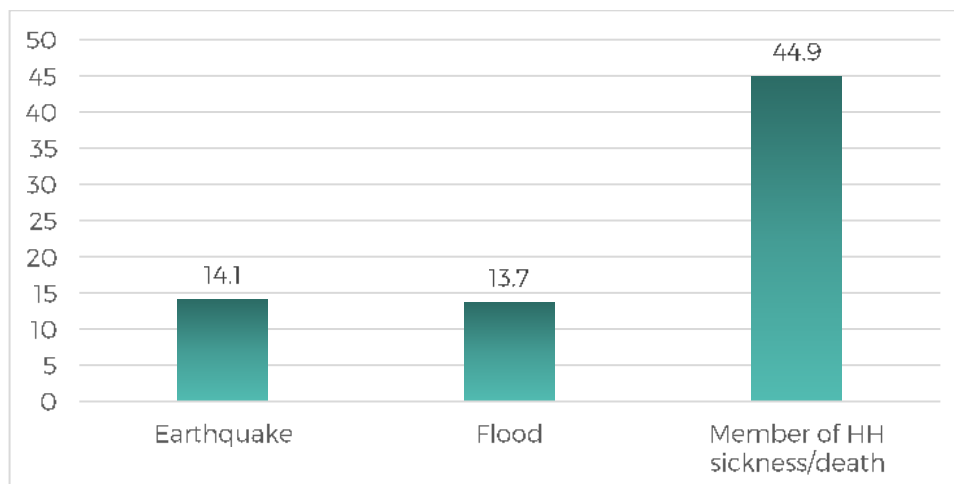
N=258

Sebagaimana terlihat pada Gambar 8, survei menemukan bahwa 86.2% responden mengalami syok dari tajamnya kenaikan harga makanan. Hampir seperempat mengalami syok akibat kekurangan air (24.2%) dan makanan (23.6%).

Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan banjir. Beberapa lokasi penelitian dalam kajian ini rentan terhadap bencana tersebut. DKT dengan para penerima manfaat BITRA dan PESADA di Sumatera Utara melaporkan bahwa abu vulkanik dari letusan Gunung Sinabung mengakibatkan gagalnya panen padi dan tanaman hortikultura. Karenanya, selama beberapa tahun setelah letusan, para penduduk mengalami kekurangan bahan pangan dan kesulitan finansial.

Gambar 9 menunjukkan bahwa ditemukan 14% responden mengalami gempa dalam 12 bulan terakhir, dan 13.7% dari mereka mengalami syok dari banjir. Sakit/wafatnya anggota keluarga merupakan syok yang umum terjadi, di mana 45% dari responden mengalami syok tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

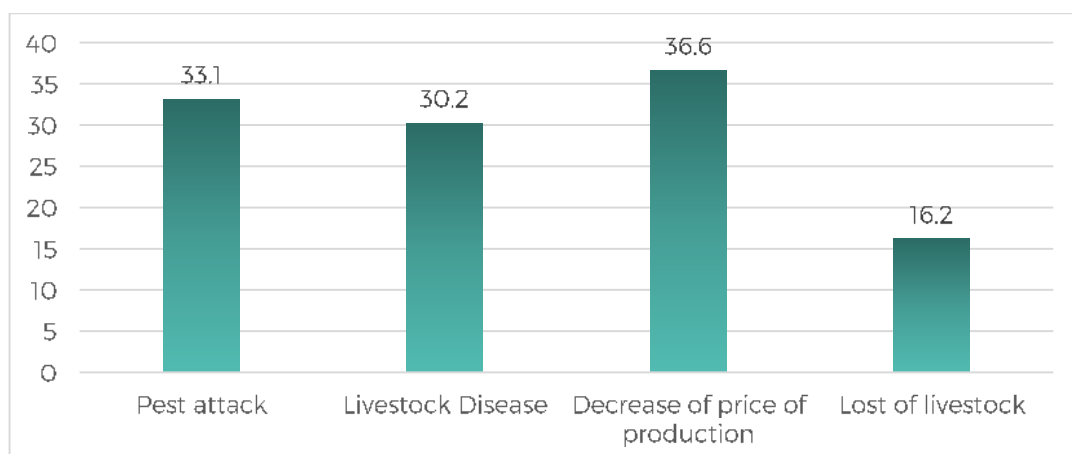
Gambar 9. Peristiwa Syok dan Bencana



N=258

Risiko lain yang terkait dengan sumber penghidupan para responden juga berhasil diteliti dalam kajian ini. Jenis syok lain tersebut antara lain serangan hama, penyakit ternak, turunnya harga produksi, dan hilangnya ternak sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10. Di lokasi sejumlah lokasi, 36.6% responden mengalami syok akibat turunnya harga produksi secara tajam, sedangkan 33.1% mengalami syok dari serangan hama. Hilangnya ternak merupakan kejadian penyebab syok yang paling jarang dialami oleh responden.

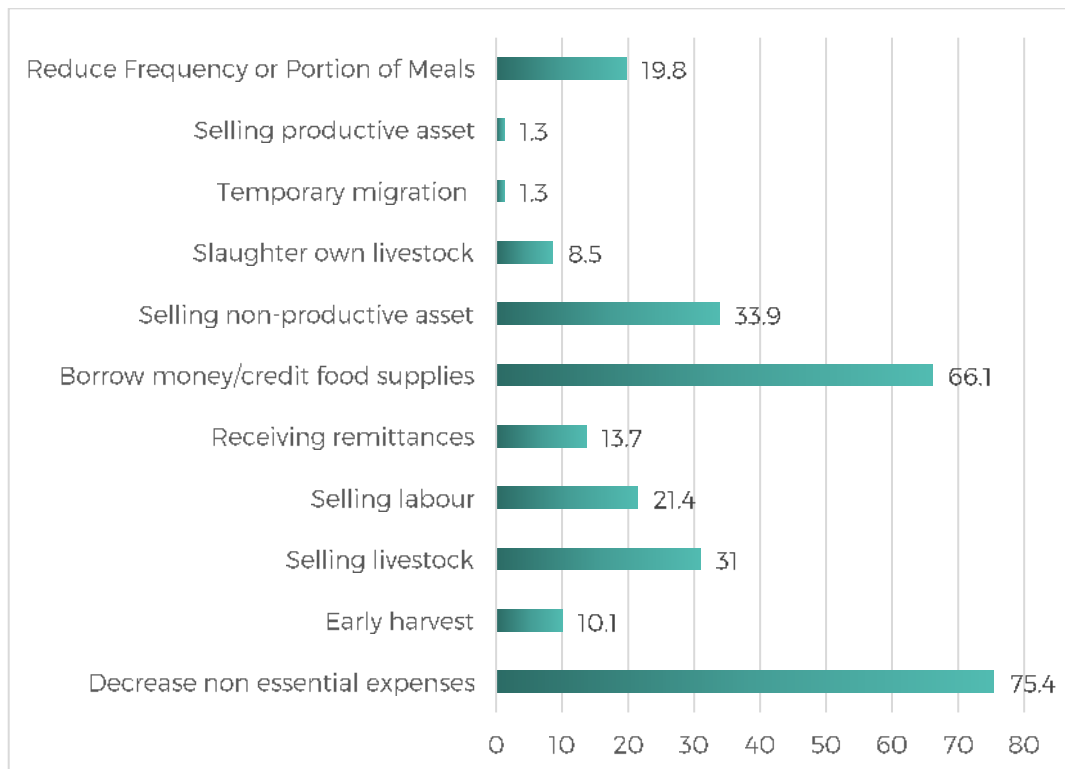
Gambar 10. Risiko yang Dihadapi Sumber Penghidupan di Pedesaan



N=258

Risiko-risiko terhadap sumber penghidupan yang tersebut dapat diperparah apabila responden tidak mempunyai jaminan untuk menanggulangi risiko tersebut. Sejumlah responden memilih cara bertahan dengan mengurangi porsi makanan, menjual aset dan bekerja sebagai buruh, sebagaimana terlihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Strategi Bertahan dalam Peristiwa atau Keadaan Sulit



N=258

Sebagaimana terlihat pada data di Gambar 11 bahwa terdapat banyak cara bertahan yang digunakan responden untuk menangani syok terkait sumber penghidupan mereka. Strategi yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan tambahan/sampingan (75,4%), diikuti oleh meminjam uang (66,1%) dan menjual ternak (31%). Di lain pihak, menjual aset produktif bukanlah cara bertahan yang umum dilakukan karena hanya 1,3 persen responden melakukan hal ini saat menghadapi syok. Hidup dalam kondisi tidak sehat serta kurang gizi dapat menjadi risiko potensial, karena 19,8% responden mengurangi porsi makan mereka sebagai strategi bertahan hidup.

4 KEGIATAN MITRA MAMPU DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

4.1. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan program, strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh Organisasi Mitra MAMPU demi menjaga pemberdayaan ekonomi para penerima manfaat atau anggota akar rumput (*grassroot member*) mereka. Sampai dengan Agustus 2015, MAMPU bekerja sama dengan 10 mitra utama (kajian ini mencakup 9 mitra) ditambah dengan sub-mitra yang bekerja sama langsung dengan mitra atau kantor cabang di 26 provinsi yang menjalankan berbagai jenis proyek. Para mitra bergerak berdasarkan bidang tema yang ditentukan sebagaimana tertera pada Lampiran 4.

Ada berbagai macam program yang menargetkan pemberdayaan perempuan mulai dari peningkatan kesadaran secara kritis, pemberian alat produksi, pendampingan akses terhadap sumber daya keuangan, pengorganisasian masyarakat, pendampingan dalam hal pemasaran, hingga advokasi kebijakan. Jenis intervensi yang berbeda-beda diterapkan oleh organisasi mitra yang berbeda sebagaimana digambarkan oleh tanggapan para responden yang terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Jenis Intervensi Pemberdayaan Ekonomi

Bentuk	Penjelasan
Pendidikan kesadaran kritis dan pendidikan kesadaran gender	Mendidik penerima manfaat tentang ketidakadilan sosial dan ekonomi dan mewujudkan potensi kesadaran perempuan akan diskriminasi gender dan perlunya kesetaraan gender
Memperkuat akses terhadap sumber daya keuangan	Para mitra terlibat dalam mobilisasi simpan pinjam, pendirian lembaga keuangan mikro
Membangun kemampuan organisasi perempuan	Memperkuat kapasitas organisasi perempuan melalui kelompok swabantu, asosiasi dan koperasi guna meraih kepentingan ekonomi dan politik mereka
Memperkuat akses pemasaran	Menghubungkan hasil produksi para penerima manfaat dengan pasar, meningkatkan strategi pemasaran para penerima manfaat

Bentuk	Penjelasan
Bantuan peralatan produktif	Pemberian peralatan dan perlengkapan produksi, seperti untuk usaha mikro atau industri rumah tangga
Memperluas kesempatan keanekaragaman sumber penghidupan melalui ternak termasuk pelatihan pengelolaan ternak	Pemberian bantuan ternak dan peningkatan kapasitas keterampilan memelihara ternak para penerima manfaat
Memperkuat kemampuan pengelolaan usaha	Pelatihan pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan (pembukuan)
Perlindungan sosial	Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial
Pelatihan vokasional	Pemberian pelatihan dan pendidikan bagi para penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan sumber penghidupan seperti industri rumah tangga, pengolahan pascapanen, dan sumber penghidupan yang ramah lingkungan yaitu pertanian organik; daur ulang
Meningkatkan keikutsertaan politik perempuan dan advokasi politik tentang lapangan kerja inklusif	Menghubungkan kepentingan perempuan dengan pembuatan kebijakan setempat di tingkat desa atau kecamatan, termasuk promosi kebijakan lapangan kerja inklusif

Pendidikan gender dan kesadaran kritis telah terintegrasi dalam semua program mitra MAMPU. Hal ini terjadi karena peningkatan akses terhadap lapangan kerja dan pendapatan bagi perempuan tidak secara otomatis meningkatkan status atau daya tawar perempuan (Masika and Joekes, 1996). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ekstra untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam ruang lingkup lainnya (kehidupan sosial, budaya, hukum, dan politik). Seluruh mitra terlibat dalam peningkatan kesadaran kritis yang kemudian diikuti juga oleh pendidikan sadar gender. Pendidikan kesadaran kritis bertujuan untuk membangun aspek-aspek kesadaran yang merupakan syarat terjadinya perubahan dalam hubungan gender. Hal ini selanjutnya akan mengembangkan kemampuan perempuan untuk mempertanyakan hubungan kekuasaan, kemampuan untuk lebih fasih dalam menuntut hak dan menggalakkan perlunya pembuatan keputusan yang inklusif di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Peningkatan kesadaran dipandang para mitra sebagai suatu intervensi strategis melawan subordinasi terhadap perempuan dan struktur ekonomi sosial yang didominasi laki-laki. Adanya peningkatan kesadaran pada kaum perempuan akan turut meningkatkan pemberdayaan diri (*self-empowerment*) mereka, di mana hal tersebut akan mengarah pada kemampuan dalam mengevaluasi kembali subordinasi

kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan juga mengidentifikasi tindakan potensial, yang seringkali dilakukan bersama-sama.

Strategi penting lainnya adalah melibatkan para mitra dalam mengorganisir perempuan di tingkat akar rumput melalui kelompok swabantu (*self help group* - SHG), koperasi, *credit union* dan kelompok perempuan. Strategi tersebut memfasilitasi proses belajar melalui pertemuan kelompok, kegiatan simpan pinjam, diskusi mengenai kegiatan produktif dan isu sosio-ekonomi lainnya secara rutin. Kelompok swabantu juga mampu menyatukan suara perempuan dalam proses pembuatan keputusan di tingkat desa atau masyarakat, meskipun masih banyak juga yang belum terakomodasi secara sistematis.

Aksi kolektif diselenggarakan guna mencapai keterwakilan yang lebih baik terhadap kepentingan ekonomi perempuan dalam proses pembuatan keputusan di daerah setempat. Oleh sebab itu, lembaga perempuan menjadi strategi prioritas dalam mengorganisasi perempuan. Para mitra mendorong keikutsertaan perempuan dalam musrenbangdes serta kebijakan pemerintah lokal melalui pendidikan politik dan advokasi. Aksi kolektif kelompok akar rumput juga dilakukan dengan pergerakan simpan pinjam masyarakat melalui *credit union*, lembaga keuangan mikro dan kredit mikro bagi kelompok usaha mikro.

Upaya lebih lanjut dalam menangani isu ini mengutamakan peningkatan kesempatan diversifikasi mata pencaharian, seperti pemeliharaan ternak, kerajinan tangan, dan bantuan alat-alat produksi. Tabel di bawah ini merangkum upaya-upaya yang dilakukan oleh Mitra dan Sub-Mitra MAMPU.

Tabel 14. Rangkuman Strategi Pemberdayaan Ekonomi oleh Mitra/Sub-Mitra

No.	Mitra Utama MAMPU	Sub-Mitra /Catatan	Strategi Pemberdayaan Ekonomi
1.	PEKKA	PEKKA Sumatera Utara, Tanjung Balai PEKKA NTB	Lembaga keuangan mikro, memperkuat kelompok swabantu dan koperasi, pendidikan kesadaran kritis dan pelatihan vokasional, diversifikasi sumber penghidupan
2.	Aisyiyah	Aisyiyah Sidoarjo Aisyiyah Ngawi	Lembaga keuangan mikro, pelatihan vokasional, meningkatkan akses pasar, pengembangan koperasi, pelatihan wirausaha

No.	Mitra Utama MAMPU	Sub-Mitra /Catatan	Strategi Pemberdayaan Ekonomi
3.	Koalisi Perempuan Indonesia	KPI Kendal, Jawa Tengah KPI Lombok Barat, NTB	Kegiatan simpan pinjam, diversifikasi sumber penghidupan, daur ulang untuk sumber penghidupan yang ramah lingkungan
4.	KAPAL Perempuan	YPKM KP2SK	Peningkatan kesadaran kritis, mendorong mobilisasi simpan pinjam, pengembangan hubungan dengan pemerintah dan skema lain Diversifikasi pertanian, pelatihan vokasional dan kredit mikro, peningkatan kesadaran kritis
5.	ILO Mampu	BITRA Indonesia MWPRI	Serikat kredit, penyuluhan dan diversifikasi pertanian, memperkuat asosiasi/serikat tenaga kesehatan, petani dan pekerja rumahan, advokasi politik Pemberdayaan pekerja rumahan
6.	Migrant Care	SARI	Pemberdayaan pekerja migran, peningkatan kesadaran, diversifikasi sumber penghidupan bagi mantan pekerja rumahan, advokasi bagi perlindungan tenaga kerja migran

No.	Mitra Utama MAMPU	Sub-Mitra /Catatan	Strategi Pemberdayaan Ekonomi
		INDIPT	Pemberdayaan pekerja migran, diversifikasi sumber penghidupan bagi mantan pekerja rumahan
7.	Permampu	PESADA	Serikat kredit, penyuluhan dan diversifikasi pertanian, kredit mikro (termasuk di wilayah perkotaan Medan), peningkatan kesadaran kritis, pemberdayaan kelompok swabantu, pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan
8.	BaKTI	MAUPE, Maros	Pendidikan politik bagi perempuan, diversifikasi sumber penghidupan
		LP2EM Pare-Pare	Advokasi politik tentang lapangan kerja, kredit mikro, pemberdayaan kelompok swabantu
		Yayasan Kombongan Situru	Serikat kredit, penyuluhan dan diversifikasi pertanian, kredit mikro, peningkatan kesadaran kritis, pemberdayaan kelompok swabantu, advokasi kebijakan yang melibatkan perempuan, kebijakan setempat tentang lapangan kerja
9.	Komnas Perempuan	HAPSARI	Penguatan organisasi perempuan, peningkatan kesadaran kritis, diversifikasi sumber

No.	Mitra Utama MAMPU	Sub-Mitra /Catatan	Strategi Pemberdayaan Ekonomi
			penghidupan, mendorong pengembangan asosiasi simpan pinjam
		SPEKHAM Solo	Penyuluhan dan diversifikasi pertanian, pemberdayaan ekonomi di wilayah perkotaan, berkebun di rumah, pelatihan keterampilan vokasional, pengembangan wirausaha

Bagian berikut ini menyajikan rincian strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Mitra dan Sub-Mitra MAMPU.

4.2. PEKKA (PEREMPUAN KEPALA KELUARGA)

Program PEKKA, bekerja sama dengan MAMPU, memusatkan perhatian pada tema pertama, yaitu: Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Program Perlindungan Sosial Pemerintah. Namun, sejak pertama didirikan, PEKKA memang telah mengutamakan pemberdayaan sumber penghidupan perempuan dalam program-programnya. Intervensinya diawali dengan pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan simpan pinjam yang kemudian berkembang menjadi gerakan koperasi. Dalam proses tersebut, pembentukan dan penggiatan Kelompok Swabantu (SHG) memainkan peranan penting dalam mempromosikan pemberdayaan. Saat kelompok-kelompok tersebut aktif dan berfungsi secara efektif, sumber daya yang ada akan disalurkan kepada mereka.

Tabel di bawah ini menunjukkan strategi PEKKA saat ini, termasuk proyeknya bersama MAMPU.

Tabel 15. Strategi Pemberdayaan PEKKA

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pendidikan kader hukum dan paralegal di antara para perempuan kepala keluarga serta pendidikan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan proses organisasi perempuan kepala keluarga, profil dan pembelajaran yang diperoleh di lapangan, dalam bentuk buku, video, film dan foto • Pendidikan mengenai hak dan kewajiban politik untuk membangun kesadaran kritis dan mengembangkan kepemimpinan para kader dalam rangka memampukan mereka berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat yang lebih luas • Meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan sosial • Pelatihan baca, tulis, hitung • Pertemuan masyarakat secara rutin yang digunakan sebagai proses pembelajaran • Mengorganisir fasilitas pendidikan anak usia dini • Pelatihan pengelolaan kelompok • Pelatihan pembukuan • Pelatihan pertanian • Peningkatan kapasitas kader dalam media masyarakat: radio, teknik video dan foto, dan jurnalisme masyarakat
<p>Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat akses terhadap sumber keuangan melalui lembaga keuangan mikro (LKM); skema simpan pinjam • Memperkuat Kelompok Swabantu (SHG), serikat dan koperasi bagi perempuan kepala keluarga • Pendidikan tentang kesadaran kritis, baca tulis hitung, kepemimpinan dan

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi
	<p>keterampilan hidup sebagai pendidikan sumber penghidupan bagi perempuan kepala keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterlibatan perempuan kepala keluarga dalam pengelolaan sumber daya di tingkat akar rumput, termasuk perlindungan sosial • Pengembangan usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga • Kemandirian kelompok masyarakat dengan mempromosikan permakultur (sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam) dan pertanian terpadu guna memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
<p>Aset Kelembagaan (Kekuatan untuk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengorganisir forum mengenai perlindungan sosial bagi banyak pemangku kepentingan • Pendekatan terkait perlindungan sosial terhadap sejumlah partai • Memfasilitasi kunjungan lapangan para pembuat keputusan ke kelompok masyarakat • Memperkuat peran federasi PEKKA • Melatih keterampilan politik para pemimpin PEKKA
<p>Aset Sosial (Kekuatan dengan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pendirian kelompok serta fungsi perempuan kepala keluarga yang terpinggirkan • Memperkuat tata kelola kelompok • Memperbesar keanggotaan kelompok

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan antar kelompok • Membina jaringan dan ikatan kerja sama untuk advokasi kebijakan • Mengembangkan hubungan antara kelompok dan pembuat kebijakan • Memperkuat posisi tawar Federasi PEKKA di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat perlindungan sosial masyarakat dalam berbagai bidang seperti asuransi kesehatan, asuransi kematian, arisan, simpanan beras, bank beras, posyandu • Mengembangkan pusat data dan informasi berbasis masyarakat di tingkat desa • Memonitor kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan yang terpinggirkan • Mengembangkan pusat data dan informasi mengenai perlindungan dan rakyat miskin

Data lapangan pada laporan ini mencakup dua unit daerah PEKKA: Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara. PEKKA telah bekerja di NTB selama lebih dari lima tahun dan telah menjangkau lima kabupaten. Kegiatan di Sumatera Utara dimulai sekitar dua tahun yang lalu dan para anggota bertempat tinggal di dua kabupaten saja, yaitu: Asahan dan Tanjung Balai, dan keduanya adalah wilayah pesisir.

Terkait dengan efektivitasnya, pinjaman dalam skala kecil berhasil memenuhi keperluan perempuan. Akan tetapi, skala pada usaha kecil umumnya berada pada tingkat mikro. Di Sumatera Utara, pembayaran pinjaman sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi, seperti menurunnya jumlah tangkapan di bidang perikanan atau anjloknya harga minyak sawit.

4.3. AISIYIAH

Aisyiyah didirikan pada tahun 1917 dan merupakan bagian dari Muhammadiyah—sebuah organisasi keagamaan. Aisyiyah berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan dan advokasi kebijakan publik yang memihak rakyat miskin atau pro-kemiskinan. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, organisasi tersebut menjalankan berbagai program bagi perempuan dan pengembangan ekonomi rumah tangga serta kewirausahaan.

Kerja sama Aisyiyah dengan program MAMPU adalah dalam bidang peningkatan kepemimpinan perempuan dan kesehatan reproduksi (pemberian ASI, KB, pencegahan kanker rahim, dan jaminan kesehatan nasional), yang terorganisir pada tingkat masyarakat dalam kelompok yang disebut Bina Sakinah Aisyiyah (BSA). Namun, di luar Program MAMPU, Aisyiyah secara historis telah terlibat dalam pemberdayaan ekonomi. Jangkauan program Aisyiyah termasuk sebagai berikut:

Pemberdayaan ekonomi anggota Aisyiyah melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) termasuk:

- Program keuangan mikro
- Pengembangan Koperasi
- Pelatihan kewirausahaan
- Pengembangan industri rumah tangga, misalnya: memfasilitasi pemilik usaha untuk memperoleh izin usaha

Kajian ini memetakan para penerima manfaat program Aisyiyah yang menerima bantuan dari program MAMPU (Aisyiyah Cabang Daerah, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur) dan mereka yang tidak menerima bantuan dari program MAMPU (Aisyiyah Cabang Daerah, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur). Dalam kerja samanya dengan MAMPU, kegiatan ekonomi merupakan titik masuk yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan para penerima manfaat. Program ekonomi rutin di Sidoarjo telah berkembang pesat berkat koperasi yang didukung oleh Aisyiyah melalui Koperasi As Sakinah.

Mata pencaharian utama dari kebanyakan penerima manfaat program MAMPU adalah buruh tani. Sebagian besar perempuan yang mempunyai anak kecil tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dan secara penuh terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Kegiatan sebagai buruh maupun pekerja industri rumah tangga dimulai saat anak-anak memasuki usia sekolah.

Tabel 16. Pendekatan Aisyiyah

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi Aisyiyah
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan akses layanan kesehatan seperti pap smear—dan pemeriksaan terkait kesehatan reproduksi lainnya, KB, dan HIV/AIDS, juga meningkat

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi Aisyiyah
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan sumber penghidupan seperti pembuatan makanan kecil, pengelolaan usaha (<i>business management</i>) • Peningkatan kapasitas badan usaha dan perizinan industri rumah tangga (PIRT) • Pelatihan kepemimpinan dan keterampilan bernegosiasi
<p>Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kredit mikro dan simpan pinjam • Toko (yang dikelola oleh Koperasi As Sakinah) memberikan manfaat bagi para anggota dengan menyediakan tempat bagi para anggota untuk menjual produk-produk mereka di kantinnya
<p>Aset Lembaga (Kekuatan untuk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi yang dijalankan oleh Aisyiyah melalui MAMPU menuntut tersedianya akses terhadap perlindungan sosial yang lebih baik • Meningkatkan kapasitas kelompok perempuan untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan di ruang lingkup masyarakat. Kebanyakan anggota dari kedua program merasa bahwa mereka mulai dapat ikut serta dalam kegiatan masyarakat, meskipun bukan sebagai pembuat keputusan • Para penerima manfaat telah menjadi anggota koperasi, di mana hal tersebut juga merupakan cara bagi perempuan untuk mengakses pasar
<p>Aset Sosial (Kekuatan dengan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jaringan dengan anggota di luar desa dan kecamatan • Memfasilitasi pertemuan antar berbagai kelompok guna memperkuat jaringan kerja horisontal • Secara khusus, para penerima manfaat program rutin merasakan keamanan dengan mempunyai kelompok sebagai penjamin, meskipun pinjaman dari koperasi merupakan pinjaman dana atas nama pribadi. Koperasi mengharuskan kelompok agar menjamin pinjaman dana rutin. Sistem

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi Aisiyah
	<p>ini memperkuat ikatan kelompok dan kekuatan ini dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti pemasaran kolektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatan erat antara koperasi yang terhubung dengan Aisiyah juga memungkinkan koperasi untuk saling pinjam serta belajar dari satu sama lain
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses terhadap layanan dan perlindungan sosial • Akses koperasi terhadap skema pemerintah • Berbagai program pemerintah seperti PNPM Simpan Pinjam dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menawarkan bantuan dana yang dapat diakses oleh para penerima manfaat

Studi mengamati bahwa sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh para perempuan setempat belum dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan ekonomi produktif tidak menjadi prioritas keluarga akibat adanya tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. Akses terhadap layanan keuangan bagi penerima manfaat MAMPU sangat rendah, artinya hanya terdapat sedikit kesempatan untuk mendayagunakan usaha kecil mereka. Akumulasi tabungan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pinjaman para anggota. Selain itu, sangat sedikit rumah tangga yang dapat mengakses program pemerintah. Kebanyakan penerima manfaat tidak memiliki akses terhadap aset tanah atau ternak, sehingga mereka sangat bergantung pada modal manusia. Mereka juga memiliki sedikit peralatan produksi yang menyulitkan proses pengendalian kualitas produk makanan yang mereka hasilkan. Para penerima manfaat mempunyai berbagai macam keperluan karena jenis usaha yang beragam, dan mereka memerlukan pendekatan yang berbeda serta bantuan yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing usaha. Meskipun koperasi mempunyai toko dan kantin, saat libur sekolah dan kampus, kantin-kantin di sekolah dan kampus harus tutup.

Dalam hal lembaga, keikutsertaan perempuan dalam pembuatan keputusan di rumah dan masyarakat cukup rendah. Perempuan membuat keputusan tentang pengeluaran dalam usaha yang mereka jalankan, dan juga membuat keputusan tentang bagaimana keuntungan usaha tersebut dibelanjakan. Akan tetapi, pengeluaran rumah tangga rutin dan pembelian barang berharga ditentukan oleh pihak laki-laki atau suami, meskipun perempuan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan rumah tangga. Sama halnya dengan hal keputusan pembangunan desa yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Fokus dari kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan ekonomi yang terkait dengan peran perempuan dalam rumah tangga. Masyarakat pada umumnya, termasuk perempuan, masih meyakini bahwa perempuan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, bersih-bersih, mencuci, dan seterusnya. Oleh karena itu, saat perempuan juga menjalankan kegiatan ekonomi, beban kerja mereka meningkat. Pendapatan perempuan masih dianggap

sebagai 'pendapatan tambahan'. meskipun perempuan menghasilkan lebih banyak dari suami mereka. Pihak pemerintah desa juga tidak mengutamakan kesehatan reproduksi perempuan, akibatnya masih terdapat banyak masalah terkait kesehatan reproduksi perempuan yang terjadi.

4.4. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi didirikan pada bulan Mei 1998. Tujuan KPI adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab.

Sebagai organisasi keanggotaan, KPI bergerak di berbagai tingkatan. Organisasi ini memiliki Balai Perempuan yang berbasis akar rumput di mana biasanya mereka bergerak di tingkat desa, dan terkadang juga di ruang lingkup tempat kerja. Kelompok Balai Perempuan tersebut kemudian membentuk KPI di tingkat daerah atau Pengurus Cabang. Sekumpulan cabang daerah membentuk cabang provinsi. KPI memiliki visi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender demi masyarakat yang beradab, demokratis, dan sejahtera. Misi organisasi ini adalah menjadi agen perubahan demi membela hak-hak perempuan dan kelompok marginal. Organisasi ini berperan dalam mengkaji perubahan kebijakan dan pemberdayaan hak politik perempuan.

Amanat utama KPI adalah untuk meningkatkan kepemimpinan dan kebijakan publik bagi perempuan, seperti penganggaran pro-rakyat miskin, advokasi untuk memberantas perdagangan dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, organisasi ini juga meningkatkan kondisi ekonomi perempuan melalui pemberdayaan sumber kehidupan seperti pertanian organik, peningkatan produksi tekstil, *home gardening*, pemberdayaan nelayan perempuan dan pemberdayaan ekonomi warga miskin kota. Pemberdayaan sumber kehidupan juga diperkuat dengan adanya pengembangan koperasi seperti Koperasi Gerabah di NTB.

Kajian lapangan berikut ini dilaksanakan di Kendal, Jawa Tengah dan Lombok Barat, NTB. Tabel di bawah ini merangkum strategi yang dijalankan oleh KPI (baik melalui pengelolaan MAMPU maupun non-MAMPU).

Tabel 17. Strategi Program KPI

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan tentang perlindungan sosial • Pengembangan pengetahuan tentang kesadaran kritis dan kepemimpinan perempuan melalui media dan pendidikan langsung • Pelatihan tentang gender dan hak-hak perempuan • Pelatihan tentang keterampilan advokasi

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan keterampilan dalam komunikasi dan negosiasi • Pelatihan tentang daur ulang
<p>Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi simpan pinjam • Menyalurkan sumber daya dari Kementerian Koperasi untuk membantu koperasi akar rumput contoh: Koperasi Gerabah Banyumulek • Keterampilan daur ulang bernilai ekonomis
<p>Aset Lembaga (Kekuatan untuk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kapasitas dalam hal perubahan kebijakan bagi kelompok perempuan • Memfasilitasi kepemimpinan perempuan • Meningkatkan keikutsertaan dan kendali perempuan miskin dalam pengentasan kemiskinan • Mendorong kelompok perempuan untuk membela hak-hak mereka dan melibatkan mereka dalam proses perubahan kebijakan
<p>Aset Sosial (Kekuatan dengan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan kelompok perempuan di tingkat desa, kabupaten dan provinsi • Pengembangan jaringan kerja • Kerja sama dengan pemerintah setempat di tingkat daerah • Mengembangkan jaringan pemasaran
<p>Aset Pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kampanye dan tekanan demi terwujudnya perlindungan sosial, serta layanan masyarakat dan sosial yang lebih baik

Kajian ini melibatkan kerja lapangan di Jawa Tengah (Kabupaten Kendal) dan Nusa Tenggara Barat. Bagian di bawah ini menyoroti strategi-strategi kunci dalam intervensi yang dilakukan.

KPI Kendal

KPI Kendal, berawal pada tahun 2011, terbentuk oleh Balai Perempuan kelompok nelayan, kelompok petani dan anggota profesi. Kegiatan terkait sumber penghidupan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Daur ulang dan pemanfaatan ulang sampah
Upaya ini bertujuan memanfaatkan sampah dengan mendaur ulang kertas dan plastik guna menghasilkan cinderamata dan aksesoris yang terbuat dari bahan sampah yang terpilih dan masih berguna. Upaya ini juga menghasilkan pupuk organik yang memiliki potensi di pasar lokal.
- Pelatihan dan Produksi Batik Cipiring
Karena produksi batik adalah sumber penghidupan umum di Jawa Tengah, KPI melatih perempuan membatik dan menghubungkan mereka dengan universitas untuk membantu pemasaran secara daring.
- Simpan pinjam telah diperkenalkan tetapi belum berjalan secara efektif.

Gambar 12. Kerajinan Batik di Kendal



Satu hal lain yang lebih penting adalah pertemuan kelompok perempuan telah menjadi forum pembelajaran di mana para anggota dapat berbagi keterampilan dan masalah seputar sumber penghidupan. Para penerima manfaat telah turut serta dalam berbagai bidang pelatihan sebagaimana dapat dilihat pada DKT di Kendal di bawah ini.

"KPI telah menawarkan berbagai macam pelatihan bagi kami. Termasuk pendidikan kader tingkat dasar, yang memberi kami motivasi dan pelatihan tentang manfaat organisasi akar rumput. Pelatihan lainnya meliputi kerajinan batik, pembuatan aksesoris, menganyam, pengolahan makanan, pengolahan pascapanen, dan administrasi keuangan".

(DKT dengan KPI, Kendal, September 2015).

KPI Lombok Barat

Kajian ini melibatkan KPI Banyuwilek yang merupakan pusat produksi gerabah di Provinsi NTB. KPI terlibat dalam memfasilitasi adanya koperasi bagi perempuan penghasil gerabah, mengembangkan hubungan pasar mereka dan melatih para anggota tentang pengelolaan keuangan.

4.5. KAPAL PEREMPUAN

Institut KAPAL Perempuan didirikan pada 8 Maret 2000, dimaksudkan untuk membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik dan privat. Organisasi ini didirikan oleh para aktivis perempuan yang peduli terhadap situasi konflik, kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan serta praktik diskriminasi terhadap perempuan yang masih kerap terjadi.

Visi KAPAL Perempuan adalah untuk menciptakan masyarakat sipil, melalui gerakan perempuan, untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang mempunyai daya pikir kritis dan kesadaran dalam keadilan gender, pluralis, transparan, dan berkomitmen dalam melawan kekerasan. Misi mereka adalah:

1. Mengembangkan pendidikan kritis feminis dengan berbagai isu strategis yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya aktivis gerakan perempuan dan sosial serta pemimpin-pemimpin perempuan marginal.
2. Memperkuat advokasi berbasis bukti yang berperspektif keadilan gender dan pluralisme untuk berbagai kebijakan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui penelitian, dokumentasi dan publikasi yang berkaitan dengan isu gender dan pluralisme.
4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang sesuai dengan visi misi serta resolusi-resolusi institut KAPAL Perempuan.

Pada tahun 2003, pembangunan ekonomi diintegrasikan ke dalam pendidikan kritis. Langkah ini dilakukan melalui pengenalan *credit union*, termasuk kepada kelompok warga miskin di perkotaan. Akan tetapi, karena warga di kelompok tersebut tidak memiliki pendapatan rutin, upaya pembangunan ekonomi dalam pendidikan kritis ini tidak berhasil. Hal tersebut menimbulkan masalah lain dalam hal pinjaman dana dan berpotensi merusak kepemimpinan perempuan.

Dalam peristiwa bencana, di mana KAPAL Perempuan terlibat dalam upaya pemulihan/tanggap bencana, keterampilan sumber penghidupan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam program pelatihan. Upaya yang dilakukan oleh KAPAL Perempuan sebagian besarnya terjalin dalam hubungan dengan program pembangunan atau program pemerintah sehingga anggota masyarakat dapat mengakses hak mereka atas sumber daya.

Kegiatan yang dijalankan oleh KAPAL Perempuan terangkum dalam tabel di bawah ini. Kajian berikut ini diberikan berdasarkan kegiatan KAPAL Perempuan dengan Proyek

MAMPU dan organisasi non-MAMPU, dan juga tingkat sub-mitra dengan YKPMS dan KP2SK.

Tabel 18. Strategi Pemberdayaan KAPAL Perempuan

Aspek Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi KAPAL Perempuan
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan termasuk bertutur cerita, warta masyarakat • Pendidikan publik
Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan langsung pemberdayaan sumber kehidupan perempuan • Mobilisasi simpan pinjam anggota • Menghubungkan dengan skema pembangunan lainnya
Aset Lembaga (Kekuatan untuk)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan • Jurnalisme masyarakat perempuan • Memadukan pendidikan gender dan pendidikan lingkungan hidup melalui sekolah perempuan
Aset Sosial (Kekuatan dengan)	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat SHG • Membentuk dan menggiatkan kembali kelompok perempuan • Menjaga jaringan kerja mitra LSM • Menjaga jaringan kerja SHG
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi perlindungan sosial • Akta lahir • Rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan

4.5.1 YPKM (YAYASAN PENGKAJIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN)

YPKM (Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan) didirikan pada tanggal 20 Juli 1989 dengan tujuan membantu rakyat miskin dan terpinggirkan serta memfasilitasi keikutsertaan mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

YPKM memusatkan perhatiannya untuk membantu masyarakat pesisir dan kaum miskin kota. Program-program yang dijalankan antara lain termasuk pemberian kredit mikro bagi perempuan, khususnya pedagang pasar di Sulawesi Barat. Perempuan yang terlibat di pasar menjadi sasaran karena ketergantungan mereka pada lintah darat

(pemberi pinjaman uang) yang menuntut bunga sangat tinggi. Selain itu, program lain yang digalakkan berpusat pada advokasi dan pendidikan bagi masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Para nelayan terjebak dalam kemiskinan dan mereka bergantung pada bantuan dan pinjaman dari punggawa.

Untuk Program MAMPU di Pangkep, YPKM mendampingi 15 kelompok yang tersebar di 10 pulau yang termasuk dalam wilayah desa Mattiro Baji, Mattiro Bombang, dan Mattiro Kanja. Masing-masing kelompok mempunyai 20–25 anggota. YPKMS menggalakkan kegiatan simpan pinjam kelompok untuk memenuhi kebutuhan akan modal finansial. Hal ini penting untuk dilakukan karena di wilayah pesisir ini tidak terdapat layanan keuangan resmi bagi perempuan. Meskipun demikian, hanya empat kelompok yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam, dan tidak banyak dana yang tersedia dalam perputaran pinjamannya karena layanan tersebut masih tergolong baru.

Sekolah perempuan berfokus pada pengembangan kapasitas perempuan di desa. Partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan di tingkat desa mulai terlihat dari keikutsertaan perempuan dalam musrenbangdes.

Kegiatan-kegiatan lain yang terdapat di sekolah perempuan adalah diskusi dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tiga desa. Pelatihan keterampilan jurnalisme warga (*community journalism*) juga dilakukan bagi perempuan di wilayah ini, yang kemudian hasilnya diterbitkan oleh YKPM secara berkala.

4.5.2 KPS2K

KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) didirikan pada tahun 2004 oleh empat aktivis perempuan dengan latar belakang lingkungan hidup. Rendahnya kesadaran gender dalam organisasi-organisasi lingkungan hidup dan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan alasan utama didirikannya organisasi ini. Visi organisasi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan berdaulat atas sumber daya berkelanjutan. Strategi kunci mereka adalah mengorganisir kelompok marginal dalam melakukan advokasi untuk pendidikan yang lebih baik; memperkuat organisasi akar rumput, terutama pada kelompok perempuan, melalui pendidikan yang kritis dan analitis; membangun aliansi untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan kesehatan reproduksi; dan jaringan dan akses terhadap informasi untuk perempuan miskin.

KPS2K sebelumnya mengusung program intervensi sumber penghidupan yang didukung oleh berbagai donor. Sebagai contoh, pada tahun 2011 mereka mengadakan program pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan ternak kambing Ettawa untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Upaya tersebut kurang berhasil karena organisasi tidak mempertimbangkan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola kambing jenis tersebut sebagai hewan ternak. Kambing Ettawa membutuhkan perawatan yang intensif, sedangkan masyarakat terbiasa beternak dengan jenis kambing yang tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus. Akibatnya, lebih dari 80 persen kambing tersebut dijual atau mati. Upaya lain yang dilakukan oleh KPS2K adalah mengorganisir kelompok perempuan simpan pinjam. Di daerah-daerah termiskin, pendekatan ini kurang memberikan dampak karena kesanggupan finansial kelompok sangat terbatas. Mereka tidak mampu membayar pinjaman dan mengundurkan diri dari

keanggotaan kelompok. Di daerah lain dengan kemampuan finansial lebih baik, simpan pinjam cukup efektif mengorganisir kelompok dalam pertemuan rutin untuk membayar pinjaman dan menyimpan uang, disertai dengan pendidikan kritis tentang berbagai isu oleh KPS2K.

Di bawah Program MAMPU, KPS2K mengembangkan program Gender Watch, yang mengorganisir "sekolah perempuan" bagi 19 kelompok di tingkat dusun dan 4 kelompok di tingkat desa. Saat ini, 616 perempuan telah menerima pelajaran tentang isu yang berkaitan dengan kepemimpinan, kesehatan reproduksi dan gender, program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pembuatan keputusan desa dan seterusnya. Kebanyakan anggota kelompok bekerja sebagai buruh tani, pekerja rumahan, petani kecil, pengusaha kecil dan ibu rumah tangga.

Dalam hal pengembangan ekonomi, kelompok perempuan dari desa Kesamben Kulon, Kabupaten Gresik berbagi tentang tantangan yang mereka hadapi, termasuk:

- Beban ganda dan kurangnya waktu (mengasuh anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bekerja untuk pendapatan keluarga dan mengikuti kegiatan sosial atau kemasyarakatan). Sebagian besar peserta harus memiliki lebih dari satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Misalnya, bekerja sebagai buruh tani atau pembantu; beternak sapi dan menjalankan warung atau kedai kecil.
- Kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan. Para perempuan mampu meminjam uang dalam jumlah sedikit dari kelompok simpan pinjam dengan suku bunga rendah. Namun, saat mereka membutuhkan modal yang lebih besar, mereka tidak memiliki banyak pilihan, khususnya dari lembaga keuangan resmi seperti bank atau program pemerintah.
- Persaingan pasar. Perempuan pada kelompok termiskin cenderung sulit mengembangkan usahanya, karena rendahnya pengetahuan serta jaringan yang mereka miliki. Kemampuan dalam manajemen sederhana seperti perencanaan dan pencatatan penjualan bukan hal biasa bagi kelompok tersebut. Selain itu, faktor makro seperti naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), regulasi yang menguntungkan pedagang besar, dan lain-lain dapat mengakibatkan usaha yang mereka miliki menjadi tidak berkelanjutan.
- Syok yang diakibatkan oleh gangguan alam (*natural shocks*) seperti hama tumbuhan dan gagal panen dihadapi oleh para petani kecil
- Terbatasnya bahan baku dan kurangnya rencana usaha/*business plan* (kelompok perempuan yang membuat keripik dari singkong dan bayam)

Di samping itu, saat diadakan DKT di Gresik (8 September, 2015), para penerima manfaat berbagi pengalaman mereka tentang norma sosial yang menjadi beban tambahan bagi perempuan:

"Kami punya banyak sekali macam-macam acara sosial di mana perempuan biasanya paling bertanggung jawab dalam menyumbangkan uang atau hadiah seperti saat pernikahan, lahiran, kematian dan sakit. Ada acara yang disebut "Sedekah Bumi" yang biasanya diadakan setelah panen (bulan Agustus hingga September) dan kami harus berbagi makanan dengan keluarga dan tetangga. Begitu pula saat Ramadhan dan

setelah Idul Fitri saat kami mengadakan "syukuran". Budaya ini tidak bisa dihindari jadi kadang kami harus meminjam uang untuk mengadakan acara-acara seperti itu".

Kesenjangan upah di sektor pertanian juga terjadi: perempuan dibayar Rp25,000 sementara laki-laki menerima Rp35,000 untuk memanen sawah. Laki-laki biasanya menerima uang tambahan untuk membeli rokok. Perempuan yang mencoba bernegosiasi untuk kenaikan upahnya akan diabaikan atau dipecat untuk pekerjaan berikutnya. Budaya patriarkis yang didasari praktik nilai agama memengaruhi sistem waris dan hak istimewa bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Meskipun mereka dapat menerima perempuan sebagai pemimpin, masih terdapat prasangka buruk terhadap perempuan kepala rumah tangga atau perempuan yang sering pergi keluar rumah, di mana perilaku demikian dianggap tidak pantas oleh masyarakat setempat.

4.6. ILO MAMPU (BITRA DAN MWPRI)

Proyek ILO - MAMPU mempromosikan kesetaraan partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan. Proyek ini dirancang untuk memperkuat pemberdayaan sosial dan ekonomi para pekerja perempuan sasaran melalui strategi yang memperkuat akses dan keterlibatan perempuan secara setara dalam lapangan kerja formal dan pekerjaan layak di Indonesia. Proyek ini bermitrakan berbagai lembaga dan organisasi di Indonesia untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan utama guna mempromosikan tujuan proyek ini - meningkatkan akses perempuan miskin, rentan dan terpinggirkan terhadap pekerjaan produktif dan mempromosikan kesetaraan dalam lapangan pekerjaan.

Jumlah kelompok pekerja rentan dan terpinggirkan di Indonesia cukup tinggi. Sebagian besar dari pekerja perempuan termasuk dalam salah satu kelompok tersebut. Pekerja rumahan¹⁴ merupakan salah satu contoh kelompok pekerja rentan dan terpinggirkan. Meningkatnya fenomena pekerja rumahan di Indonesia bersamaan dengan naiknya fleksibilitas pasar tenaga kerja, eksternalisasi proses produksi dan tingginya angka setengah-pengangguran dan kerja informal di Indonesia. Kesulitan dalam mengatur pekerjaan rumahan diperburuk oleh kenyataan bahwa para pekerja rumahan terikat dalam perjanjian informal, yang tidak tercatat tanpa mekanisme pengawasan yang memadai atau efektif. Tidak seperti bentuk *outsourcing* atau pekerjaan kontrak lainnya, aparat penegakan hukum tenaga kerja konvensional, seperti inspeksi

¹⁴ Para pekerja rumahan tidak diakui atau tidak secara jelas ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang nasional sebagai suatu jenis pekerjaan tertentu di Indonesia. Namun, Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah, 1996, (No.177), menetapkan pekerja rumahan sebagai: *'seseorang yang menjalankan pekerjaan di rumahnya atau di tempat pilihannya, yang bukan tempat dari pemberi kerja: untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan'*.

ketenagakerjaan—meskipun secara legal berhak melakukan pemeriksaan terhadap tempat kerja di lingkungan pemukiman—belum melakukan fungsi pengawasan tersebut secara efektif.

Proyek ini juga menjadi contoh dalam pendekatan inovatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pekerja perempuan di Indonesia, dan juga dalam pengembangan kelembagaan dari organisasi-organisasi yang terlibat mempromosikan pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja perempuan dan pekerjaan yang layak bagi perempuan.

ILO - MAMPU bekerja dalam kemitraan dengan LSM setempat untuk menerapkan program-program mereka. Dalam kajian ini, terdapat dua LSM yang turut serta: BITRA Indonesia dan MWPRI. Bagian berikut akan menyajikan pendekatan yang dilakukan oleh kedua LSM tersebut dalam menunjang penghidupan para penerima manfaat.

4.6.1 BITRA INDONESIA

BITRA Indonesia didirikan pada tahun 1986 oleh para aktivis berdasarkan keprihatinan mereka terhadap rakyat miskin dan kurang beruntung di Medan, Sumatera Utara. Semula, organisasi ini berbentuk paguyuban dan kemudian berubah menjadi yayasan pada tanggal 28 Maret 1991. Badan hukum yayasan ini telah diperbarui pada tahun 2000 dan 2005, yang terakhir ini dilakukan karena adanya amandemen UU Yayasan di Indonesia.

Visi dari LSM ini adalah untuk mencapai kesadaran kritis dalam masyarakat, yang terorganisir secara sosial, ekonomi dan demokratis, untuk memeluk prinsip-prinsip kesetaraan gender, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan juga untuk menghargai kebhinekaan. Misi BITRA Indonesia adalah untuk berkontribusi dalam aspek demokrasi ekonomi maupun politik; mewujudkan perubahan masyarakat melalui metode partisipatif; dan mempromosikan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. BITRA Indonesia mendukung program-program yang menyediakan akses pasar untuk produk pertanian, layanan keuangan untuk masyarakat guna meningkatkan kerja sama antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan kelompok simpan pinjam/*credit union* serta penggunaan radio di lingkup komunitas untuk mendukung perubahan sosial, dan juga sistem pertanian terpadu dengan penggabungan hewan ternak. Selain itu, BITRA Indonesia juga menargetkan penguatan modal sosial dan politik termasuk peningkatan gerakan politik di tingkat desa dan organisasi masyarakat independen.

BITRA menjalankan empat program utama: (1) Program Pengembangan Masyarakat; (2) Advokasi; (3) Teknologi dan Informasi untuk Pengembangan; (4) Riset, Dokumentasi dan Publikasi. Program ILO - MAMPU tentang pemberdayaan pekerja rumahan termasuk dalam program advokasi.

Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development Program*)

Pemberdayaan masyarakat dalam kategori ini mempunyai lima komponen: *credit union*, pertanian organik, kesehatan alternatif, pemasaran bersama hasil pertanian, dan tumpangsari (budidaya tanaman campuran). *Credit union* hadir untuk meningkatkan akses para penerima manfaat terhadap layanan keuangan. Mobilisasi sumber daya masyarakat untuk menyokong kemandirian dan pemberdayaan sumber penghidupan selama ini efektif dalam mengalokasikan pendapatan ke tujuan strategis lain seperti

membayai pendidikan anak. Pinjaman dari *credit union* awalnya digunakan untuk konsumsi, namun kemudian beralih ke arah sektor produksi, seperti peternakan, pertanian, pedagang asongan atau usaha kecil lainnya. Dalam *credit union* BITRA, pinjaman digolongkan ke dalam: produksi, pendidikan, konsumsi, dan darurat (kesehatan). Kecenderungan yang terjadi dua tahun adalah peminjaman untuk produksi dan biaya pendidikan anak. Anggota terdiri dari baik perempuan maupun laki-laki. Untuk dapat meminjam, anggota harus memenuhi syarat yaitu menabung dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Selain memanfaatkan sumber keuangan masyarakat untuk produksi, BITRA juga mendukung kredit mikro. Kredit mikro dapat berupa barang maupun uang. Dalam bentuk barang, kredit mikro berupa peralatan pertanian, sedangkan kredit dalam bentuk uang biasanya digunakan untuk membeli benih, pupuk, dan keperluan pertanian atau usaha kecil lainnya. Kredit mikro mensyaratkan 20% swadana, di mana dana yang berasal dari kredit mikro berfungsi sebagai dana penunjang dalam kegiatan sumber penghidupan produktif. Bila diperlukan dana yang lebih besar, *credit union* akan merujuk kebutuhan mereka ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang didirikan oleh BITRA.

Program pengembangan masyarakat juga mendukung pertanian organik

BITRA telah lama bekerja untuk meningkatkan sumber penghidupan masyarakat dengan mempromosikan pertanian organik, termasuk akhir-akhir ini melalui advokasi kebijakan tentang pertanian organik di Kabupaten Serdang Bedagai. BITRA merupakan anggota Aliansi Organik Indonesia (AOI) yang menggalakkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). BITRA menyadari dampak bahaya pupuk kimia dan pestisida pada tanah, air dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, BITRA mempromosikan cara pertanian alami dalam program pengembangan masyarakatnya. Pertanian organik ini diperkuat dengan mempromosikan perubahan kepada para petani, seperti melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT).

BITRA juga memajukan penghidupan para tenaga kesehatan alternatif terlatih, seperti penyedia jasa pijat atau obat-obatan herbal. Program tersebut juga menyediakan kesempatan untuk akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi layanan yang sulit diakses. Tenaga kesehatan alternatif memperoleh pelatihan perawatan kesehatan dasar, dikombinasikan dengan pijat dan pengobatan tradisional. BITRA juga mendampingi asosiasi tenaga kesehatan alternatif di 4 kabupaten (Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tanah Karo dan Langkat). Para praktisi yang ikut serta melaporkan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah masuk dalam asosiasi tenaga kesehatan alternatif.

Advokasi untuk Hak Masyarakat atas Tanah

Tanah merupakan faktor kunci dalam sumber penghidupan di bidang pertanian, dan akses terhadap tanah umumnya terancam oleh praktik perampasan tanah, termasuk oleh perusahaan perkebunan. Demi membela hak-hak petani, BITRA melakukan advokasi melalui litigasi dan pendekatan lainnya. Pendekatan litigasi digunakan untuk membela kasus-kasus yang mengancam atau melanggar hak-hak petani, termasuk kasus lingkungan hidup. Pendekatan non-litigasi dalam advokasi dilakukan melalui pendidikan mengenai hak-hak petani, kampanye reformasi agraria, penguatan jaringan kerja, dan advokasi kebijakan saat konflik agraria terjadi. Selain itu, organisasi ini

memperkuat kapasitas organisasi masyarakat di tingkat desa dan kabupaten. Aksi yang dilakukan juga menyasar kebijakan serta praktik-praktik pemerintahan melalui advokasi guna membentuk peraturan pemerintah daerah yang pro-rakyat miskin.

Matriks berikut merangkum kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BITRA.

Tabel 19. Strategi Pemberdayaan BITRA

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi BITRA
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan tentang pertanian, termasuk pertanian organik • Pelatihan advokasi • Pelatihan pengelolaan organisasi • Peningkatan kesadaran gender • Pelatihan pekerja rumahan tentang hak, negosiasi dan kepemimpinan • Pelatihan tentang wirausaha • Pelatihan tentang pengelolaan usaha kecil • Penelitian dan publikasi tentang pembangunan pedesaan
Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)	<ul style="list-style-type: none"> • Serikat kredit • Kredit mikro • Fasilitas untuk usaha para anggota • Bantuan perlengkapan dan peralatan teknis seperti pompa untuk pertanian • Penyuluhan lahan percontohan (<i>Demonstration Plot</i>) untuk contoh pertanian efektif
Aset Lembaga (Kekuatan untuk)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan advokasi • Pendampingan kelompok masyarakat untuk perubahan kebijakan contoh: peraturan daerah tentang pertanian organik • Advokasi untuk reformasi agraria
Aset Sosial (Kekuatan dengan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengorganisir kelompok swabantu • Serikat kredit

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi BITRA
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kelompok tani, pendampingan untuk penguatan jaringan kerja dan kelompok • Asosiasi tenaga kesehatan alternatif • Asosiasi perempuan pekerja rumahan
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye perlindungan sosial • Kampanye pemenuhan hak-hak pekerja rumahan

Dalam rangka pendukung penjualan produk pertanian, BITRA memfasilitasi pemasarannya. Sistem pelelangan kakao diperkenalkan guna membantu petani mendapatkan harga panen kakao yang lebih tinggi. Pada rantai nilai konvensional, harga kakao yang dipanen petani jatuh pada nilai paling rendah. Sistem lelang menghubungkan produsen (petani kecil) dengan pembeli secara langsung, di mana melalui lelang tersebut, para petani dapat menyajikan kakao terbaiknya dan pembeli akan melakukan penawaran harga. Dengan demikian, para petani dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Sayangnya, ketidakpastian produksi kakao menjadikan sistem ini kurang stabil. Begitu pula halnya dengan pemasaran beras organik, BITRA mendirikan toko dan koperasi untuk penjualan beras organik.

4.6.2 MWPRI

MWPRI memusatkan perhatian pada pekerja rumahan. Trend pekerja rumahan mengalami kenaikan yang signifikan di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan DKT bersama para penerima manfaat, pekerjaan rumahan dapat menyumbang hingga 30% dari pendapatan rumah tangga. Jenis pekerjaan rumahan yang paling umum adalah pembuatan payet dan bordir, dengan upah harian sebesar Rp5.000. Tidak hanya upahnya yang rendah, para pekerja juga harus menyediakan peralatan mereka sendiri seperti mesin jahit, pemidangan (*embroidery hoop*) dan gunting. Meskipun para pekerja rumahan bergaji sangat kecil—antara Rp5.000 (payet dan bordir) sampai dengan Rp30.000 per hari—mereka tetap melakukan pekerjaan ini karena merupakan sumber penting bagi pendapatan rumah tangga. Bahkan hasil dari DKT menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk desa bergantung sepenuhnya pada pekerjaan rumahan, dengan rata-rata pendapatan sebanyak 1 juta rupiah per bulan per rumah tangga. Pendapatan ini di bawah pendapatan minimum rumah tangga rata-rata yaitu Rp1,2 juta/bulan. Karena itu, kebanyakan pekerja rumahan terjebak hutang dan harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup.

Jenis pekerjaan rumahan lain adalah jasa boga, namun ini sedikit berbeda dengan pembuatan bordir, karena jasa boga lebih menguntungkan. Dari usaha jasa boga, anggota kelompok bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 25.000—Rp 100.000 per hari. Keuntungan lain dari jenis pekerjaan rumahan ini adalah sisa makanan dan bahan makanan yang ada bisa digunakan para pekerja untuk keluarga mereka.

Tabel 20. Strategi Pemberdayaan MWPRI

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi MWPI
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan bisnis <i>start up</i> (usaha pemula) Meningkatkan rasa percaya diri penerima manfaat Memfasilitasi kunjungan, diskusi dan pertemuan antar anggota kelompok untuk membahas produk-produk layak pasar yang dibuat dari sisa kerja rumahan yang mereka jalankan, seperti sisa potongan selimut, sisa benang dan sebagainya. Melatih para penerima manfaat tentang gender, kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, dan kanker
Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pendapatan dari usaha baru seperti jasa boga dapat menjadi sumber penghasilan yang sangat bagus
Aset Lembaga (Kekuatan untuk)	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan perempuan dalam pembuatan keputusan rumah tangga. Namun, dalam pengeluaran besar, seperti pembelian sepeda motor, keputusannya dipengaruhi oleh suami mereka, khususnya berkaitan dengan jenis motor yang akan dibeli Pendampingan keterampilan advokasi termasuk rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan
Aset Sosial (Kekuatan dengan)	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan kelompok yang berlanjut sampai pembahasan tentang masalah keuangan Pengembangan kapasitas jaring kerja di luar tingkat desa
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan

Para penerima manfaat masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya keterampilan dalam memasarkan produk mereka. Keterampilan advokasi—yang juga terbatas—turut diperlukan dalam rangka menekan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia di daerah ini. Tantangan lainnya berkaitan dengan pendapatan rumah tangga, yang biasanya berada di bawah garis kemiskinan,

dan bahkan berada di bawah rata-rata pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pendapatan rumah tangga adalah Rp1 juta untuk rumah tangga yang beranggotakan empat orang. Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah Rp287,582 per kapita per bulan, jadi jumlah pendapatan rumah tangga beranggotakan empat orang adalah Rp1,150,328. Kebanyakan penerima manfaat tidak mempunyai simpanan, dalam bentuk barang maupun uang. Dengan pengeluaran bulanan rata-rata lebih dari Rp1,200,000, kebanyakan pekerja rumahan berhutang pada perusahaan yang mempekerjakan mereka, tetangga, atau lembaga keuangan setempat.

Pengecualian pekerja rumahan dari pembuatan keputusan masyarakat merupakan hal yang biasa bagi masyarakat setempat. Banyak pekerja rumahan masih merasa kurang percaya diri untuk menghadiri pertemuan desa, di mana sering kali mereka memang tidak diundang. Masyarakat, pemerintah dan perusahaan setempat tidak mengakui pekerja rumahan sebagai pegawai perusahaan. Akibatnya, mereka tidak memiliki hak sebagai pekerja. Pekerja rumahan bekerja di rumah, dan rumah mereka tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang layak. Umumnya rumah-rumah tersebut dihuni oleh banyak orang dewasa dan terkadang oleh lebih dari satu keluarga.

4.7. MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant CARE) secara resmi didirikan pada tanggal 22 Juni 2004. Organisasi ini mempunyai visi memperkuat gerakan buruh migran untuk mewujudkan keadilan secara global. Migrant CARE mendukung terwujudnya kehidupan buruh migran yang bermartabat, mengorganisir kelompok buruh migran untuk meningkatkan kesadaran kritis mereka beserta anggota keluarganya. Organisasi ini juga memperkuat jaringan antar buruh migran dan menyediakan bantuan hukum dan penanganan kasus pelanggaran hak-hak buruh migran. Pada tingkat kebijakan, Migrant Care memperjuangkan kebijakan yang menghargai hak dan kebutuhan akan perlindungan buruh migran (Wawancara dengan Migrant Care, 2015).

Dalam konteks Program MAMPU, Migrant CARE bergerak di 4 provinsi (NTT, NTB, Jawa Timur dan Jawa Tengah) dalam kemitraan dengan LSM lokal Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS), *Social Analysis Research Institute* (SARI), Komunitas Belajar Tanoker Ledok Ombo, Perkumpulan Panca Karsa (PPK), *Institute for Social and Development* (INDIPT) dan *Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment* (ICDHRE).

Tabel 21. Strategi Migrant Care

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi Mitra
Aset Manusia (Kekuatan di dalam)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pengelolaan pengetahuan tentang migrasi termasuk penelitian, diskusi bulanan tentang buruh migran dan pengembangan perpustakaan Mengembangkan modul pendidikan alternatif

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi Mitra
	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan pelatihan/lokakarya tentang isu-isu buruh migran
<p>Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menghubungkan sumber eksternal untuk membantu keuangan sumber penghidupan eks-buruh migran, khususnya oleh sub-mitra Terdapat kesenjangan dalam program MAMPU yang ada yaitu tidak dimasukkannya modal keuangan atau pemberian uang benih
<p>Aset Lembaga (Kekuatan untuk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pusat data tentang buruh migran perempuan dan keluarganya Secara aktif meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye media Memfasilitasi dialog antar berbagai pihak Mengembangkan kapasitas Migrant CARE demi advokasi yang lebih baik termasuk mengembangkan keterampilan teknis para staf, sistem pengawasan serta evaluasi, dan pengelolaan keuangan
<p>Aset Sosial (Kekuatan dengan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengorganisasian bagi asosiasi buruh migran dan mantan buruh migran di tingkat daerah Perluasan jaringan kerja antar asosiasi/organisasi eks-buruh migran
<p>Aset Pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan layanan pra-keberangkatan dan pasca-pulang Advokasi untuk layanan terpadu bagi buruh migran Capaian yang lebih baik terkait dengan hak-hak buruh migran dan kebebasan dari eksploitasi serta diskriminasi

Kajian lapangan ini melibatkan INDIPT dan SARI, keduanya berlokasi di Jawa Tengah. Bagian berikut menyajikan strategi yang dilaksanakan oleh kedua LSM tersebut.

4.7.1 INDIPT (INSTITUTE FOR SOCIAL STRENGTHENING STUDIES – INSTITUT KAJIAN PENGUATAN SOSIAL)

INDIPT merupakan mitra Migrant Care untuk Program MAMPU di Kebumen, Jawa Tengah. INDIPT didirikan pada tahun 2000 dengan visi mengupayakan terciptanya

tatanan masyarakat yang kritis, demokratis, pluralis dan setara gender. INDIPT mendukung upaya kesadaran kritis, kepekaan gender dan pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya lokal dengan lebih baik. Organisasi ini juga mendukung kebijakan pemerintah yang peka gender.

INDIPT menjalankan program-program yang terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender, buruh migran, dan penggalakan pluralisme. Sebagai sub-mitra MAMPU, INDIPT bekerja untuk mempromosikan kepedulian desa terhadap buruh migran dan melakukan advokasi hak-hak buruh migran. INDIPT menyediakan pelatihan bagi anggota keluarga yang ditinggal buruh migran agar menggunakan uang transfer/kiriman secara lebih bijak dan berkelanjutan. Organisasi ini mempromosikan ekonomi produktif bagi keluarga para migran yang mereka tinggalkan di desa. Bagi para mantan buruh migran, INDIPT mendampingi dan membantu mereka dalam berintegrasi kembali dengan sumber penghidupan. Kebanyakan buruh migran yang telah pulang mengalami guncangan ekonomi saat kembali, hal ini terjadi akibat tidak tersedianya pekerjaan yang layak di desa. Oleh karena itu, INDIPT berupaya membantu para buruh migran yang pulang untuk mencari sumber penghidupan alternatif. Akan tetapi, program MAMPU yang ada tidak menyediakan bantuan langsung untuk komponen sumber penghidupan dan INDIPT berusaha untuk menghubungkan kebutuhan mereka dengan program pemerintah yang ada dan terbatas.

Meningkatkan penciptaan lapangan kerja

INDIPT mempromosikan pemanfaatan potensi para eks-buruh migran, seperti produksi industri rumah tangga telur asin, *nugget* ikan dan pembuatan kue, dan kemudian mengorganisir produksi melalui SERBUMI, sebuah serikat eks-buruh migran. INDIPT mengorganisir produksi bersama oleh para pekerja industri rumah tangga dan menghubungkan mereka dengan pasar.

Penciptaan lapangan kerja juga dipromosikan dengan memfasilitasi para migran yang telah pulang kembali untuk mendirikan lembaga pendidikan informal yang menyediakan kursus bagi para siswanya.

Gambar 13. Mantan Buruh Migran dan Industri Rumah Tangga Keripik di Kebumen



DESBUMI (Peduli Desa dengan Buruh Migran)

Salah satu isu yang upayakan oleh Des-Bumi adalah pengesahan Peraturan Desa yang melindungi kepentingan buruh migran. Di Tanggulangin, pada tanggal 27 Agustus 2015, parlemen desa mengadakan pertemuan konsultasi dalam rangka pengesahan peraturan desa yang melindungi buruh migran. Hal ini dipicu oleh berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh migran dalam proses perekrutan. Berbagai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa banyak buruh migran yang berasal dari Tanggulangin mengalami perlakuan tidak adil terkait pemberian upah, eksploitasi kerja, kekerasan dan pelanggaran perjanjian kerja. Pertemuan tersebut berhasil menyepakati pengesahan peraturan desa yang mencegah pelanggaran hak-hak buruh migran.

Pengorganisasian mantan buruh migran

Para mantan buruh migran dianjurkan untuk membentuk perkumpulan antar buruh migran yang sudah kembali ke tanah air. SERBUMI didirikan sebagai serikat bagi para buruh migran yang sudah pulang kembali. INDIPT memfasilitasi diadakannya pelatihan guna memotivasi para buruh migran yang pulang untuk membentuk SERBUMI (Serikat Buruh Migran) di tiga desa (Krandegan, Tanggulangin dan Bojongsari) di Kabupaten Kebumen.

Tantangan

INDIPT menghadapi berbagai tantangan akibat tidak tersedianya sumber daya langsung dari MAMPU untuk membantu sumber penghidupan para penerima manfaat. Bagian dari rencana kontingensi/cadangan organisasi ini adalah menghubungkan kebutuhan penerima manfaat dengan program pemerintah setempat seperti balai peternakan, balai pertanian dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

4.7.2 SARI (SOCIAL ANALYST AND RESEARCH INSTITUTE – INSTITUT PENELITIAN DAN ANALISIS SOSIAL)

SARI didirikan di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1997 oleh sembilan aktivis sebagai bagian dari gerakan reformasi saat krisis tahun 1998. SARI memusatkan perhatian pada tiga isu utama, yaitu: (1) Hak-hak Anak; (2) Buruh Migran; dan (3) Reduksi Risiko Bencana. Pada tahun 2003, SARI mengembangkan program sumber penghidupan guna menanggapi masalah penggusuran terhadap warga oleh pemerintah ketika bendungan “Kedung Ombo” dibangun. SARI mengorganisir tiga kelompok perempuan yang disebut – PUK (Perempuan Usaha Kecil) – untuk membentuk *credit union*. Syarat keanggotaannya antara lain, merupakan korban penggusuran, miskin, dan mempunyai usaha kecil/mikro. Bantuan yang diberikan oleh SARI mencakup: suntikan modal; pelatihan kerja dan pemasaran; serta pendirian *credit union*. Satu dari tiga kelompok tersebut masih berjalan sampai sekarang, sedangkan dua lainnya tidak lagi aktif karena SARI tidak lagi menyediakan pendampingan intensif (*living in*) di daerah tersebut. Pada saat DKT diadakan di desa Pendem, Kabupaten Sragen (14 September, 2015), para penerima manfaat berbagi cerita mengenai strategi keberkelanjutan kelompok mereka.

“Kami telah menjalankan kelompok ini sejak tahun 2003 saat kami menerima modal dari SARI sebesar Rp19,5 juta. Sekarang modal kami lebih dari Rp60 juta. Kami membatasi keanggotaan hingga 30 orang saja, tidak lebih. Jika seseorang ingin bergabung, mereka harus menunggu sampai seseorang mengundurkan diri dari

kelompok. Kami memilih orang yang berkomitmen dan tidak mempunyai catatan buruk di masyarakat agar kami dapat membangun rasa percaya dan solidaritas dalam organisasi kami. Kami merasa berterima kasih karena selain memperoleh manfaat dari simpan pinjam, kami juga mampu memberi sumbangsih bagi para anggota kami dalam kejadian seperti sakit, kematian, lahiran dan lain sebagainya”

Di bawah proyek MAMPU, SARI memusatkan perhatian pada advokasi hak-hak buruh migran dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran, serta menyediakan pusat informasi di tingkat desa. Di Wonosobo, mereka mengorganisir empat kelompok yang terdiri dari 25–30 anggota yang 80 persennya merupakan eks-buruh migran. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penelitian dan pusat data, advokasi, peningkatan kapasitas serta reintegrasi sumber penghidupan. Di Kabupaten Wonosobo, SARI telah mengembangkan peraturan perlindungan buruh migran melalui kerja sama dengan walikota. Mereka juga melatih paralegal buruh migran di masyarakat untuk menangani berbagai kasus, seperti pemilihan agen penyalur TKI yang terpercaya, pembuatan paspor, dan lain-lain.

Program Sumber Penghidupan

Selain upaya melalui advokasi, SARI juga mengembangkan program sumber penghidupan bagi para eks-buruh migran di Wonosobo. Tiga kelompok simpan pinjam telah dibentuk, bersamaan dengan berbagai kegiatan lain seperti pelatihan keterampilan kerja (membatik, pembuatan makanan kecil, pembuatan kemasan, dan pembuatan label). Hubungan dengan pemerintah dan pusat bisnis dibangun dalam rangka menyediakan akses terhadap pasar. Beberapa badan pemerintah telah menyediakan toko untuk memamerkan hasil produk para eks-buruh migran dan melibatkan mereka dalam pameran.

Gambar 14. Pengemasan Tiwul di Wonosobo



Tantangan

Akses pasar merupakan salah satu tantangan dalam program intervensi sumber penghidupan, para penerima manfaat juga kurang terampil dalam hal pengembangan usaha dan analisis pasar. Meskipun mereka telah membangun hubungan dengan berbagai pihak, ketika program selesai, kelompok-kelompok tersebut turut membubarkan diri.

4.8. PERMAMPU

PERMAMPU adalah sebuah konsorsium yang didirikan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput dalam pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan di Sumatera. Konsorsium tersebut diresmikan di Medan pada tanggal 27 November 2012, dan terdiri dari delapan anggota organisasi perempuan (LSM/ONROP) di Sumatera: Flower Aceh - Aceh, Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) - Sumatera Utara, Organisasi Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) - Sumatera Barat, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Sumatera (PPSW) - Riau, Aliansi Perempuan Merangin (APM) - Jambi, WCC Cahaya Perempuan - Bengkulu, WCC Palembang - Sumatera Selatan dan DAMAR - Lampung.

Tujuan konsorsium tersebut adalah untuk penguatan kepemimpinan akar rumput dalam rangka pengentasan kemiskinan, melalui perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan, khususnya bagi perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota.

Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dijalankan oleh PERMAMPU termasuk:

1. Penguatan perempuan miskin (dewasa dan remaja) di pedesaan dan di kota mengenai pendidikan seksual komprehensif yang terintegrasi dengan penguatan politik dan ekonomi perempuan.
2. Pelayanan pendampingan perempuan dan layanan informasi mengenai HKSR perempuan.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman para tokoh; tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi berbasis hak perempuan.
4. Penyuluhan kebijakan dan alokasi anggaran daerah untuk peningkatan akses pelayanan ramah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi perempuan.
5. Pengembangan penelitian-penelitian feminis seputar isu seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan.
6. Dokumentasi pengalaman di lapangan mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan sebagai pengetahuan kolektif perempuan lintas isu dan wilayah.
7. Pengembangan jaringan kerja untuk gerakan perlindungan HKSR perempuan Sumatera di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Kajian ini melingkupi wawancara, DKT dan pengumpulan data kuesioner dengan para penerima manfaat PESADA sebagai salah satu anggota konsorsium PERMAMPU. PESADA bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui *credit union* (inisiatif non-MAMPU).

Tabel berikut menyajikan daftar strategi yang dilakukan oleh PERMAMPU.

Tabel 22. Strategi Pemberdayaan PERMAMPU dan PESADA

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi PERMAMPU dan PESADA
<p>Aset Manusia (Kekuatan di dalam)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan materi terkait dengan pendidikan seksual bagi keluarga • Mendirikan pusat pelatihan bagi pemimpin masyarakat perempuan berpotensi • Mengembangkan media kreatif untuk peningkatan kesadaran tentang gender dan hak-hak reproduksi • Memberi Pendidikan bagi perempuan muda feminis • Mendukung lembaga pendidikan untuk melaksanakan pendidikan seksual dan hak-hak reproduksi para siswa • Mengadakan diskusi kritis berkala • Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengetahuan tentang pengelolaan program <p>PESADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk pertanian • Pelatihan untuk serikat kredit
<p>Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)</p>	<p>PESADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Credit union</i> – skema simpan pinjam • Kredit mikro • Bantuan peralatan pertanian
<p>Aset Lembaga (Kekuatan untuk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kesetaraan akses terhadap pembuatan keputusan di tingkat rumah tangga • Mendukung kelompok advokasi perempuan • Mengorganisir aksi bersama untuk pendidikan tentang solidaritas dan kesetaraan gender saat acara penting seperti: Hari Perempuan Internasional, Hari Pendidikan, Hari Kesehatan Reproduksi, Hari Ibu dan acara lain yang relevan
<p>Aset Sosial (Kekuatan dengan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelompok perempuan • Memperkuat asosiasi penyedia layanan kesehatan tradisional

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi PERMAMPU dan PESADA
	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung anggota konsorsium dalam mengorganisir masyarakat di tingkat akar rumput • Memperluas jaringan kerja dan aliansi kelompok perempuan • Mengembangkan jaringan kerja yang kuat dengan media
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki sistem layanan kesehatan • Memberdayakan penyedia layanan kesehatan tradisional • Melakukan advokasi pemenuhan hak-hak reproduksi yang lebih baik • Sistem rujukan untuk tindak kekerasan

4.8.1. PESADA

PESADA didirikan sebagai Yayasan Sada Ahmo (YSA) pada tahun 1990. Organisasi ini kemudian berganti menjadi asosiasi PESADA, dengan tujuan menanggapi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Organisasi ini mempunyai kekuatan dalam mengorganisir *credit union* dan pemberdayaan perempuan. Salah satu fokus utamanya adalah masyarakat Pakpak, suatu suku etnis minoritas dari Kabupaten Dairi di Sumatera. Masyarakat Pakpak terpinggirkan dan diperdaya, baik oleh pemerintah maupun suku etnis lain di Sumatera Utara, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk bertahan hidup dan memiliki masa depan. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan situasi politik serta sosio-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Pakpak dalam konteks ini, PESADA meneliti kondisinya dan menyimpulkan bahwa 'isu gender sering kali menjadi akar dari permasalahan'. PESADA mengutamakan penyatuan kekuatan bersama dalam semua programnya. Organisasi ini menggunakan analisis kekuatan dan pendekatan berbasis hak asasi yang menjadikan peningkatan kesadaran kritis, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses rakyat miskin terhadap sumber daya sebagai jantung hati pemberdayaan. Pemberdayaan bukan berarti kekuatan/kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok orang. Kekuatan/kekuasaan seharusnya dibagi dan tidak dipaksakan mengatasi pihak lain (Oxfam Novib, 2011).

Kegiatan utama PESADA adalah:

Pemberdayaan Perempuan Melalui *Credit Union* dan Kredit Mikro

PESADA memberdayakan perempuan agar menjadi mandiri dengan memobilisasi sumber keuangan mereka sendiri melalui *credit union*. Kegiatan ini dimulai di Dairi tetapi sekarang telah menyebar ke lima kabupaten lainnya (Nias, Medan, Langkat, Dairi, Pak-Pak Barat). Pada tahun 1992, PESADA memulai *credit union* MELATI di Desa Tinada,

Kecamatan Salak, sebagai cara untuk meningkatkan posisi tawar perempuan. Anggota *credit union* menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai tabungan dan kemudian menggunakannya untuk membantu diri mereka sendiri. Dalam setiap rapat bulanan, yaitu rapat dalam rangka kegiatan menabung, para anggota menabung dan membayar hutang pinjaman bagi yang meminjam dari sumber keuangan mereka sendiri (Sinaga, 2010). Pada bulan Desember 2014, terdapat 207 kelompok usaha kredit di tingkat akar rumput dengan 13,297 anggota. Kelompok-kelompok ini mempunyai tabungan berjumlah total 20.5 milyar rupiah dan pinjaman sebesar 23.7 milyar rupiah.

Pada tahun 2011, *credit union* tersebut memiliki badan hukum dengan akta notaris No. 40/KPWP/XII/2011, dan dikenal sebagai KOPWAN PESADA Perempuan. Organisasi ini mempunyai tata administrasi yang jelas dalam mengatur transaksi simpan pinjam seluruh anggotanya. Pinjaman diberikan berdasarkan proposal dan kinerja tabungan serta penilaian oleh pengurus kredit. Pinjaman akan diberikan setelah mempertimbangkan penilaian TUKKEPAR (tujuan; kerajinan menabung; kemampuan mengembalikan; prestasi dan partisipasi). *Credit union* juga mengadakan pelatihan bagi para anggota dalam isu-isu seperti produktivitas dan pengelolaan keuangan. Pelatihan bagi anggota termasuk: (1) Kursus dasar *credit union*; (2) kursus peningkatan kesadaran gender; (3) Edukasi peserta pemilu.

Kredit Mikro untuk Usaha Kecil Produktif Perempuan

Di samping pinjaman dari *credit union*, PESADA juga menggunakan kredit mikro sebagai cara untuk memberdayakan perempuan. Kredit semacam ini diberikan sebagai modal usaha kepada perempuan yang terlibat dalam usaha kecil/mikro. Kredit tersebut digunakan untuk mendukung sumber penghidupan produktif seperti beternak, pertanian organik, dan berdagang.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Oxfam Novib (2011), perempuan yang diberdayakan oleh PESADA berhasil memperbaiki akses terhadap sumber daya keuangan, yang pada akhirnya mengarah pada pendidikan politik bagi perempuan pedesaan. Melalui *credit union*, pelatihan, dan pendidikan, perempuan mulai melihat keadaan mereka secara berbeda. Perempuan mulai memperoleh 'kekuatan' dalam rumah tangga dan keluarga besarnya, mereka menjadi lebih leluasa bergerak dan mendapatkan kebebasan. Mereka berupaya mencari cara untuk mengakses sumber daya—bukan hanya sumber daya keuangan, tetapi juga akses terhadap pasar dan informasi—untuk menanamkan modal dalam usaha mereka. *Credit union* menjadi titik masuknya pemberdayaan politik, advokasi, peningkatan kesadaran, dan pendidikan tentang HAM serta isu-isu feminisme bagi perempuan.

Kedaulatan Pangan bagi Keluarga

Program ini menggalakkan penggunaan kompos dan pestisida organik untuk tanaman padi, sayuran dan kopi. Kegiatan ini dilakukan oleh 20 kelompok perempuan di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat. Program ini juga mempromosikan Sistem Intensifikasi Padi (*System of Rice Intensification - SRI*). SRI memperkenalkan teknik-teknik baru dalam meningkatkan produktivitas budidaya padi sekaligus juga menjaga lingkungan hidup. Beberapa teknik dasarnya adalah: (1) Menanam benih lebih muda kurang dari 12 hari; (2) Satu bibit pada satu lubang, yang berbeda dari metode sebelumnya; (3) Pengendalian irigasi/pengairan; (4) Penggunaan pestisida dan pupuk organik. Program ini memungkinkan para petani mengalami proses "*learning by doing*". Belajar secara langsung dari praktik lapangan akan menghasilkan pengetahuan lebih

bagi para petani. Penggunaan kelompok petani dalam proses SRI telah diperkenalkan dan diperkuat.

Dalam program ini, SRI telah dirancang untuk memberdayakan perempuan sebagai petani utama. Pada tahap ini, pusat perhatian lebih diarahkan pada pembelajaran teknik-teknik baru budidaya padi sekaligus juga meningkatkan kesadaran petani akan keunggulan pertanian organik.

Gambar 15. Panen Padi SRI di Dairi



(Sumber: Dokumentasi Maringan Pardede)

4.9. BAKTI (BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA)

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) didirikan pada tahun 2004. Sebelumnya, organisasi ini merupakan bagian dari kantor cabang Bank Dunia untuk kawasan timur Indonesia. Pada tahun 2009, organisasi tersebut terdaftar sebagai yayasan dan menjadi badan hukum pada tanggal 8 Februari 2010. Pendirian BaKTI dipicu oleh kurangnya data dan penelitian di kawasan tersebut serta rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat setempat dalam kebijakan pemerintah, yang mengarah pada kurangnya akuntabilitas pemerintah (BaKTI, 2015).

BaKTI mendokumentasikan dan menyebarluaskan pelajaran yang didapatkan tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia guna memperbaiki praktik pembangunan yang dilakukan. BaKTI menyebarluaskan contoh-contoh praktik pembangunan yang baik yang telah dijalankan oleh berbagai pihak (pemerintah, LSM, akademisi). Dokumentasi, diseminasi serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di kawasan timur Indonesia, sebagai kawasan tertinggal. Program-program yang diusung oleh BaKTI mengupayakan promosi pemberdayaan ekonomi, isu-isu gender dan koperasi. Setiap dua tahun, BaKTI menggelar festival forum Kawasan Indonesia Timur (KTI) guna mempromosikan adopsi praktik terkini dalam pembangunan.

Program MAMPU merupakan program pertama yang dijalankan oleh BaKTI dengan peran sebagai perantara. Program MAMPU ini terdiri dari empat komponen: anggota

parlemen, media, kelompok konstituen dan mitra LSM. BaKTI menjalin kemitraaan dengan LSM setempat dalam mengimplementasikan program MAMPU, dan secara bersamaan membangun kapasitas LSM setempat untuk mempromosikan pengembangan kapasitas organisasi, termasuk kapasitas pengelolaan keuangan dan program.

Meskipun program BaKTI-MAMPU tidak menyediakan bantuan langsung untuk sumber penghidupan, di tingkat mitra, sumber penghidupan menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, di Ambon, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang terhubung dengan berbagai layanan pemerintah sehingga mereka dapat mengakses bantuan sumber penghidupan melalui program pemerintah. Hampir semua mitra memiliki program sumber penghidupan, seperti Kombongan dan LP2EM.

Berdasarkan peninjauan dokumen dan penelitian lapangan, pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BaKTI dan ketiga mitranya dalam kajian ini dapat dirincikan sebagaimana terdapat dalam Tabel 22.

Tabel 23. Pendekatan Pemberdayaan BaKTI

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi BaKTI
<p>Aset Manusia (Kekuatan di dalam)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran kritis para konstituen terkait aspirasi politik, sosial dan ekonomi • Meningkatkan keterampilan negosiasi, legislasi dan pengawasan anggaran • Mendidik dan meningkatkan pengetahuan perempuan tentang partisipasi politik dan hak-hak sipil, sosial dan ekonomi
<p>Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi mitra dalam isu-isu sumber penghidupan melalui dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik (<i>best practice</i>) • Skema simpan pinjam (YKS) • Kredit Mikro untuk Sumber Penghidupan Produktif (LP2EM; YKS) • Pengembangan koperasi (YKS) • Pertanian terpadu (YKS)
<p>Aset Lembaga (Kekuatan untuk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam proses kebijakan pro-rakyat miskin
<p>Aset Sosial (Kekuatan dengan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi jaringan kerja yang kuat antar CSO

Bidang Pemberdayaan	Pendekatan/Strategi BaKTI
Aset Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Advokasi peraturan pemerintah daerah dan pengesahan kebijakan tentang hak-hak perempuan

Dalam menjalankan program MAMPU, BaKTI bekerja sama dengan tujuh LSM di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Bagian di bawah ini membahas strategi keterlibatan para sub-mitra BaKTI, yaitu: LP2EM (Parepare); Yayasan Kombongan Situru (Toraja Utara), dan MAUPE (Maros).¹⁵

4.9.1 LP2EM PAREPARE

LP2EM didirikan pada tahun 1996, oleh para aktivis yang prihatin dengan kondisi kemiskinan di Parepare, melalui program advokasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2015, LSM ini melayani 22 desa/kelurahan di Kota Parepare. Sumber penghidupan para penerima manfaat cukup beragam, termasuk di bidang perikanan, pengolahan ikan, pembibitan, kerja buruh, perdagangan kecil dan pertanian.

Strategi LSM ini termasuk:

- Pemberdayaan Perempuan yang Bekerja di Pasar melalui kredit mikro
- Pengembangan koperasi seperti bagi pengrajin batu
- Pelatihan Sumber Penghidupan Alternatif, seperti industri rumah tangga
- Peningkatan kesadaran gender termasuk bagi para suami

LSM ini aktif dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat termasuk melalui kredit mikro untuk perempuan miskin di perkotaan yang berjualan makanan pokok di pasar tradisional, sebagaimana kasus di bawah ini.

Kasus Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan dalam Usaha Kecil (PILAR 2007)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perempuan melalui pengembangan dan pemberian bantuan usaha mikro di Kota Parepare. Program ini melayani perempuan yang terlibat dalam usaha mikro di pasar setempat yang menjual berbagai barang (terutama sembako) dan pedagang asongan. Setelah menerima bantuan, para perempuan tersebut melaporkan bahwa pendapatan mereka meningkat sekitar 25% dalam kurun waktu enam bulan setelah pelaksanaan program. Selain pemberian pinjaman mikro, program ini juga mempromosikan budaya menabung di

¹⁵ Namun studi kuantitatif yang dilakukan tidak mencakup MAUPE, hanya YKS dan LP2EM.

antara perempuan pelaku pasar, sehingga 71% penerima manfaat berhasil meningkatkan nilai tabungan mereka. Program ini juga meningkatkan keterampilan perempuan dalam pembukuan, baik pada tingkat individu maupun kelompok.

Sumber: Wawancara dengan staf LP2EM (Agustus, 2015).

4.9.2 YAYASAN KOMBONGAN SITURU (YKS)

Yayasan Kombongan Situru (YKS) didirikan pada tahun 1998 di Makale, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Visi yayasan ini adalah untuk mencapai masyarakat sipil yang mandiri, masyarakat yang demokratis dan kesetaraan gender. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai misinya adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat
- Penguatan jaringan kerja
- Peningkatan semangat profesionalisme

Program utama YYS adalah:

- Pemberdayaan ekonomi
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- HAM dan demokrasi
- Pemberdayaan perempuan dan anak

Strategi pemberdayaan ekonomi

YKS tidak secara khusus menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat, meskipun demikian, sebagian besar penerima manfaat dari organisasi ini adalah perempuan. Mereka terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui berbagai strategi sebagai berikut:

Strategi Program Sumber Penghidupan YYS terdiri dari berikut ini:

- Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok swabantu (*Self Help Group* - SHG)
- Peningkatan kapasitas bagi petani, pertanian organik dan pengelolaan hama terpadu (PHT).
- Dalam program ini petani diajarkan tentang cara-cara bertani yang berkelanjutan dan teknologi terapan yang dikenalkan untuk meningkatkan produktivitas.
- Tanggap kemanusiaan terhadap para pengungsi korban konflik Mamasa
- Pemberdayaan usaha mikro perempuan

Di luar Program Sumber Penghidupan adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Politik dan Peningkatan Kapasitas Sudut Pandang Gender dalam Pemilu
- Penguatan badan perwakilan desa
- Peningkatan keikutsertaan politik perempuan
- Kampanye Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4.9.3 MAUPE, MAROS

MAUPE didirikan pada tanggal 28 Maret 2003 sebagai LSM yang memusatkan perhatian pada pemberdayaan perempuan dan demokrasi. Organisasi ini resmi terdaftar sebagai yayasan pada bulan Oktober 2014. Pada saat didirikan, tujuan utama MAUPE adalah mencapai kemandirian, kesejahteraan dan kesetaraan gender. Visinya adalah untuk meraih otonomi, kedaulatan dan pemenuhan hak-hak asasi rakyat miskin dan perempuan yang terpinggirkan. Untuk mencapainya, MAUPE berupaya memperbaiki peran dan keikutsertaan perempuan miskin dan terpinggirkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. MAUPE juga memperkuat jaringan perempuan guna menghasilkan gerakan yang lebih efektif sekaligus mempromosikan peraturan dan kebijakan yang pro-rakyat miskin dan responsif gender.

Dalam rencana strategis 2014-2019, MAUPE mengidentifikasi beberapa program sebagai berikut:

- Pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelompok
Termasuk peningkatan kapasitas kelompok dalam manajemen dan tata kelola kelompok, serta pengembangan proposal dan advokasi.
- Advokasi kebijakan pro-rakyat miskin dan responsif gender
Termasuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam advokasi kebijakan di lingkup daerah setempat, seperti formulasi draft akademis dan melakukan "lobbying" dalam proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan dokumen/makalah kebijakan dan pengesahan kebijakan.
- Meningkatkan akses terhadap skema pembangunan termasuk CSR dan APBD.
- Pemberdayaan jaringan kerja bagi perempuan miskin dan terpinggirkan
Bertujuan mendukung kelompok perempuan bagi para pemangku kepentingan dan mitra strategis.
- Sekolah politik untuk perempuan

Yayasan MAUPE mempunyai beberapa divisi, yaitu divisi advokasi, pengarusutamaan gender, sekolah politik perempuan, dan pengembangan ekonomi perempuan. Pada tahun 2014, LSM ini bekerja dengan 30 kelompok perempuan di enam kecamatan di Maros. Anggotanya terdiri dari kelompok petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh. Sekolah-sekolah politik berlokasi di 10 desa. Di samping itu, MAUPE juga mengadakan program 'melek huruf' dengan kelompok ibu buta aksara sebagai sasaran utamanya. Pada akhir program, para peserta diberi pelatihan keterampilan kerja seperti mendaur ulang, menjahit, dan keterampilan khusus lainnya dalam industri rumah tangga.

4.10. KOMNAS PEREMPUAN (KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN)

Alasan didirikannya Komnas Perempuan dengan tujuan memprakarsai advokasi kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan. Salah satu fokus perhatiannya berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada gejolak sosial di tahun 1998. Organisasi ini merupakan badan negara independen yang didirikan dalam rangka penegakan hak-hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dicanangkan melalui Keppres No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang kemudian diperkuat dengan Keppres No. 65 tahun 2005.

Mandat utama Komnas Perempuan berpusat pada korban kekerasan. Sejumlah kegiatan organisasi ini secara langsung mendukung keberlanjutan sumber penghidupan sasarannya pada saat dilakukan advokasi pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan. Komnas telah mengembangkan dana solidaritas yang disebut dengan 'pundi perempuan', yang merupakan wadah penggalangan dana atau donasi yang selanjutnya akan digunakan untuk penanganan kasus dengan kebutuhan darurat. Komnas Perempuan juga memperjuangkan isu kepentingan sumber penghidupan serta anggaran pemerintah, seperti pada kasus korban pembantaian 1965, Komnas Perempuan melakukan advokasi kepada pemerintah agar mengalokasikan sejumlah dana dari APBD untuk bantuan perlindungan bagi korban, termasuk dalam hal meningkatkan akses terhadap sumber penghidupan. Di Palu, korban pelanggaran HAM dihubungkan dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Kajian ini melibatkan dua LSM mitra Komnas Perempuan: HAPSARI dan SPEKHAM Solo. Bagian berikut secara singkat meliputi kegiatan sub-mitra dalam penghidupan atau pemberdayaan ekonomi.

4.10.1 HAPSARI

HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) didirikan pada tanggal 14 Maret 1990 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Organisasi ini berawal dari sebuah kelompok kajian dan kemudian berkembang menjadi sebuah LSM. Pada tahun 1997, organisasi tersebut berubah menjadi sebuah Yayasan, dan pada tahun 2004 berganti menjadi Serikat Perempuan Indonesia. Organisasi ini mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, dan berkomitmen memperkuat gerakan perempuan agar tercapainya politik yang adil di Indonesia, memberdayakan kapabilitas politik perempuan, serta melawan kemiskinan dan ketidakadilan terhadap perempuan. HAPSARI merupakan organisasi keanggotaan, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 2048 individu dan 10 organisasi anggota (SPI Serdang Bedagai, SPI Deli Serdang, SPI Tanah Karo, SPI Pekalongan, SPPN, SPB Bantul).

HAPSARI mempunyai tiga program utama:

- Advokasi penguatan kapasitas untuk menghapus kekerasan berbasis gender
- Membangun kepemimpinan perempuan daerah
- Peningkatan produktivitas demi keamanan ekonomi dan pangan

Peningkatan produktivitas demi keamanan ekonomi dan pangan diterapkan melalui berbagai strategi:

- Menghubungkan produksi kopi dan teh di Kulon Progo
- Diversifikasi sumber pangan untuk keamanan pangan dengan memanfaatkan buah bakau. Pelatihan dilakukan melalui kerja sama dengan sebuah universitas swasta di Medan
- Diversifikasi sumber penghidupan ekonomi berdasarkan sumber daya setempat, seperti di Mamuju, industri rumah tangga yang berkaitan dengan bidang perikanan diperkuat karena kekayaan sumber daya kelautan di wilayah tersebut
- Pendirian koperasi untuk mengurus kegiatan yang berhubungan dengan rantai nilai di Kulon Progo dan Deli Serdang
- *Credit union* (CU) untuk mobilisasi sumber keuangan masyarakat, guna menyediakan pinjaman yang dimanfaatkan untuk modal usaha kecil produktif

Tantangan

Selama ini, CU dinilai kurang efektif karena ketidakpastian pendapatan peserta. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh turunnya harga produk pertanian seperti minyak sawit secara drastis. Modal keuangan untuk diversifikasi sumber penghidupan industri rumah tangga terbatas karena kurangnya akses terhadap jasa layanan kredit. Hal tersebut mengakibatkan sering tidak menentunya usaha kecil mikro, ketidakpastian kuantitas, serta rendahnya kualitas produksi. Banyak kegiatan usaha kecil yang bersifat informal dan sulit bersaing di pasar terbuka. Kesulitan juga dialami anggota dalam mendaftarkan izin usaha, di mana prosesnya terbilang rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

4.10.2 SPEKHAM SOLO

SPEKHAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan di Solo pada tanggal 20 November 1998. Organisasi ini berkomitmen berkontribusi dalam proses perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat dengan sudut pandang gender, HAM, pluralisme, dan lingkungan hidup. Tiga strategi utama digunakan dalam mengorganisir rakyat miskin; pendidikan kritis analitis untuk mengubah cara pikir, advokasi pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan HAM.

SPEKHAM mengutamakan kerjanya dalam tiga program inti: (1) kesehatan masyarakat; (2) advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) sumber penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2006, mereka mengembangkan lebih banyak strategi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, yang sebelumnya terbatas pada: advokasi, layanan paralegal dan konseling, serta kampanye dan peningkatan kesadaran, kini menjadi strategi yang lebih menyeluruh dengan menambahkan satu bagian yang memusatkan perhatian pada sumber penghidupan yang berkelanjutan. Organisasi menyadari bahwa isu gender memiliki kaitan erat dengan isu-isu sosial, ekonomi dan politik. Kemiskinan adalah salah satu sebab tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan reproduksi. SPEKHAM kemudian berkomitmen untuk menangani pemenuhan kebutuhan mendasar dalam

masyarakat. Mereka mengorganisir kaum miskin kota dan desa serta kelompok-kelompok rentan.

SPEKHAM memilih wilayah kerja mereka berdasarkan beberapa kriteria, termasuk di antaranya: miskin, terpencil, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kesehatan reproduksi, daerah pascabencana dan faktor sumber daya alam. Salah satu pendekatan yang dianggap penting oleh SPEKHAM adalah penggunaan PRA (*Participatory Rural Appraisal*—Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan) untuk menilai potensi wilayah suatu desa. Diskusi diadakan dengan masyarakat untuk memutuskan kegiatan produktif berdasarkan analisis dan pemetaan wilayah. Di samping itu, SPEKHAM mengadakan analisis gender dan analisis rantai nilai untuk memetakan peluang pasar. SPEKHAM juga mengkoordinasi Kemitraan antara Pemerintah-Swasta dengan melibatkan para *stakeholder* di bidang pemerintahan dan swasta. Saat berlangsungnya proses pemetaan, para ahli teknis dari sejumlah badan pertanian memberi masukan, termasuk pendampingan teknis pelaksanaan dan pemberian benih serta pupuk. Perusahaan-perusahaan di sektor swasta selanjutnya bersedia menerima hasil pertanian dari para petani berdasarkan kesepakatan ini, beberapa kelompok secara konsisten telah memasok beberapa komoditas seperti serih wangi, jahe dan pepaya ke perusahaan (CV. Agro Buana).

Program Ekonomi di wilayah perkotaan

SPEKHAM mengurus lima kelompok perempuan di Solo, masing-masing kelompok terdiri dari 15-30 anggota. Perempuan yang tergabung dalam kelompok ini masuk dalam kategori miskin atau merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang memiliki usaha kecil. Diversifikasi pendapatan dan pemberian bantuan akses keuangan merupakan strategi kunci untuk mengatasi masalah gender dan kemiskinan. Di bawah ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan di wilayah perkotaan:

- Memanfaatkan tanah yang terbatas untuk menanam sayuran dan tanaman obat.
- “Bank Sampah”—kelompok perempuan membuka sebuah tempat penerimaan sampah yang sudah dipilah dan kemudian didaur ulang untuk dijual. Keuntungan yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam kas kelompok.
- Keterampilan Kerja—pembuatan bordir, batik, dan makanan kecil.
- Koperasi—meskipun belum terdaftar, kelompok telah mengembangkan struktur dan mekanismenya. Salah satu kelompok, yaitu “Joyosuran” mempunyai aset yang berjumlah lebih dari 9 juta rupiah.
- Program kewirausahaan (kongsi/usaha bersama, pameran).

Program Ekonomi di wilayah pedesaan

Tujuh kelompok perempuan diorganisir oleh SPEKHAM di tiga kabupaten (Klaten, Boyolali dan Brebes). Program pertanian dan peternakan menjadi inisiatif utama dalam aspek sumber penghidupan bagi SPEKHAM dalam mengorganisir masyarakat, khususnya perempuan miskin. SPEKHAM mengadakan pemetaan dan survei pasar sebelum menentukan komoditas pertanian dan ternak. Program-program yang dilakukan di wilayah pedesaan termasuk:

- Budidaya tanaman tertentu: serai wangi (*citronella*), jahe dan pepaya
- Ternak: Kambing—mereka mempunyai program bernama Posyambing atau Posyandu Kambing yang diadakan sebulan sekali. Kegiatan yang dilakukan antara lain mencatat berat kambing, pemeriksaan kesehatan dari paramedik, dan koperasi pakan ternak (mekanisme hampir sama dengan simpan pinjam, tetapi tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pakan ternak).
- Pengembangan BUMDES (badan usaha milik desa)
- *Demonstration plot* atau demplot—penyuluhan lapangan kepada petani untuk memperkenalkan suatu teknologi/metode baru dalam bercocok tanam

SPEKHAM menerapkan kemitraan para pemangku kepentingan (*multi stakeholders partnership*) untuk mendukung program-programnya, seperti halnya di desa Buara, Kabupaten Brebes, di mana pertanian bergantung pada sistem tadah hujan. Saat musim kemarau, para petani cenderung mengabaikan ladang mereka. Tingginya penggunaan pupuk kimia juga menyebabkan kerusakan tanah di wilayah tersebut. SPEKHAM mengorganisir empat kelompok (terutama perempuan) untuk mengoptimalkan pertanian guna meningkatkan pendapatan kelompok. SPEKHAM bekerja sama dengan banyak *stakeholder* dalam seluruh proses tersebut, yaitu mulai dari pemetaan, input, penanaman, hingga proses pemasaran. Seluruh proses tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Balai Pertanian dan perusahaan swasta (CV. Agro Buana). Jenis tanaman yang dipilih sebagai percontohan adalah budidaya serai wangi dan jahe, karena tanaman tersebut tidak memerlukan banyak air, dan para perempuan mampu menanamnya sendiri. Perjanjian dengan perusahaan swasta memberi akses pasar yang lebih luas, yang dalam hal ini CV. Agro Buana berkomitmen akan membeli serai dengan harga tidak kurang dari Rp6.000/kg. Dalam proses ini, SPEKHAM menggunakan analisis gender dan PRA, memastikan bahwa perempuan mendapatkan manfaat dari program tersebut dan juga turut berpartisipasi dalam proses-prosesnya. Meskipun telah selesai, keuntungan ekonomi dari program ini masih terus berjalan hingga saat ini.

5 HASIL DAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI / SUMBER PENGHIDUPAN

5.1. PENDAHULUAN

Bab ini membahas dampak dari program-program pemberdayaan ekonomi atau sumber penghidupan yang telah dilaksanakan oleh para mitra dan sub-mitra MAMPU. Dampak di sini diartikan sebagai hasil jangka panjang dari intervensi yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pendapatan, modal sosial, kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan struktur sosial (aset kelembagaan) serta capaian dalam akumulasi pengetahuan, kapasitas kepemimpinan, dan kondisi kesehatan (modal manusia). Taylor dan Perezniето (2014) menyatakan bahwa hasil pemberdayaan bagi perempuan dapat berupa kemajuan ekonomi, kemampuan individu, kekuatan untuk membuat keputusan ekonomi, kemampuan berorganisasi, akses keuangan, serta akses pasar dan perbaikan kerangka regulasi.

Dalam hal intervensi oleh para mitra, survei menunjukkan bahwa lamanya waktu partisipasi penerima manfaat dalam inisiatif para mitra berbeda-beda. Jangka waktu keikutsertaan para penerima manfaat berkisar dari 1 tahun hingga lebih dari 5 tahun. 25% dari mereka telah ikut serta selama lebih dari 4 tahun, dan 15,7% ikut serta kurang dari satu tahun.¹⁶

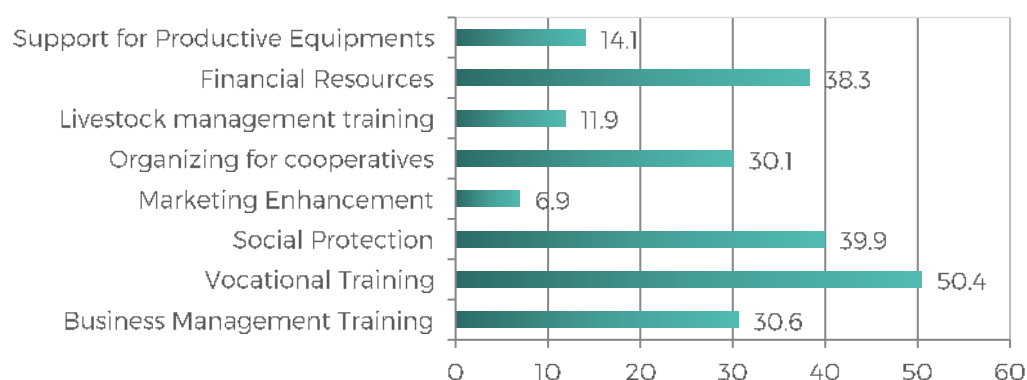
Bagian berikut ini akan menyajikan dampak intervensi sumber penghidupan. Dampaknya terwujud dalam akses terhadap modal keuangan, seperti pinjaman dan kredit, peningkatan pendapatan dan keanekaragaman sumber penghidupan. Karena pemberdayaan perempuan lebih dari sekadar mengembangkan modal keuangan dan peningkatan pendapatan, kajian ini mengidentifikasi dampak secara komprehensif, yang mencakup faktor-faktor lain, seperti pendapatan non-keuangan, yaitu: aset manusia, aset sosial, lembaga, dan juga capaian dalam memampukan lingkungan, sebagaimana diliput dalam bagian berikut.

¹⁶ Lihat Lembar Tambahan 3.8.

5.2. ASET KEUANGAN DAN SUMBER DAYA LAINNYA

Kegiatan yang diikuti oleh para penerima manfaat cukup beragam, yaitu sumber daya keuangan, pelatihan keterampilan kerja, pemberian alat produksi dan peningkatan pemasaran. Kegiatan yang paling sering dilakukan adalah pelatihan keterampilan kerja, yang menjangkau 50,4% dari peserta yang terlibat, diikuti oleh perlindungan sosial, yang menguntungkan bagi hampir 40% penerima manfaat, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 16 di bawah ini.

Gambar 16. Frekuensi Responden Mengikuti Program Sumber Penghidupan Mitra



N=258

Gambar di atas secara jelas menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% responden melaporkan bahwa mereka mengikuti program peningkatan pemasaran. Hasil DKT juga menunjukkan bahwa daya pemasaran masih rendah dan kebanyakan barang hasil produksi dipasarkan secara lokal tanpa adanya rencana pemasaran strategis. Untuk bantuan produktif, 14% penerima manfaat melaporkan bahwa mereka menerima bahan dan alat-alat produksi.

Modal keuangan merupakan inti dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi dan sumber penghidupan di Indonesia. Sebagaimana terlihat di Bab 4, banyak mitra yang telah terlibat dalam pemberdayaan ekonomi dengan memperkuat akses sasaran terhadap sumber daya keuangan, dan kegiatan yang mendatangkan penghasilan termasuk pemberian layanan jasa keuangan melalui lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro menawarkan akses bagi rakyat miskin terhadap layanan jasa keuangan dasar, seperti pinjaman, tabungan, layanan transfer uang, dan asuransi mikro (Hamada, 2010). Sumber daya dan keuntungan lain juga turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Keuangan mikro memungkinkan para penerima manfaat untuk lebih mandiri. Meningkatnya akses akan menghasilkan pendapatan yang terkendali dan meningkatnya kesejahteraan. Hal ini juga dapat memperbaiki status dan rasa percaya diri perempuan, yang kemudian menciptakan hubungan yang lebih baik di dalam rumah tangga (Mayoux, 2002). Survei tersebut menemukan bahwa para penerima manfaat mengalami berbagai dampak positif dalam hal modal sosial dan sumber daya lain sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 24. Pandangan Responden tentang Perubahan pada Modal Keuangan

Perubahan Modal Keuangan	Frekuensi
Kenaikan Pendapatan	58.5
Kenaikan Tabungan	48.1
Peningkatan Akses terhadap Pinjaman	48.1
Perbaikan Peralatan Produksi	17.8
Perbaikan Produksi Ternak	12.8
Kemajuan Usaha/Informasi Pasar	25.6

N=258

Sebagaimana digambarkan oleh Tabel 24, hampir 59% pendapatan responden meningkat berkat sumber penghidupan alternatif dan beranekaragam. Sayangnya, studi ini tidak menggali data terkait nilai kenaikan pendapatan para responden. Kesempatan untuk memajukan sumber penghidupan dapat diraih ketika perempuan memiliki akses terhadap pinjaman dan melakukan praktik menabung. Perlu dicatat, terdapat 48% responden melaporkan bahwa tabungan mereka meningkat dan begitu pula akses mereka terhadap pinjaman. Mobilisasi tabungan merupakan salah satu dampak strategis karena dapat digunakan sebagai modal untuk menyokong kegiatan lain yang mendatangkan penghasilan.

Informasi usaha juga merupakan hal penting. Survei mengungkapkan bahwa 25.6% responden mengatakan bahwa keikutsertaan dalam berbagai kegiatan telah meningkatkan akses mereka terhadap informasi dunia usaha. Akan tetapi, hanya terdapat 17.8% responden yang merasakan adanya peningkatan pada peralatan produksi mereka, sedangkan mayoritas (lebih dari 80%) mengatakan bahwa tidak ada perbaikan dalam peralatan dan perlengkapan produksi.

Akses terhadap layanan jasa keuangan resmi seperti bank, masih tergolong rendah. Saat perempuan memerlukan modal usaha, hanya terdapat 4.4% dari mereka yang dapat mengakses pinjaman dari bank. Layanan lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi, dalam hal ini menjadi penting karena 33.1% responden memperoleh dana pinjaman dari koperasi atau SHG saat mereka memerlukan modal uang untuk usaha mikro atau yang berkaitan dengan sumber penghidupan. Sebagaimana dapat dengan jelas dilihat pada Tabel 25, sumber daya dari keluarga besar masih sangat penting keberadaannya. Jika ada keperluan mendadak, misalnya karena ada anggota keluarga yang sakit, 46% responden meminta bantuan dari keluarga besar mereka. Begitu pula jika ada keperluan sewaktu-waktu, keluarga besar masih menjadi sumber bantuan utama.

Tabel 25. Sumber Pinjaman/Bantuan Keuangan

Sumber	Gagal Panen	Anggota Keluarga Sakit	Anggota Keluarga Meninggal	Anggota Keluarga Menikah	Keperluan Pendidikan	Keperluan Usaha/ Produktif
Keluarga Besar	21.8	46.4	39.5	36.3	24.2	13.3
Tetangga	5.6	10.9	14.1	8.9	3.2	0.8
Teman	0.8	2.4	2	2	1.6	1.6
Pejabat Desa	0.8	-	-	1.2	1.6	-
Majikan	-	0.4	0.8	-	0.4	-
Tukang Kredit	-	-	-	0.4	0.4	0.4
Pembeli/ Pemilik Toko	1.2	0.8	0.4	0.8	-	1.2
Bank	0.8	0.4	-	0.4	2	4.4
Pegadaian	0.8	0.8	-	0.4	4	3.2
Koperasi/SHG	9.3	3.2	0.4	4.8	21.4	33.1

N=258

Kajian ini menunjukkan bahwa 33.1% responden bergantung pada koperasi/credit union dan lembaga keuangan mikro saat mereka memerlukan pinjaman untuk modal usaha. Dua puluh satu koma empat persen responden juga telah mengakses pinjaman dari koperasi dan kelompok swabantu untuk membiayai pendidikan anak mereka. Meskipun demikian, survei ini menunjukkan hanya sedikit jumlah perempuan yang meminta pinjaman dari pejabat desa, pembeli, bank dan pegadaian.

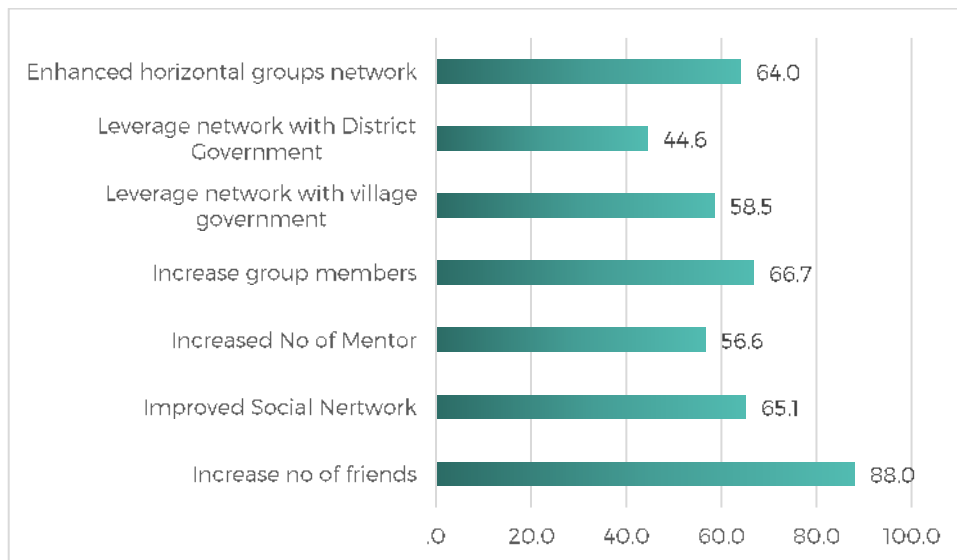
Pentingnya modal sosial dipertegas dengan kebergantungan masyarakat terhadapnya dalam hal sumber daya keuangan. Tabel di atas mencerminkan bahwa dalam hal bantuan keuangan, sumber jaminan terpenting berasal dari keluarga besar, tetangga dan koperasi. Bagian berikut membahas dampak dari keikutsertaan dalam modal sosial.

5.3. DAMPAK PADA MODAL SOSIAL

Pentingnya modal sosial dalam pembangunan telah terbukti secara luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak partisipasi dalam program ini lebih banyak dirasakan pada segi modal sosial dibandingkan dengan sisi lainnya. Modal sosial terwujud dalam keanggotaan kelompok, jaringan vertikal maupun horizontal, aksi bersama, solidaritas dan ikatan sosial (Jones dan Woolcock, 2007; Grootaert et al. 2004). Putnam (1993:167) mendefinisikan modal sosial sebagai "sifat-sifat organisasi sosial, seperti rasa percaya, norma dan jaringan kerja yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi koordinasi aksi." Modal sosial menghasilkan keuntungan ekonomi. Kajian

ini menemukan bahwa jaringan sosial dan keanggotaan kelompok memudahkan perempuan mendapatkan manfaat dari perilaku yang serupa. Sebagai contoh, ketika sebuah rumah tangga menghadapi kesulitan finansial, para tetangga dan anggota kelompok berperan dalam membantu dan menjadi faktor kunci bagi ketahanan sosial. Studi ini menemukan bahwa dampak pada modal sosial lebih tinggi daripada dampak lainnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Perubahan Modal Sosial para Penerima Manfaat Perempuan



N=258

Menurut grafik di atas, pada tahap terbentuknya ikatan (tingkat horisontal), 88% penerima manfaat perempuan melaporkan bahwa sejak ikut serta program, jumlah teman mereka bertambah. Anggota kelompok juga bertambah, sebagaimana diungkapkan oleh 66.7% dari responden. Masih pada tahap horisontal, 64% responden melaporkan bahwa jaringan kerja dengan organisasi atau kelompok serupa mengalami peningkatan setelah mereka ikut serta dalam program. Dalam konteks yang lebih luas, menurut 56% responden, mentor/penasihat berhasil membantu mereka dalam memecahkan masalah, termasuk juga memajukan sumber penghidupan. Keterikatan dengan lembaga vertikal juga membaik, di mana 58% mengatakan bahwa hubungan mereka dengan pemerintah desa menjadi lebih baik, dan 44% merasakan jaringan kerja yang lebih baik dengan pemerintah daerah atau penyedia jasa lainnya (44.6%). Berdasarkan penemuan tersebut, dapat dikatakan bahwa keterikatan (*connectedness*) merupakan kunci dalam proses negosiasi, penawaran dan penuntutan hak. Oleh karena itu, modal sosial berkontribusi terhadap kemampuan menggerakkan lembaga sebagaimana pembahasan berikut ini.

5.4. DAMPAK TERHADAP ASET MANUSIA (KEKUATAN DI DALAM)

Yang dimaksud dengan aset manusia adalah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Aset tersebut antara lain termasuk tenaga kerja, kondisi kesehatan, pendidikan dan tingkat percaya diri seseorang. Akses terhadap layanan kesehatan merupakan hal penting dalam kegiatan ekonomi. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, perempuan akan kesulitan melakukan kegiatan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan akan secara tidak langsung berkontribusi terhadap kerja produktif. Sejauh ini, mitra MAMPU telah memfasilitasi layanan kesehatan, khususnya terkait kesehatan reproduksi, termasuk melalui edukasi kesehatan dan langkah preventif seperti pap smear. Meskipun akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik bukan merupakan satu-satunya hasil upaya mitra, survei ini menyajikan pandangan para responden mengenai input tersebut. Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 25, hampir 70% responden melaporkan bahwa akses layanan kesehatan telah membaik.

Tabel 26. Pandangan Responden tentang Aset Manusia

Aset Manusia	Frekuensi
Peningkatan Akses Layanan Informasi dan Perawatan Kesehatan	69.8
Peningkatan Pengetahuan dan Kesempatan Pendidikan	75.6
Peningkatan Kesempatan untuk Pendidikan Lingkungan Hidup	38.0
Peningkatan Keterampilan Konservasi Lingkungan Hidup	40.3
Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Hitung	51.9
Peningkatan Pengetahuan tentang Hak-Hak Hukum dan HAM	62.8
Peningkatan Keterampilan yang Terkait dengan Pekerjaan	40.7
Peningkatan Rasa Percaya Diri	80.2

N=258

Berkaitan dengan akses layanan kesehatan, data kualitatif dari survei ini mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan informasi dan perawatan kesehatan termasuk hal-hal berikut:

- Lebih mudahnya akses terhadap perawatan dan pemeriksaan kesehatan;
- Kesempatan edukasi kesehatan, termasuk pengenalan kepada penyakit kanker, pap smear, dan IVA;
- Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;

- Informasi tentang asuransi kesehatan, khususnya mengenai akses BPJS.

Dari segi pendidikan, 75,6% penerima manfaat menyatakan bahwa keikutsertaan dalam program turut berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan kesempatan pendidikan, dan 52% melaporkan bahwa kemampuan baca tulis hitung mereka juga meningkat. Indikator tersebut juga mencakup kesempatan pendidikan bagi anak, motivasi para peserta/anggota untuk menuntut ilmu, dan berbagai macam bentuk pelatihan teknis yang diikuti oleh para peserta.

Sayangnya, hanya 38% dari mereka yang melaporkan adanya peningkatan pada pengetahuan terkait lingkungan hidup, dan pada jumlah serupa, peserta melaporkan adanya peningkatan dalam keterampilan konservasi lingkungan hidup (40% responden). Salah satu program yang diusung oleh KPI adalah daur ulang sampah, contohnya di Kendal, di mana mereka memanfaatkan dan menggunakan kembali material sampah seperti plastik, besi dan kertas. Para anggota keluarga dilatih untuk membedakan sampah, termasuk memilah bahan organik. Perempuan terlibat dalam pembuatan cinderamata, daur ulang kertas dan pembuatan pupuk organik. Meskipun keuntungannya tidak besar, uang hasil kerja biasanya ditabung sehingga di akhir tahun para peserta perempuan mempunyai simpanan uang lebih.

Dampak dengan frekuensi tertinggi ialah peningkatan rasa percaya diri. Survei ini menemukan bahwa 80% responden melaporkan bahwa keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri mereka. Rasa percaya diri sangat penting bagi perempuan, yang juga berpengaruh terhadap aset-aset lainnya, seperti aset kelembagaan. Tingkat percaya diri juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, termasuk dalam pengelolaan usaha.

Hal ini juga tampak pada hasil DKT, seperti yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, di mana terungkap bahwa:

"Salah satu dampak yang sangat penting adalah bahwa para penerima manfaat menjadi lebih kritis dan percaya diri dalam mengungkapkan kepentingan mereka dalam berbagai forum desa. Saat ada pertemuan dengan para pembuat kebijakan, perempuan lebih aktif dari pada laki-laki, dan mereka aktif dalam mengutarakan kepentingan mereka. Begitu pula di Parepare, lebih banyak perempuan didorong untuk bersaing dengan laki-laki dalam pemilihan pemimpin dusun"

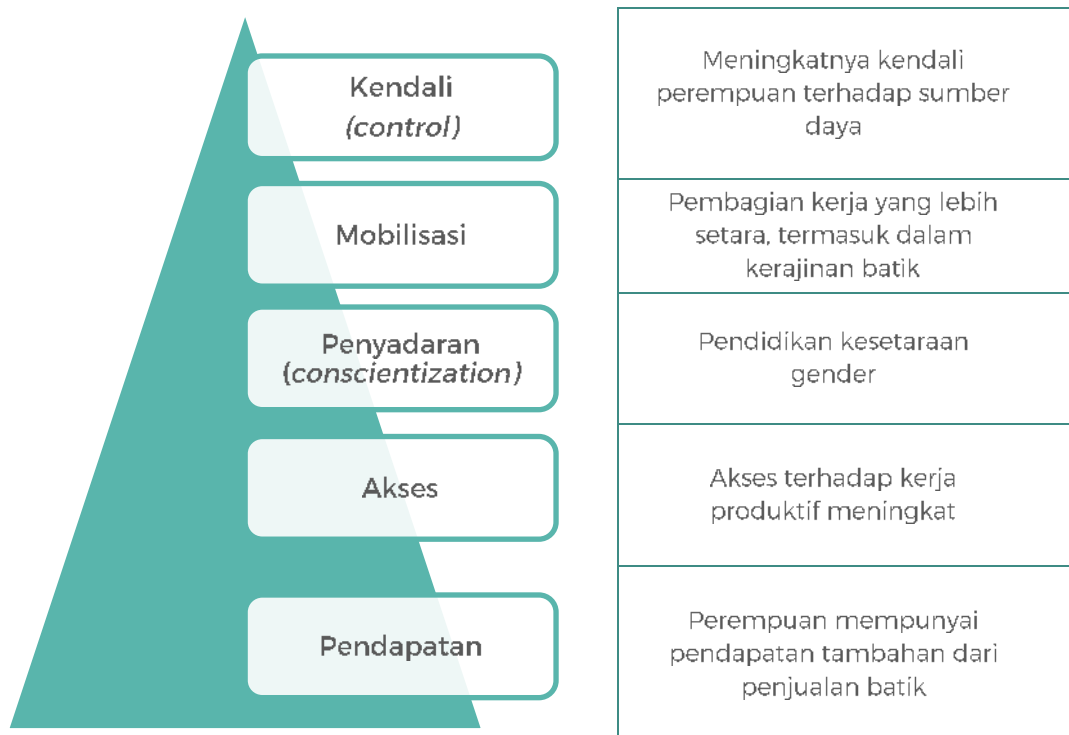
(DKT dengan LP2EM, Agustus 2015).

Rasa percaya diri didapatkan melalui proses penyadaran (*conscientization*), peningkatan kesadaran kritis (*critical awareness*) dan pemberdayaan kelompok. Rasa percaya diri dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan mengenai hak asasi manusia, yang diakui oleh 62,8% responden. Rasa percaya diri dan harga diri memungkinkan perempuan dan lembaga-lembaga terkait untuk melawan ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat serta memperjuangkan hak-hak hukum.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ditemukan 40% perempuan melaporkan peningkatan dalam keterampilan kerja, yang memungkinkan mereka memiliki pekerjaan atau sumber penghidupan yang beragam dan juga memajukannya. Pendidikan mampu menghasilkan peningkatan akses dan kendali atas sumber daya, dan juga memiliki hubungan yang jelas dengan pendapatan, sebagaimana kasus

Kerajinan Batik di Cipering. Pelatihan keterampilan sumber penghidupan telah meluas pada hal-hal lain, termasuk dalam hal pendapatan dan kendali atas sumber daya. Penemuan ini sesuai dengan kerangka Pemberdayaan Longwe, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 18. Dampak keterlibatan KPI dalam Kerajinan Batik di Cipering, Kendal, Jawa Tengah



Sumber: Data Lapangan, 2015.

Peningkatan kesadaran juga memotivasi perempuan untuk melakukan kerja produktif, di mana perempuan mempunyai kebebasan untuk melibatkan diri dalam pekerjaannya. Hasil yang diperoleh adalah adanya perbaikan pada modal keuangan, seperti pada pendapatan dan sumber daya lain, sebagaimana dibahas dalam bagian berikut.

5.5. DAMPAK TERHADAP ASET KELEMBAGAAN (KEKUATAN UNTUK)

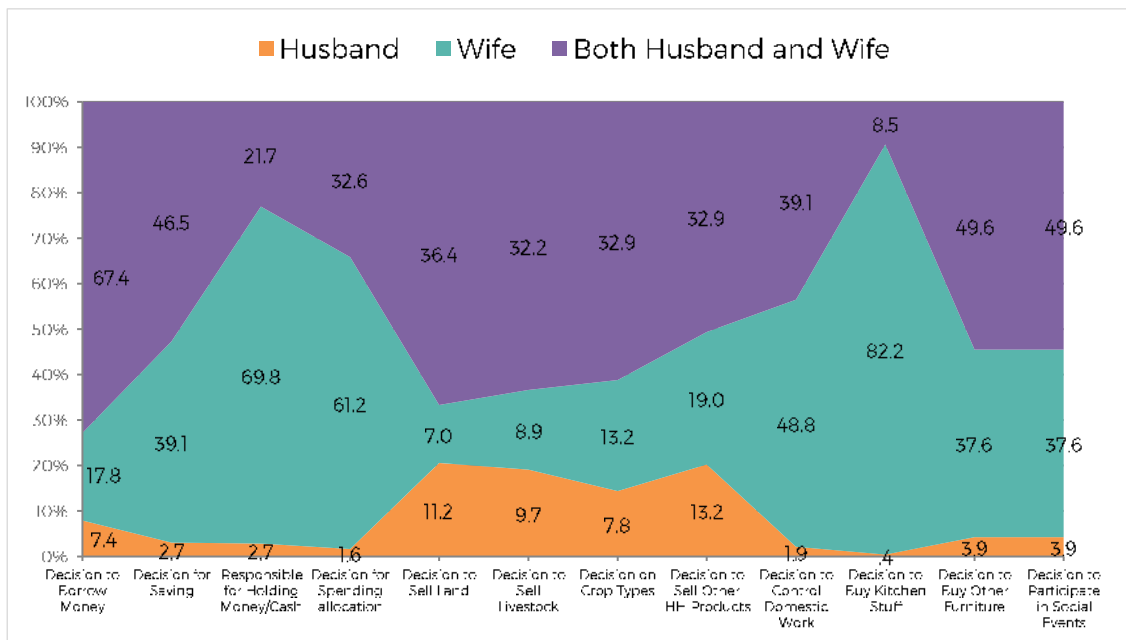
Kemampuan untuk menggerakkan lembaga merupakan hal penting dalam melawan hubungan kekuasaan yang menghambat keikutsertaan perempuan dalam proses sosial dan pembangunan. Pengetahuan dan kesadaran perempuan yang membangun cara pikir subjektif dalam menggunakan kekuasaan merupakan aspek penting dalam perubahan. Kemampuan perempuan untuk bertindak akan meningkat dengan adanya kendali yang lebih baik atas aspek-aspek kunci dalam sumber penghidupan mereka (kekuatan untuk). Kemampuan perempuan diperkuat secara kolektif melalui kelompok,

credit union dan jaringan kerja yang lebih kuat. Kapasitas lembaga berkaitan dengan daya pengaruh perubahan sosial yang lebih luas, biasanya diwujudkan melalui aksi bersama (*collective action*) dalam memperjuangkan kesetaraan status dan identitas perempuan serta menegosiasikan kembali hubungan, dan juga peran perempuan dalam masyarakat dan dalam proses pembuatan keputusan (Kabeer, 2008; 2012).

Di bidang ini, program-program yang dilaksanakan telah memberikan dampak terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan, termasuk di dalam rumah tangga, proses pembuatan kebijakan desa dan keikutsertaan dalam kehidupan sosial-politik di lingkup yang lebih luas. Para mitra telah terlibat dalam pemberdayaan perempuan untuk turut serta dalam proses kebijakan. Meningkatnya kemampuan untuk bertindak berdampak pada perempuan mempunyai lebih banyak hal yang dipertaruhkan dalam pembuatan kebijakan, baik di dalam maupun luar rumah tangga (ranah publik dan masyarakat).

Dalam hal pembuatan keputusan dalam rumah tangga, survei ini mencatat bahwa hanya terdapat sedikit responden yang mengakui bahwa suami mereka adalah satu-satunya orang yang membuat keputusan. Mayoritas keputusan dibuat dengan musyawarah antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah lebih mampu membuat dan memengaruhi keputusan dalam rumah tangga. Grafik di bawah ini menggambarkan keputusan dalam rumah tangga terkait sumber penghidupan, pembelian barang rumah tangga dan penjualan aset.

Gambar 19. Pembuatan Keputusan dalam Rumah Tangga



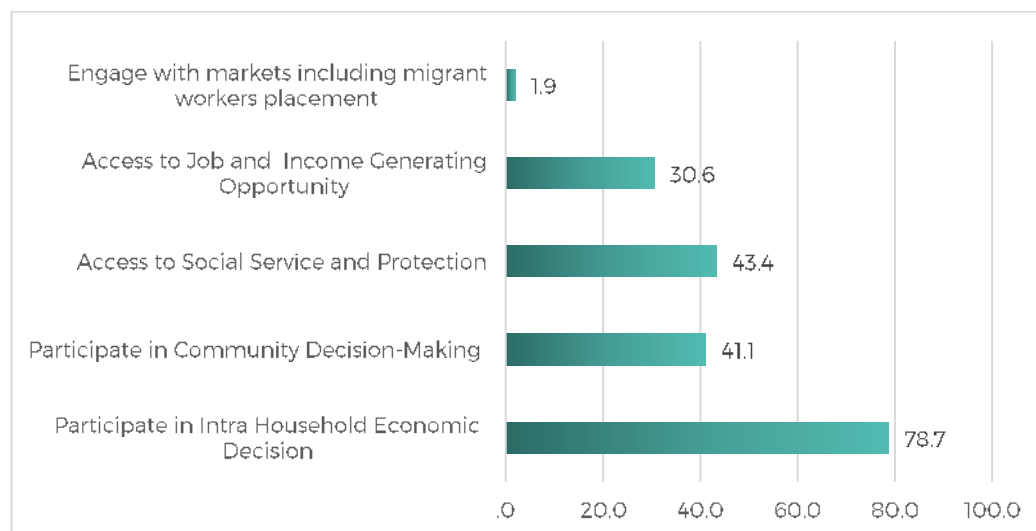
N=258

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan dominasi peran perempuan dalam pembelian perabot rumah tangga. Hal yang sama juga berlaku dalam hal pekerjaan rumah tangga yang cenderung menjadi tanggung jawab

perempuan. Dalam hal keputusan tentang kredit, 67,4% responden mengatakan bahwa suami dan istri mempunyai suara yang sama dalam pembuatan keputusan tentang kredit. Bagi keluarga yang menjalankan sumber penghidupan di bidang pertanian, 32,9% responden melaporkan bahwa keputusan dibuat oleh istri dan suami secara bersama, 9,7% diputuskan oleh laki-laki saja sedangkan 13,2% responden punya kendali atas keputusan tentang jenis tanaman yang akan ditanam. Kecenderungan ini serupa dengan penjualan ternak, di mana 32,2% keputusan diambil bersama oleh istri dan suami. Berkaitan dengan kegiatan sosial, 50% responden mengatakan bahwa suami dan istri keduanya setara dalam pengambilan keputusan. Keputusan atas keikutsertaan rumah tangga dalam acara atau kejadian sosial seperti pernikahan dan kematian diputuskan secara seimbang oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan juga mempunyai kendali yang lebih kuat atas pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Dalam 61% kasus yang terjadi para responden menyatakan bahwa dalam rumah tangga, perempuan lah yang memutuskan pengeluaran rumah tangga.

Dampak dari peningkatan lembaga melampaui kehidupan dalam rumah tangga, di mana para perempuan penerima manfaat melaporkan bahwa keikutsertaan mereka meningkat dalam berbagai forum pembuatan keputusan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 20. Indikator Dampak Lembaga



N=258

Data di atas menggambarkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam urusan masyarakat yang lebih luas di desa. Kajian ini menunjukkan bahwa 78,7% perempuan percaya bahwa posisi mereka dalam pembuatan keputusan di rumah tangga telah meningkat. Dalam hal pembuatan keputusan masyarakat, 41% responden melaporkan bahwa mereka telah turut serta dalam proses pembuatan keputusan masyarakat, dan 43,4% melaporkan bahwa akses mereka terhadap perlindungan sosial telah meningkat.

Keterlibatan dalam pembuatan keputusan masyarakat menunjukkan bahwa lembaga perempuan sebagai aset dalam pembuatan keputusan masyarakat telah diperkuat.

Perempuan mulai terlibat dalam forum pembangunan desa dan membicarakan kepentingan mereka setelah berpartisipasi dalam program para mitra, sebagaimana tercatat dalam DKT di Pangkep di bawah ini.

"Para perempuan telah turut berpartisipasi di desa, mereka mengikuti musrenbangdes di dusun dan bahkan di tingkat kabupaten. Salah satu permintaan yang diajukan adalah pengadaan sebuah ambulans laut guna meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil."

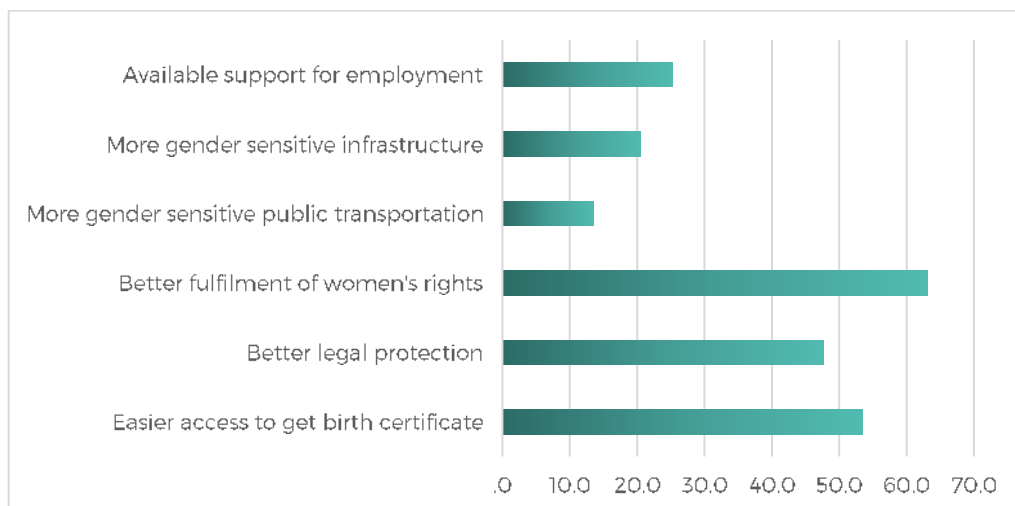
(DKT dengan YPKM, Agustus 2015).

Survei ini menunjukkan bahwa 40% perempuan telah turut serta dalam Musrenbangdes, meskipun angka non-partisipasinya masih tinggi (lebih dari 50%), hal ini menunjukkan adanya perubahan strategis dalam kegiatan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Tingkat keikutsertaan perempuan dalam pembahasan anggaran desa lebih rendah daripada dalam musrenbangdes. Hanya 15,5% responden melaporkan bahwa mereka pernah turut serta dalam pertemuan penganggaran desa, dan pola serupa juga tampak pada keikutsertaan dalam pembuatan regulasi desa.

5.6 LINGKUNGAN PENDUKUNG DAN PERBAIKAN KERANGKA HUKUM

Rencana Aksi Beijing (The Beijing Platform for Action - BPFA) secara tegas mengungkapkan pentingnya peran lingkungan pendukung (*enabling environment*) yang kondusif dalam pengentasan kemiskinan. Dukungan yang diperlukan antara lain akses terhadap layanan jasa hukum gratis atau berbiaya rendah, termasuk literasi hukum, sistem perlindungan sosial, maupun jaring pengaman sosial yang layak (UN, 2003). Berkaitan dengan hal ini, survei mendata beberapa indikasi positif akan adanya lingkungan pendukung yang kondusif setelah ikut serta dalam program-program para mitra, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 21 di bawah ini.

Gambar 21. Dampak Aset Pendukung



N=258

Sebagaimana terlihat pada Gambar 21, 53.5% responden setuju bahwa sekarang ini akses untuk mendapatkan akta lahir lebih mudah. Berkaitan dengan perlindungan hukum, 47.7% mengakui perlindungan hukum yang lebih baik dan 63.2% menyatakan adanya perbaikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Akan tetapi, hanya 25.2% responden melaporkan adanya bantuan dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tanggapan positif paling rendah berkaitan dengan transportasi peka gender, di mana hanya 13.6% melaporkan perbaikan terhadap kepekaan gender dalam kebijakan dan penerapan transportasi umum.

6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan temuan-temuan utama yang didapat dari studi, yang terdiri dari karakteristik sumber penghidupan perempuan penerima manfaat, strategi keterlibatan para mitra dan saran atau masukan untuk program atau intervensi mendatang.

6.1. KARAKTERISTIK SUMBER PENGHIDUPAN PEREMPUAN PENERIMA MANFAAT MITRA/SUB-MITRA MAMPU

Sumber Penghidupan Perempuan dan Sektor Informal

Sumber penghidupan perempuan penerima manfaat MAMPU secara tidak merata masih terbebani oleh kemiskinan, dan sumber penghidupan yang kurang terjamin akibat adanya hambatan sosial dan struktural. Sumber penghidupan perempuan kebanyakan termarginalisasi ke dalam lingkup sektor informal. Para penerima manfaat cenderung memilih bekerja secara fleksibel/ yang memberikan keleluasaan kepada pekerjaannya, seperti pekerjaan sebagai pedagang kecil, petani, atau sebagai pekerja industri rumah tangga. Kurangnya keleluasaan pada pekerjaan formal menghambat akses perempuan terhadap pekerjaan yang lebih terjamin dengan imbalan yang lebih baik.

Hambatan pada kesetaraan akses dan kendali atas sumber daya

Marginalisasi pekerjaan dan sumber penghidupan berkaitan dengan adanya hambatan akses terhadap sumber daya, termasuk kemiskinan waktu sebagai akibat dari ketidaksetaraan pembagian kerja dalam rumah tangga. Persepsi akan peranan perempuan dan laki-laki dalam hubungannya dengan pekerjaan rumah dan kegiatan produktif mengaitkan tanggung jawab perempuan dengan pekerjaan rumah tangga dan tugas mengasuh, sedangkan laki-laki dipandang lebih bertanggung jawab pada pekerjaan produktif dan berorientasi pasar. Oleh karena itu, perempuan membawa beban kerja dan tanggungan yang berlipat, sedangkan jerih payah mereka tidak cukup diakui di bidang pertanian. Pada tingkat rumah tangga, perempuan mempunyai posisi tawar lebih rendah dibanding laki-laki dalam pembuatan keputusan politik dan ekonomi. Perempuan masih memerlukan izin suami untuk pergi ke luar rumah dan membutuhkan tanda tangan serta jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Diskriminasi gender juga tampak dalam hal pembuatan keputusan di tingkat masyarakat. Pada tingkat masyarakat, sistem warisan memperlakukan perempuan secara tidak setara dalam hal akses dan kendali atas sumber daya produktif. Akses terhadap layanan pelatihan dan penyuluhan bagi perempuan juga lebih sempit. Layanan penyuluhan masih didominasi laki-laki, dan berdampak pada kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan sumber penghidupan mereka di bidang pertanian. Begitu pula halnya dalam akses terhadap kredit yang masih rendah, khususnya dalam mengakses sistem perbankan. Para penerima manfaat melaporkan bahwa mereka sering kekurangan layanan jasa keuangan untuk menyokong sumber penghidupan mereka. Perempuan menghadapi banyak hambatan besar, termasuk sulitnya mengakses kredit karena perempuan tidak memiliki jaminan.

Hal ini menyebabkan perempuan memobilisasi sumber daya mereka sendiri melalui kelompok simpan pinjam dan fasilitas kredit usaha kecil mikro, yang diperkuat oleh organisasi mitra.

Mayoritas sumber penghidupan perempuan di Indonesia merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk bertahan hidup; meskipun mereka memasarkan produk mereka, pendapatannya terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar. Mata pencaharian kaum perempuan di berbagai lokasi penelitian, umumnya, memiliki daya produktivitas rendah. Lebih dari 20% bekerja sebagai pedagang kecil, sebagian bekerja di bidang pertanian (16,25%), dan sebagian kecil di bidang perikanan (4,17%). Perempuan berhasil melakukan diversifikasi sumber penghidupan dengan melakukan pekerjaan industri rumah tangga, namun kegiatan tersebut biasanya berskala sangat kecil. Sebagian besar produksinya dilakukan secara manual, dengan akses penggunaan teknologi sederhana dan pemasaran yang terbatas, penggunaan kemasan kualitas rendah serta keterampilan kerja yang juga terbatas. Sebagian besar (41,5%) pendapatan rumah tangga responden berada di bawah 1 juta rupiah per bulan. Sekitar 38% responden mempunyai pendapatan di antara 1 dan 2 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, survei kami menunjukkan bahwa sekitar 6 persen responden menghasilkan lebih dari 3 juta rupiah per bulan. Sumber penghidupan di bidang pertanian dianggap berskala kecil. Dengan tanah kurang dari 1 hektar, para petani, termasuk petani perempuan, terlibat dalam budidaya padi, kakao, hortikultura dan tumbuhan perennial. Sumber penghidupan di bidang pertanian memiliki sifat harga produk yang rendah dan tidak stabil, yang juga rentan terhadap pengaruh dari perubahan iklim dan risiko bencana.

Berkaitan dengan pendidikan, 35,89% responden menyelesaikan sekolah menengah atas, dan 26,21% menyelesaikan sekolah menengah pertama. Proporsi responden yang lulus universitas cukup signifikan, sedangkan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sama sekali hanya sejumlah 1,6 persen. Kebanyakan keterampilan kerja yang mereka dapatkan dipelajari di luar sekolah, termasuk melalui keikutsertaan kegiatan dalam program LSM/Mitra.

Kekurangan bahan pangan merupakan hal biasa bagi para penerima manfaat. Bagi petani, kesulitan bahan pangan secara umum terjadi pada jeda antara masa panen. Bagi nelayan, masa kesulitan bahan pangan dapat berlangsung dalam periode waktu lebih lama. Survei dalam studi ini mengungkapkan bahwa meningkatnya harga makanan dilaporkan oleh 23,6% responden, dan 24,2% melaporkan bahwa mereka mengalami kekurangan air dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam, melalui survey ini ditemukan bahwa 14% responden pernah mengalami gempa dalam 12 bulan terakhir, dan 13,7% pernah terkena dampak banjir. Dari survei tersebut juga ditemukan bahwa 45% responden mengalami syok karena sakit/wafatnya anggota keluarga.

Cara para penerima manfaat dalam mengatasi kesulitan finansial dalam hidup mereka juga cukup beragam. Mengurangi biaya pengeluaran sekunder merupakan cara utama, dengan 75,4% responden melaporkan bahwa mereka menggunakan strategi ini. Strategi kedua yang paling sering dilakukan adalah dengan meminjam uang atau membeli bahan makanan dengan cara kredit (66,1%). Hampir 34% responden, dalam 12 bulan terakhir, menjual aset non-produktif yang mereka miliki, seperti perhiasan, saat terjadi krisis.

Akses terhadap Layanan Pelatihan, Penyuluhan dan Kredit

Terdapat berbagai tingkatan akses terhadap layanan pelatihan dan penyuluhan. Layanan penyuluhan masih didominasi oleh kaum laki-laki, yang berakibat pada semakin kecilnya peluang perempuan untuk meningkatkan keterampilan sumber penghidupan mereka di bidang pertanian. Akses terhadap kredit juga masih terbelah rendah, khususnya terhadap sistem perbankan resmi. Perempuan menghadapi hambatan besar dalam mengakses kredit karena tidak adanya jaminan, yang menuntut mereka untuk memobilisasi sumber daya mereka sendiri melalui kelompok simpan pinjam, dan fasilitas kredit mikro yang dijalankan oleh organisasi mitra. Organisasi mitra telah memperkuat akses terhadap sumber daya keuangan melalui *credit union* atau program kredit mikro, yang menunjang inisiatif simpan pinjam anggota masyarakat.

6.2. KETERLIBATAN MITRA/SUB-MITRA MAMPU

MAMPU bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan Indonesia, LSM dan organisasi perempuan berbasis keagamaan. Berbagai strategi keterlibatan para mitra antara lain sebagai berikut:

Membangun Kemampuan Organisasional dan Modal Sosial Perempuan Penerima Manfaat

Semua Mitra dan Sub-Mitra terlibat dalam pengorganisasian kelompok. Para mitra memperkuat kapasitas organisasional perempuan melalui kelompok swabantu atau *self help group* (SHG), serikat dan koperasi untuk upaya di bidang ekonomi dan politik. Terdapat kelompok akar rumput bagi organisasi keanggotaan seperti PEKKA, KPI dan Aisyiyah. Untuk LSM seperti sub-mitra Komnas Perempuan (HAPSARI dan SPEKHAM); sub-mitra ILO MAMPU (BITRA dan MWPRI); Sub-mitra BaKTI (MAUPE, LP2EM, YKS) dan Anggota PERMAMPU (PESADA), telah memberdayakan para anggota masyarakat akar rumput untuk berasosiasi dalam Kelompok Swabantu, Organisasi Masyarakat, Serikat Pekerja, dan Kelompok Simpan Pinjam.

Meningkatkan Kesadaran Gender, Penyadaran (Conscientization) dan Pendidikan Kesadaran Kritis

Semua mitra terlibat dalam peningkatan kesadaran kritis yang diikuti dengan pendidikan kesadaran gender. Pendidikan kesadaran kritis membangun kesadaran yang diperlukan untuk mewujudkan terjadinya perubahan dalam hubungan gender. Mitra dan Sub-Mitra telah menjalankan inisiatif penyadaran (*conscientization*) guna mendidik penerima manfaat tentang ketidakadilan sosial dan ekonomi serta cara-cara untuk mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Hal ini berpengaruh dalam terbangunnya kemampuan perempuan untuk mempertanyakan hubungan kekuasaan, menjadi lebih asertif dalam menyuarakan tuntutan akan hak-hak mereka dan melakukan negosiasi pembuatan keputusan secara inklusif di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Meningkatkan Kemampuan Organisasi dan Modal Sosial Perempuan Penerima Manfaat

Rangkaian strategi terpenting kedua yang digunakan oleh para mitra adalah mengorganisir perempuan di tingkat akar rumput melalui kelompok swabantu (SHG), koperasi, *credit union* dan kelompok perempuan. Strategi ini dijalankan dengan memfasilitasi pembelajaran melalui pertemuan kelompok rutin, kegiatan simpan pinjam, diskusi tentang kegiatan produktif dan isu-isu sosio-ekonomi lainnya. Para mitra juga terlibat dalam peningkatan jaringan kerja kelompok demi memperkuat keikutsertaan dalam pembuatan kebijakan. SHG dan organisasi perempuan akar rumput juga menyatukan suara perempuan dalam masyarakat atau pembuatan keputusan desa, meskipun sering kali metode tersebut masih belum terakomodasi secara sistematis.

Diversifikasi Sumber Penghidupan, Bantuan Peralatan Produktif dan Pelatihan Vokasional

Diversifikasi sumber penghidupan dilakukan melalui pengadaan ternak, termasuk pelatihan pengelolaan ternak. Meskipun tidak pada tingkatan yang sama dengan kegiatan lain, para mitra aktif dalam pemberian peralatan dan perlengkapan produksi, seperti untuk kegiatan usaha mikro atau industri rumah tangga. Namun, tidak semua organisasi menyediakan bantuan langsung terhadap sumber penghidupan seperti peralatan, perlengkapan, benih, dan bantuan lain yang serupa. Inisiatif MAMPU tidak menyisihkan anggaran khusus untuk bantuan seperti benih, ternak, atau peralatan produksi. Para mitra terlibat dalam pemberian pelatihan dan pendidikan bagi para penerima manfaat guna mengembangkan keterampilan sumber penghidupan mereka, seperti untuk industri rumah tangga, pengolahan pascapanen dan sumber penghidupan ramah lingkungan misalnya: pertanian organik; kegiatan daur ulang. Semua mitra terlibat dalam hal ini, namun kebanyakan pelatihan tidak terus berlanjut, dan tidak terlaksana secara sistematis sehingga para peserta tidak dapat mengembangkan kemampuan wirausahanya. Para mitra belum memprioritaskan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha (*business management*) para perempuan penerima manfaat.

Meningkatkan akses terhadap sumber keuangan

Organisasi-organisasi mitra terlibat dalam berbagai macam pemberian layanan mulai dari kredit mikro, mobilisasi simpan pinjam dari sumber daya yang dikumpulkan secara internal, hingga pengembangan lembaga keuangan mikro. Modal keuangan merupakan salah satu intervensi strategis yang penting dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya kredit mikro dan pemberian pinjaman, akses terhadap modal produktif berhasil ditingkatkan. Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman atau kredit yang tersedia berskala kecil sehingga hanya mampu mendukung usaha mikro. Selain itu, tidak semua pemberian pinjaman dan kredit disertai oleh layanan pengembangan usaha, akibatnya mayoritas produksinya berskala kecil dan daya kompetitifnya cenderung rendah di pasar.

Perbaiki Pemasaran

Upaya peningkatan pemasaran selama ini belum diutamakan. Secara sporadis beberapa bantuan dalam hal pemasaran telah dilakukan, seperti saat ada acara di mana produk juga dipasarkan. PEKKA NTB telah menyediakan sejumlah tempat untuk koperasi, namun belum tersedia di semua lokasi kerjanya. Begitu pula HAPSARI yang terlibat

dalam penyaluran produk ke para anggota dan BITRA yang telah menjalankan toko organik. Tidak ada mitra yang memiliki keterampilan khusus dalam pemasaran.

Perlindungan Sosial

Semua mitra terlibat dalam advokasi perbaikan perlindungan sosial, dan beberapa mitra telah melakukan promosi “jaring pengaman” secara informal seperti “tabungan lebaran/idul fitri”. Para mitra menganjurkan para penerima manfaat agar mengakses program perlindungan sosial yang ada, seperti BPJS dan raskin. Akan tetapi, belum ada mitra yang terlibat dalam advokasi perlindungan sosial produktif. Modifikasi dari mekanisme perlindungan sosial yang ada seperti PKH dan raskin diperlukan untuk memadukan peningkatan kapasitas dan bantuan sumber penghidupan. Perlindungan sosial produktif merupakan hal yang secara strategis penting dalam pemberdayaan sumber penghidupan, karena bakal melindungi rakyat miskin yang produktif sembari membangun kapasitas mereka dalam menemukan sumber penghidupan yang produktif dan menguntungkan. Selain itu, belum ada mitra yang terlibat dalam advokasi kebijakan perlindungan sosial untuk menjamin kehilangan mata pencaharian, kegagalan panen atau kerusakan pada tanaman dan bentuk modal lain akibat bencana alam.

6.3. DAMPAK PROGRAM

Dampak program tampak pada adanya akses yang lebih baik terhadap modal keuangan, seperti akses terhadap pinjaman dan kredit, kenaikan pendapatan dan keanekaragaman sumber penghidupan. Karena dampak dari pada pemberdayaan perempuan melampaui masalah modal keuangan dan peningkatan pendapatan, kajian ini mengidentifikasi dampak yang terjadi secara lebih luas, yang termasuk aspek non-keuangan/pendapatan lain, yaitu: aset manusia, modal sosial, lembaga, dan juga terciptanya lingkungan pendukung yang kondusif. Para mitra berhasil meningkatkan kondisi kesehatan, kesadaran dan pengetahuan perempuan, yang membangun aset manusia (kekuatan di dalam) sebagai aspek kritis dari perubahan. Kapasitas perempuan ditingkatkan dengan adanya lebih banyak kendali atas aspek kunci sumber penghidupan mereka dengan tersedianya sumber daya keuangan dan sumber daya produktif lainnya (kekuatan untuk). Kapasitas perempuan diperkuat melalui aksi bersama (modal sosial) dengan adanya kelompok perempuan, *credit union* dan jaringan kerja yang lebih kuat (kekuatan dengan). Hal tersebut diikuti dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, yang berkaitan dengan kemampuan untuk memengaruhi perubahan sosial yang lebih besar, sering kali dilakukan sebagai bagian dari aksi bersama yang difasilitasi oleh Mitra/Sub-Mitra untuk memperjuangkan kesetaraan status perempuan, turut serta dalam pembuatan kebijakan termasuk melalui musrenbangdes, Peraturan Daerah, dan dalam proses negosiasi dalam rumah tangga (dengan suami). Kapasitas lembaga memberi sumbangsih pada kemampuan para penerima manfaat untuk melatih kekuatan tawar mereka guna melakukan negosiasi ulang atas hubungan mereka, sekaligus kemampuan mereka untuk turut serta secara setara dalam masyarakat dan pembuatan keputusan.

6.4. SARAN

Kajian ini mempunyai beberapa saran guna meningkatkan kemampuan MAMPU dalam menyokong sumber penghidupan dengan:

1. Melanjutkan Tindakan untuk Menangani Kebutuhan Strategis Gender

Meskipun terdapat beberapa capaian dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan sumber penghidupan, seperti akses dan kendali atas sumber daya produktif, beberapa tindakan strategis masih diperlukan untuk mencapai kesetaraan pada struktur sosial, politik dan ekonomi. Tindakan strategis perlu terus dilakukan untuk memengaruhi lingkup masyarakat yang lebih luas, para pembuat keputusan serta badan usaha untuk pengarusutamaan kesetaraan gender demi mencapai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan produksi dan Memperbaiki kualitas

Kebanyakan kegiatan sumber penghidupan yang diamati dalam kajian ini berskala kecil, mikro dan bersifat konvensional. Karena itu, kami sarankan agar melakukan gerakan-gerakan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Kami juga menyarankan agar program-program untuk menjadikan peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan sebagai prioritas. Seiring dengan hal ini, rencana usaha strategis sebaiknya dipromosikan kepada kelompok masyarakat guna membantu mereka dalam mengidentifikasi komoditas yang berpotensi, melakukan analisis pasar, serta memperbaiki kualitas produk.

3. Mengembangkan Kapasitas Organisasional Mitra dan Sub-Mitra

Organisasi mitra dan sub-mitra saat ini sangat didukung oleh pengetahuan para staf tentang isu-isu perempuan dan gender. Akan tetapi, para staf yang bertugas sebagai mentor dalam program masih kurang menguasai aspek-aspek teknis perihal sumber penghidupan penerima manfaat. Oleh karena itu, disarankan agar organisasi mitra memastikan staf tersebut layak untuk memberi tanggapan atau saran atas keperluan sumber penghidupan klien mereka. Dalam hal ini, diperlukan perekrutan staf dengan latar belakang teknis yang kuat atau kerja sama strategis dengan organisasi lain yang mempunyai kapasitas sesuai.

4. Melanjutkan Peningkatan Akses terhadap Layanan Jasa Keuangan

Pemenuhan kebutuhan keuangan perempuan merupakan hal yang sangat penting dan perlu diteruskan. Tindakan ini juga membutuhkan pendampingan dalam pelatihan pascapinjaman, khususnya bagi mitra yang hanya memusatkan perhatian pada *credit union*/kegiatan simpan pinjam. Disarankan pula agar kapasitas pengelolaan usaha ditingkatkan, termasuk bantuan non-keuangan seperti anjuran dalam pemasaran, komoditas, kualitas produksi dan menaikkan keuntungan agribisnis.

5. Meningkatkan Analisis Gender dan Rantai Nilai

Menyediakan kesempatan bagi para mitra dalam pengembangan kapasitas tentang analisis gender dan rantai nilai merupakan hal yang penting. Hal ini akan membuat mereka mampu mengidentifikasi kesempatan dan titik masuk strategis pada rantai nilai yang memenuhi kedua tujuan, yaitu daya saing dan kesetaraan gender. Sebelum Mitra dan Sub-Mitra terlibat dalam program wirausaha bersama dengan perempuan penerima manfaat yang mereka dampingi, sebaiknya dilakukan penelitian tentang jenis produk atau komoditas apa yang mampu mereka kelola, dan juga yang memiliki peluang paling baik di pasaran. Dengan mempertimbangkan kapasitas Mitra dan Sub-Mitra yang terbatas di bidang

pemasaran dan analisis rantai nilai, MAMPU dapat membuat pertimbangan untuk melibatkan sektor bisnis. Cara ini akan memberi mereka akses pada pengetahuan teknis dan mengidentifikasi inovasi yang berpotensi dalam rantai nilai, yang selanjutnya dapat memperkuat upaya mereka untuk memelihara kemandirian ekonomi perempuan.

6. Melakukan Advokasi Perlindungan Sosial untuk Risiko/Kehilangan Mata Pencaharian dan Perlindungan Sosial Produktif

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. sumber penghidupan para penerima manfaat sering kali terganggu oleh kegagalan panen, kehilangan ternak dan kerusakan tanaman.

Terdapat suatu kebutuhan strategis untuk melakukan advokasi dalam penancangan perlindungan sosial. Pemenuhan kebutuhan rakyat miskin produktif melalui pengembangan usaha dan sumber penghidupan dapat menjadi cara yang efektif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Bantuan sosial positif bertujuan mempromosikan sumber penghidupan yang berkelanjutan dan usaha skala kecil yang efektif. Oleh karena itu, studi ini menyarankan untuk menerapkan strategi ekonomi yang lebih bijak dan masuk akal, yaitu dengan mengubah penekanan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat pasif, protektif dan preventif, menjadi bantuan sosial yang cenderung berinvestasi pada dan meningkatkan kapasitas rakyat miskin untuk meraih sumber penghidupan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACILS (2010) Hak Dasar Perburuhan di Indonesia: Survey Pelanggaran di Sektor Formal. Jakarta: ACILS.
- Adams, D. W. (1995). *Using credit unions as conduits for micro-enterprise lending: Latin-American insights*. International Labour Office, Enterprise and Cooperative Development Department.
- ADB (2015). Promoting Women's Economic Empowerment in Cambodia. Manila: ADB.
- Agrawal, A. et. Al (2014) "Livelihoods and Poverty". In Field, B.C. et al. Climate Change 2014 Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
- AusAID (2012). MAMPU Indonesia: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction). Program Design Document.
- Babbie, E. (2002). *The practice of social research*. Belmont, CA: Cengage Learning.
- BaKTI (2015). Sejarah BaKTI. <http://www.bakti.or.id/sejarah-bakti>
- Bank Indonesia (2014) Sambutan Pembukaan Dr. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia Seminar Nasional Keuangan Inklusif: "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah" <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Sambutan%20HA%20Keuangan%20Inklusif%20071114.pdf>
- Boeke, J. H. (1953). *Three Forms of Disintegration in Dual Societies*. New York: Institute of Pacific Relations.
- Boeke, J. H. (1978). *Economics and Economic Policy of Dual Societies, as Exemplified by Indonesia*. New York: AMS Press.
- BPS (2015) Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Februari 2015. Jakarta: BPS.
- BPS (2013) Sensus Pertanian 2013. Jakarta: BPS.
- BPS (2015) Laporan Bulanan Ketenagakerajaan: Maret 2015. Jakarta: BPS.
- CGAP (2005). Microfinance Consensus Guidelines: Developing Deposit Services for the Poor. CGAP – World Bank.
- Chambers, R., and Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*. Brighton: Institute of Development Studies (UK).
- Cowater (2013) MAMPU Implementation Strategy. Prepared for AusAID, DFAT.
- Creswell, J.W. and Clark, V.L.P. (2011) *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J.W. and Clark, V.L.P. (2007) *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. London: DFID.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihood and diversity in developing countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Fakih, M. (1997). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferka, A. (2011). *The Impact of Microfinance on the livelihoods of women in rural communities: A case study of Jaman South District, Ghana* (Doctoral dissertation, Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University Of Science And Technology).
- Firdaus, M. and Dewayanti, R. (2004). Situasi Tanpa Perlawanan: Penelusuran Kondisi Perempuan Usaha Mikro. *Jurnal Perempuan*, No.35, 2004.
- Gammage, S. Diamond, N. and Packman, M (2005). *Enhancing Women's Access to Markets: An Overview of Donor Programs and Best Practices*. USAID.
- Golla, A. M., Malhotra, A., Nanda, P., & Mehra, R. (2011). *Understanding and measuring women's economic empowerment: Definition, framework, indicators*. Washington DC: International Centre for Research on Women.
- Gurung, J. et al (2011) Getting REDD+ right for women: an analysis of the barriers and opportunities for women's participation in the REDD+ sector in Asia. Washington: USAID.
- Hastuti, E.L. 2004. Pemberdayaan petani dan kelembagaan Lokal dalam Perspektif Gender. Working Paper. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- ILO (2011) Decent Work Country Profile: Indonesia
- IPPF/UNFPA/Young Positives (2007) *Change, Choice and Power: Young Women, Livelihoods and HIV Prevention* IPPF. <http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/change.pdf>

- Jupp, D., Ali, S. I., & Barahona, C. (2010). Measuring Empowerment?: Ask Them: Quantifying Qualitative Outcomes from People's Own Analysis: Insights for Results-based Management from the Experience of a Social Movement in Bangladesh. Sida.
- Kabeer, N. (2012). Women's economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development. SIG Working Paper 2012/1. International Development Research Centre – DFID. <https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf>
- Kabeer, N. (2012). Women's economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development. *International Development Research Centre*.
- Kabeer, N. and Natali, L. (2013) Gender Equality and Economic Growth: Is there a win-win? IDS Working paper volume 417 (2013).
- Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus groups: the importance of interaction between research participants'. *Sociology of health and illness*, 16(1), 103-121.
- Kusuma (2014) Rumah Tangga di Indonesia Tak Punya Tabungan. <http://finance.detik.com/read/2014/11/07/103515/2741696/5/52-rumah-tangga-di-indonesia-tak-punya-tabungan> Accessed on 14th October 2015.
- Leech, N. L., and Onwuegbuzie, A. J. (2009). 'A typology of mixed methods research designs'. *Quality and Quantity*, 43(2), 265-275.
- Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K.M., Guest, G., and Namey, E. (2005). *Qualitative research methods: A data collector's field guide*. North Carolina: USAID - Family Health International.
- Marcoes, L., Fauzi-Rachman, N., Sirimorok, N., & Tombourou, T. (2015). Achieving gender justice in indonesia's forest and land governance sector. Asia Foundation. <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDGenderJusticeForestry.pdf>
- Masika, R., & Joekes, S. (1996). *Employment and sustainable livelihoods: A gender perspective*. Report Prepared for SIDA. Institute of Development Studies (IDS), Bridge (Development Gender).
- Mayoux, L. and Mackie, G. (2008) Guide to Gender Integration in Value Chain Development; Making the Strongest Links". International Labour Organization.
- Mayoux, L. (2008). Module 3: Gender and Rural Finance' in Gender and Agriculture Source Book, World Bank, Washington DC.
- Ministry of Women Empowerment and Child Protection (2014) KEBIJAKAN DAN STRATEGI Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Morgan, D. L. (1988). *Focus groups as qualitative research*. London: Sage Publication.
- Morse, J. M. (2003). 'Principles of mixed methods and multi method research design'. In Tashakkori, A. and Teddlie, C. (eds.): *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research* (pp. 189-208). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moser, C.N. (1993) Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training. London: Routledge.
- Muttaqin, F. (2014) Women and Informal Economy in Indonesia: Dynamics and Transformation. http://www.academia.edu/3191981/Women_and_Informal_Economy_in_Indonesia_Dynamics_and_Transformation
- Nazneen, S. (2008) Rural livelihoods and gender. Asia-Pacific Human Development Report Background Papers Series 2010/08. UNDP.
- Neuman, L. (2006) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson.
- Nikkhah, H.A. and Redzuan, M.R. (2010). 'The role of NGOs in promoting empowerment for sustainable community development'. *Journal of Human Ecology* 30(2), 85-92.
- Noerdin, E. et al (2006) *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: WRI/Women research Institute.
- Onwuegbuzie, A. J., and Johnson, R. B. (2006). 'The validity issue in mixed research'. *Research in the Schools*, 13(1), 48-63.
- PEKKA (2014) Annual Report Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)/ Women Headed Households Empowerment. http://www.pekka.orid/documents/laporan%20tahunan%202014_EN.pdf
- PESADA (2014). Laporan CU PESADA pada Rapat Anggota Tahunan 2014. Unpublished Report.
- Sarantakos, S. (2003). *Social Research*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Scoones, I. (2009). 'Livelihoods perspectives and rural development'. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 171-196.

- Sitorus, H. (2014) NGOs, Social Capital and Environmental Citizenship: A Sociological Inquiry into Livelihoods and Resources Access in Coastal Sumatra. PhD Thesis, Australian National University.
- Sitorus, H. (2015) Key Economic Highlights, Labour Market And Decent Work Challenges in Indonesia. Background Paper for National Seminar for Indonesian Trade Unions and Decent Work Agenda. ILO Jakarta.
- Soemartoyo, S.R. 2002. Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dan Peluang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada The ACT Seminar and Summit. Japan-Indonesia: Dynamic Relationship for Regional Development.
- Sofiani, T. (2012). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumah Dalam Konstelasi Relasi Gender. *Jurnal Muwazah*, 2(1).
- Supeni, R.E. and Sari, M.I. (2011). Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember. Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember). Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan 101 Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011.
- Taylor, G., & Pereznieta, P. (2014). Review of evaluation approaches and methods used by interventions on women and girls' economic empowerment. *Overseas Development Institute*, 1-62.
- UN Commission on the Status of Women (2004). Resources mobilization and enabling environment for poverty eradication in the context of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010. 48th Session of Commission on the Status of Women. <http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/crp6-e.pdf>
- UNDP (2014) Human Development Report 2014.
- UNFPA (2014). Gender Equality and Gender-based Violence. <http://indonesia.unfpa.org/Gender>.
- USAID – PROREP – HAPSARI (2014) Enam Tantangan: Laporan Hasil Penelitian "Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal. Unpublished Report.
- VeneKlasen, L. and Miller, V. (2002). A New Weave of People, Power and Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation. Oklahoma: World Neighbors.
- World Bank, Food and Agriculture Organization, and International Fund for Agricultural Development. (2009). Gender in Agriculture Sourcebook.
- Wu, D. (2013) "Measuring Change in Women's Entrepreneur's Economic Empowerment: A Literature Review" Working Paper, The Donor Committee for Enterprise Development.
- YKS (2006). Enhancing Poor Families to develop their small scale business: Laporan Pelaksanaan Program. Unpublished document.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: RINCIAN PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan Penelitian Utama	Rincian Pertanyaan Penelitian
<p>Apa saja ragam pendekatan Mitra MAMPU yang terlibat dalam rentang dimensi pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>Apa saja jenis kegiatan yang dijalankan oleh Mitra MAMPU melalui program dana MAMPU yang bertujuan membangun beragam dimensi aset pemberdayaan ekonomi?</p> <p>Apa saja jenis kegiatan yang dijalankan oleh mitra MAMPU melalui program lain (dana non-MAMPU) yang bertujuan membangun beragam dimensi aset pemberdayaan ekonomi?</p> <p>Apa saja tujuan utama dari kegiatan-kegiatan tersebut menurut para mitra MAMPU? Apakah tujuan utama kegiatan tersebut guna memberi kontribusi pendapatan tambahan terhadap ekonomi rumah tangga, membuat perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan pada ekonomi keluarga, dan/atau kah tujuannya adalah untuk mengubah status perempuan dalam keluarga atau masyarakat mereka?</p> <p>Menurut pandangan mitra, apa saja hambatan utama bagi perempuan miskin dalam mengakses pekerjaan atau kesempatan kerja lainnya?</p> <p>Apakah kerangka pemberdayaan ekonomi tersebut merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan dapat digunakan dalam pekerjaan mereka? Apakah ada yang bisa diperbaiki? Apa yang tidak tercakup di dalamnya?</p> <p>Ketika mempertimbangkan beragam dimensi aset pemberdayaan ekonomi dalam kerangka tersebut, dimensi mana kah yang menurut mitra bisa menjadi contoh model dan pelaksanaan kegiatan yang baik yang dapat dibagi dengan yang lain?</p>
<p>Apa saja tantangan dan pengalaman para penerima manfaat dari upaya-upaya pemberdayaan ekonomi/ sumber penghidupan Mitra MAMPU?</p>	<p>Apa saja sudut pandang para penerima manfaat tentang tujuan utama dari inisiatif pemberdayaan ekonomi/sumber penghidupan tersebut? Apakah mereka mempunyai pemahaman yang sama dengan para mitra MAMPU?</p> <p>Menurut mereka, apakah hambatan utama dalam mengakses pekerjaan atau kesempatan kerja yang lain?</p>

Pertanyaan Penelitian Utama

Rincian Pertanyaan Penelitian

Menurut mereka, apa saja keuntungan utama daripada inisiatif pemberdayaan ekonomi/sumber penghidupan tersebut?

Perbedaan apa yang disebabkan oleh adanya pekerjaan atau pendapatan tambahan dalam kehidupan perempuan miskin, secara keuangan, pribadi (contoh: peningkatan rasa percaya diri), atau pada tingkat rumah tangga (contoh: peningkatan pengaruh pada pembuatan keputusan dalam rumah tangga)?

Seberapa jauh kontribusi program tersebut dalam mengatasi hambatan-hambatan gender pada pemberdayaan ekonomi/sumber penghidupan yang berkelanjutan?

Apa pengendali sumber daya dan pembuatan keputusan dalam rumah tangga (alokasi sumber daya dalam rumah tangga dan kendali pembuatan keputusan dalam rumah tangga) khususnya berkaitan dengan pekerjaan/aset produktif?

Seberapa jauh program tersebut memberikan kontribusi dalam mengatasi hambatan-hambatan gender pada pemberdayaan ekonomi/sumber penghidupan yang berkelanjutan?

Seberapa jauh kontribusi program tersebut dalam mengatasi hambatan-hambatan gender pada pemberdayaan ekonomi/sumber penghidupan yang berkelanjutan? Bagaimana keadaan pengendalian sumber daya dan pembuatan keputusan dalam rumah tangga (alokasi sumber daya dalam rumah tangga dan kendali pembuatan keputusan dalam rumah tangga) khususnya berkaitan dengan pekerjaan/aset produktif?

Seberapa jauh program intervensi tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan rumah tangga yang paling rentan? Dalam hal 5 aset (manusia, keuangan/sumber daya, lembaga, sosial, pendukung)

Menurut mitra MAMPU, apa saja tujuan utama kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah tujuan utama kegiatannya untuk memberikan sumbangan pendapatan tambahan paa ekonomi rumah tangga, membuat perbaikan signifikan dan berkelanjutan pada ekonomi keluarga, dan/atau kah tujuannya untuk mengubah status perempuan dalam keluarga atau dalam masyarakat mereka?

Pertanyaan Penelitian Utama	Rincian Pertanyaan Penelitian
	<p>Menurut para mitra, apa hambatan-hambatan utama perempuan miskin dalam mengakses pekerjaan, jaminan sumber penghidupan atau kesempatan kerja lainnya?</p> <p>Ketika mempertimbangkan beragam dimensi aset pemberdayaan ekonomi dalam kerangka tersebut, dimensi mana kah yang menurut mitra bisa menjadi contoh model dan pelaksanaan kegiatan yang baik yang dapat dibagi dengan yang lain?</p>
<p>Apa saja jenis kegiatan mitra untuk dimensi aset pemberdayaan ekonomi yang berbeda-beda, dan apakah terdapat hambatan dalam kapasitas mitra menggalakkan pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>Dalam masing-masing bidang tematik MAMPU, bagaimana kegiatan-kegiatan para mitra yang berbeda terbagi dalam ragam dimensi aset pemberdayaan ekonomi?</p> <p>Apakah terdapat kesenjangan dalam kerja kumulatif para mitra di bidang tematik tersebut? Apakah kesenjangan ini bisa diisi oleh mitra-mitra lain, ataukah ada ruang/keperluan akan mitra yang baru?</p>

LAMPIRAN 2: DAFTAR INFORMAN

No.	Tanggal	Organisasi	Informan
1.	13 Agustus 2015 oleh Henri Sitorus & Lilis S	PEKKA, Jakarta	Kodar Triwusananingsih Romlawati
2.	14 Agustus 2015 oleh Henri Sitorus & Lilis Suryani	KAPAL Perempuan, Jakarta	Misiyah Kesar Kartikadewi P Justin Anthonie Ulfa Indri M. Basuki Winoto Bhudis Utami
3.	14 Agustus 2015 oleh Henri Sitorus & Lilis Suryani	Komnas Perempuan, Jakarta	Yanti ratna Desti Murdijana Made Indriyani Suparno Sri Mulyati Baihajar Tualeka Yerni Heriani
4.	18 Agustus 2015 oleh Henry Sitorus	BaKTI - Makassar	Lusia Palulungan Bersama tim lain BaKTI
5	24 Agustus 2015 oleh Sabastian Saragih	MWPRI -Malang	Cecilia Susiloreno, Manager Dardiri, Vice Manager Sarno, Div. Pengorganisasian Ali Imron, Div. Advokasi Toofan Teguh, Staff Admin Veronika Yuniar, Keuangan
6.	26 Agustus 2015 oleh Henri & Lilis	PERMAMPU - North Sumatra	Desy Setiawaty
7.	25 Agustus 2015 oleh Henri & Lilis	ILO MAMPU, Medan	Diwakili oleh BITRA Indonesia

No.	Tanggal	Organisasi	Informan
8.	8 September 2015 oleh Henri Sitorus	Yayasan Kesehatan Perempuan	Zumrotin K Susilo, Direktur Tini Hadad, Pengawas
9.	9 September 2015 oleh Henri Sitorus	Koalisi Perempuan Indonesia	Sutriyatmi
10.	10 September 2015 oleh Sabastian Saragih	Aisyiah - Yogya	Trihastiti Nurochimah, PM Hajar NS, Project Officer Islamiyaturochmah, Div Kom Dev
11.	11 September 2015 oleh Sabastian Saragih	Aisyiah PDA Ngawi	Kunti Maesaroh Endang R Heru Faridah M Suwanti Romli Marartus Solikah Sutjiatim Anis Setyowati Umi Haniah Supriyati Ariek ES Nur Isna Hanni Hidayati Fuadiyah Q
12.	12 September 2015 oleh Sabastian Saragih	Aisyiah PDA Sidoarjo	Nelly Asnifati, Pengawas Zubaidatul H Rochilah Zakiyah Batati Tina

No.	Tanggal	Organisasi	Informan
13.	8 September 2015, oleh Lilis Suryani	KPS2K - Gresik	Iva Hasanah, Ketua Rumi Handayani, Wakil Ketua Rani, Koord. Divisi Ira, Koord. Divisi
14.	11 September 2015 oleh Lilis Suryani	SPEKHAM- Solo	Elis, Ketua Nila, Koord. SL Fajar, Div. Pendampingan Heru, Div. KesMas Atik, Danang Noko, Ani - Community Organizer
15.	14 September 2015 oleh Lilis Suryani	SARI - Solo	Mulyadi, Ketua Tri, Ruth dan Wid : staff
16.	28 September 2015 oleh Henri Sitorus	Migrant Care, Jakarta (via telpon)	Anis Hidayah, Direktur

Daftar DKT dengan para Penerima Manfaat

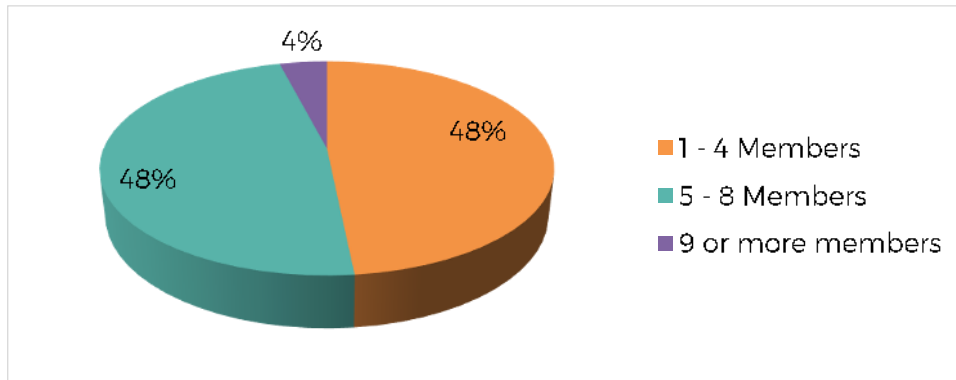
No.	Mitra Utama	Tempat, Tanggal	Peserta		
			Perempuan	Laki-laki	Total
1.	Aisyiyah	Ngawi, 11 September 2015	9	0	9
	Aisyiyah	Sidoarjo, 12 September 2015	5	0	5
2.	KPI	KPI Kendal, Perikanan, 15 September 2015	5	0	5
	KPI	KPI Kendal, Kelompok Campuran, Tirta Arum, 15 September 2015	13	0	13
	KPI	KPI Kendal, Kelompok Daur Ulang, Kaliwuung Selatan, 16 September 2015	12	1	13
	KPI	KPI Kendal, Kelompok Batik,	9	0	9

No.	Mitra Utama	Tempat, Tanggal	Peserta		
			Perempuan	Laki-laki	Total
		Desa Cepiring, 16 September 2015			
		KPI NTB, Banyuwulek, 22 September 2015	12	0	12
3.	Migrant Care/INDIPT	Penerima manfaat INDIPT di Tanggulangin, 18 September 2015	10	6	16
		Pengurus INDIPT, 18 September 2015	4	2	6
4.	KAPAL Perempuan/KPS2K	KP2SK, Kesamben Kulon, 08 September 2015	17	0	17
	KAPAL Perempuan/YPKM	Pangkep, 21 Agustus 2015	15	0	15
5.	PERMAMPU/PESADA	28 Agustus 2015 DKT CU Labanta Pesada Sidiangkat, Sidikalang	18	0	18
		28 Agustus 2015 DKT CU Merdemu Pesada Sidikalang	19	0	19
		7 September 2015 DKT dengan CU Jaring Halus	10	0	10
6.	ILO MAMPU/BITRA	27 Agustus 2015 DKT Kelompok Dampingan BITRA - Sayum Sabah	12	0	12
		26 Agustus 2015 DKT Pekerja Rumahan BITRA	20	0	20
7.	Komnas Perempuan/HAPSARI	2 Sept 2015 DKT Kelompok HAPSARI Pegajahan	15	0	15
8.	PEKKA	4 Sept 2015 DKT Kelompok PEKKA	14	0	14

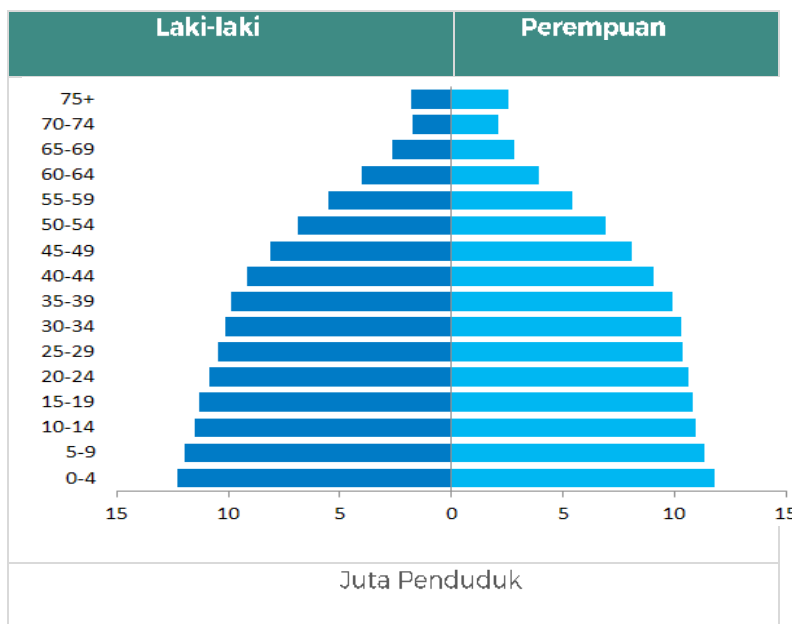
No.	Mitra Utama	Tempat, Tanggal	Peserta		
			Perempuan	Laki-laki	Total
		Tanjung Balai 21 September 2015			
		DKT Group of PEKKA NTB	18	0	18
9.	BaKTI	MAUPE, 18 Agustus 2015	19	2	17
		LP2EM, 19 Agustus 2015	18	4	14
		YKS Kombongan, Toraja Utara, 20 Agustus 2015	10	0	10

LAMPIRAN 3: GRAFIK PENDUKUNG

Lembar Tambahan 3.1: Ukuran Keluarga Responden

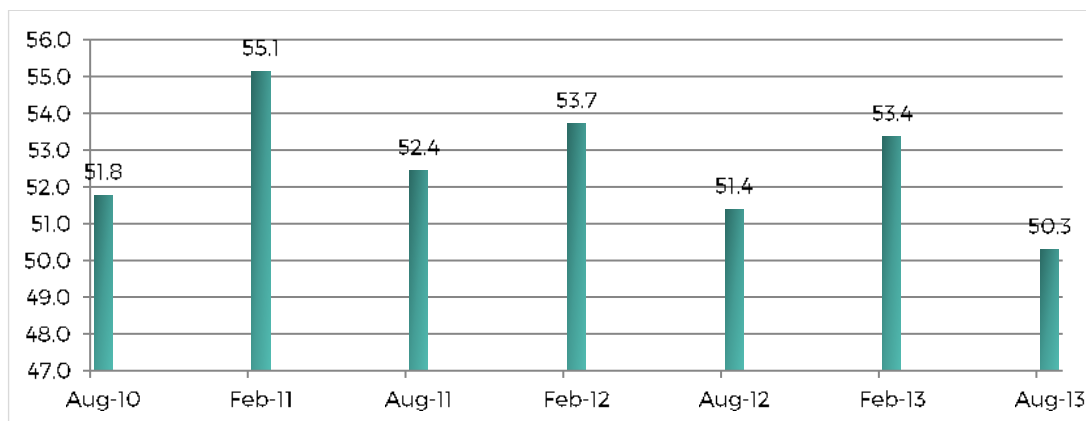


Lembar Tambahan 3.2: Piramida Penduduk di Indonesia



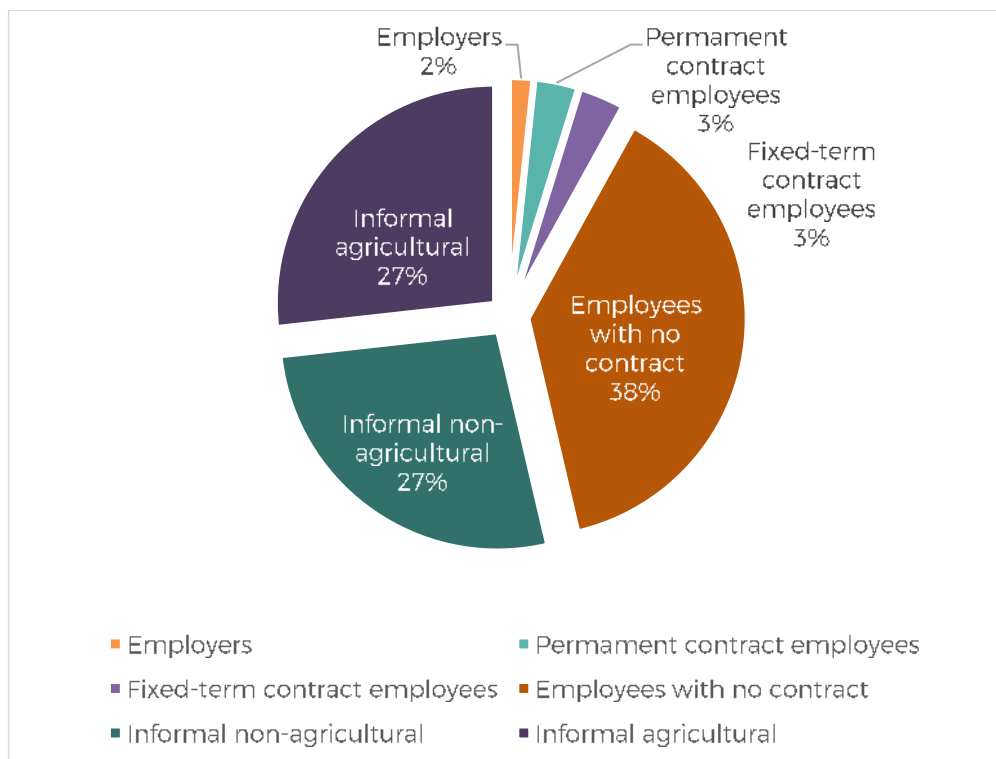
Sumber: Bappenas (2013)

Lembar Tambahan 3.3: Angka Keikutsertaan Tenaga Kerja Perempuan



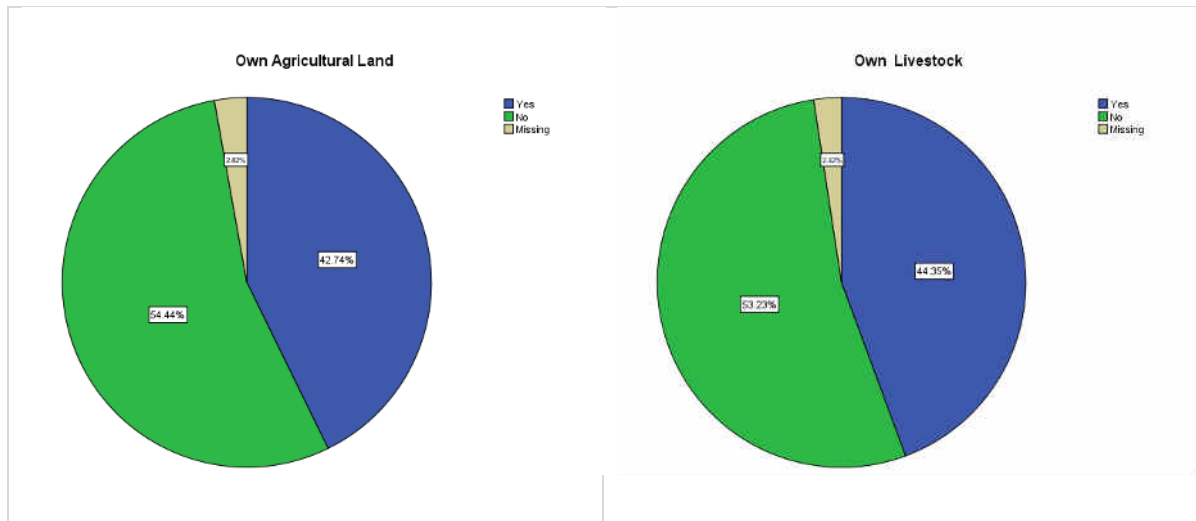
Sumber: Dianalisis oleh Author, berdasarkan Data ILO (2013)

Lembar Tambahan 3.4: Pekerjaan menurut Jenis Kontrak

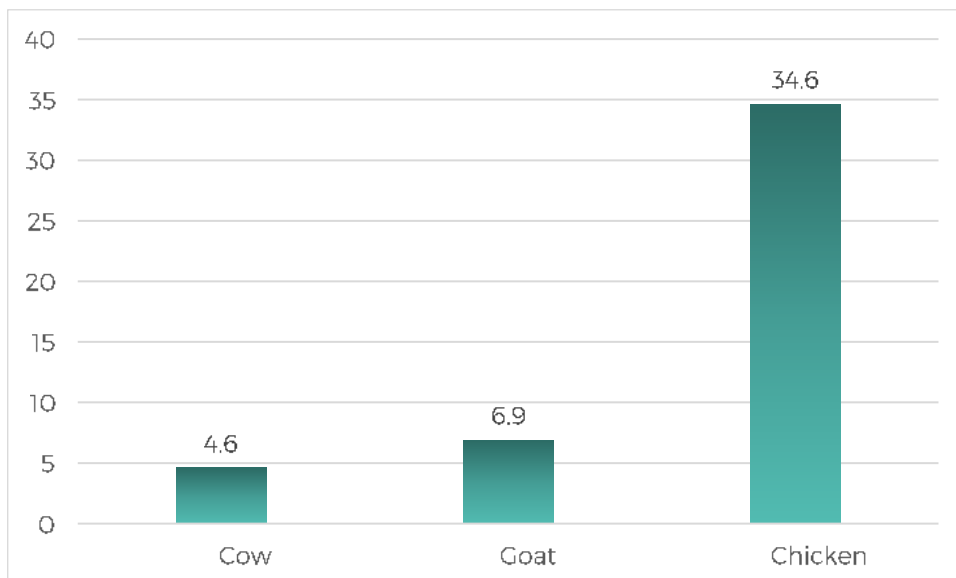


Sumber: Iryani, 2013

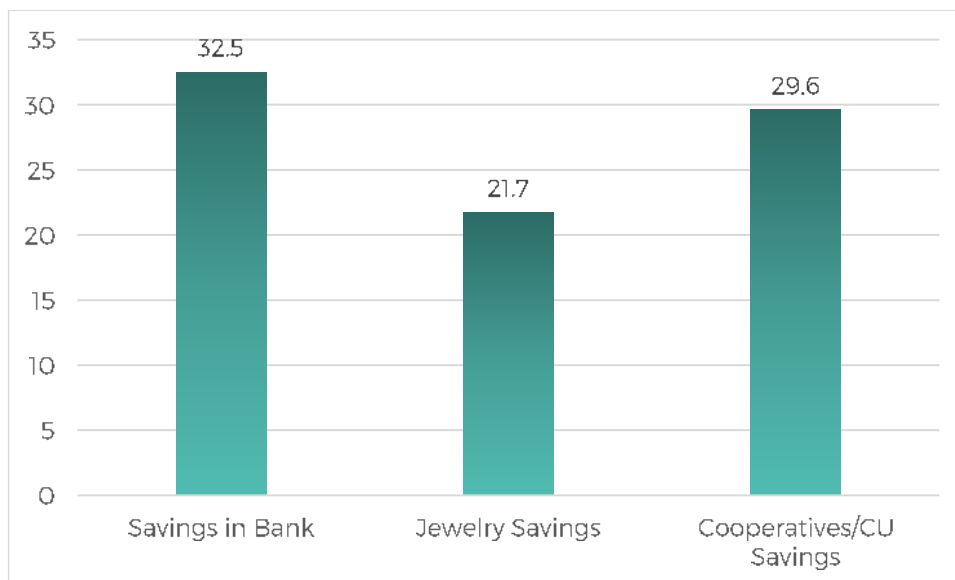
Lembar Tambahan 3.5: Kepemilikan Tanah dan Ternak



Lembar Tambahan 3.6: Jenis Ternak yang Dimiliki oleh Responden

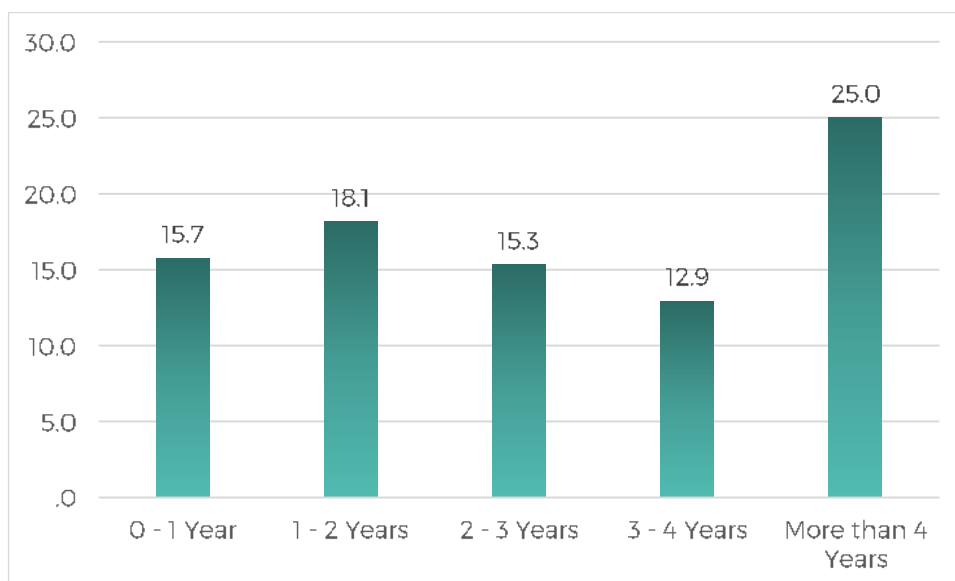


Lembar Tambahan 3.7: Tabungan Responden

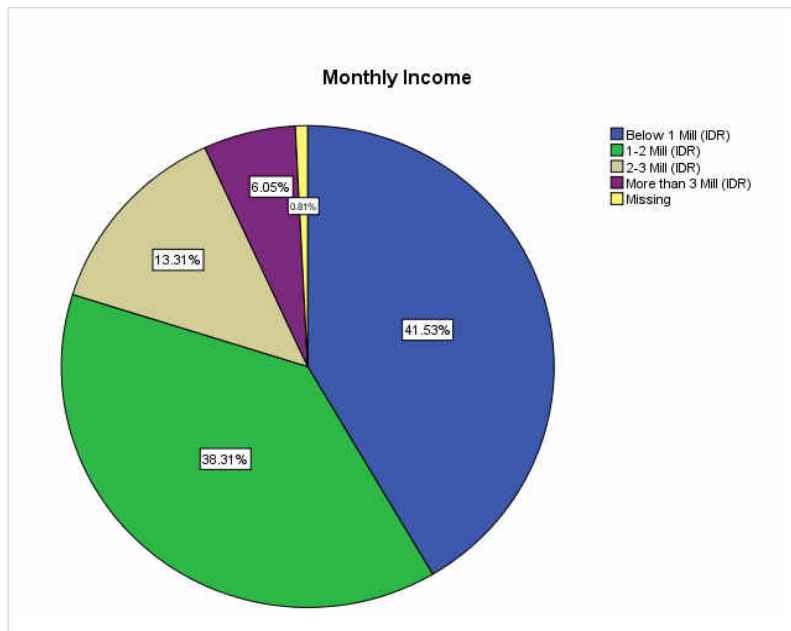


N = 258

Lembar Tambahan 3.8: Durasi Keikutsertaan dalam Kegiatan Mitra

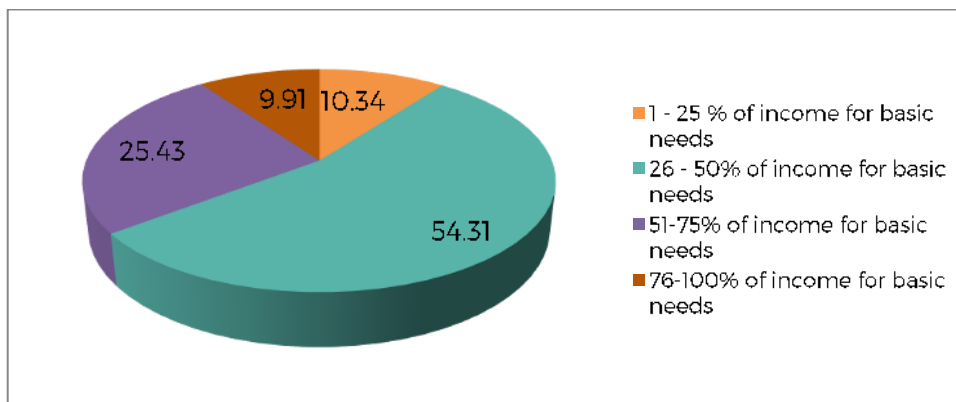


Lembar Tambahan 3.9: Pendapatan Bulanan Responden



N = 258

Lembar Tambahan 3.10: Alokasi Pengeluaran untuk Kebutuhan Dasar oleh Responden



N = 258

LAMPIRAN 4: PROYEK DAN BIDANG TEMATIK MITRA

Mitra Utama MAMPU	Bidang Tematik	Sub-Mitra/Afiliasi yang turut serta dalam kajian ini
PEKKA	1st: Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial	PEKKA Sumatera Utara, Tanjung Balai PEKKA NTB
KPI	1st: Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial	KPI Lombok Barat, NTB KPI Kendal, Jawa Tengah
KAPAL Perempuan	1st: Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial	YPKM KP2SK
ILO Mampu	2nd: Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.	BITRA Indonesia MWPRI
Migrant Care	3rd: Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri	INDIPT SARI
Aisyiyah	4th: Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.	Aisyiyah Sidoarjo Aisyiyah Ngawi
Permampu	4th: Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.	PESADA
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)	4th : Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.	NA
Komnas Perempuan	5th: Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan	SPEKHAM Solo HAPSARI
Bakti	Lintas 5 bidang: Bekerja dengan Parlemen	MAUPE, Maros LP2EM Pare-Pare Yayasan Kombongan Situru KP2SK

LAMPIRAN 5: KUESIONER

TINJAUAN TERHADAP PROGRAM PENGHIDUPAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DARI MITRA MAMPU

MAMPU melaksanakan review atau kajian terhadap program penghidupan dan pemberdayaan ekonomi untuk memahami lebih baik mengenai berbagai inisiatif dari pemberdayaan ekonomi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh mitra MAMPU. Review mencakup baik itu program yang didukung oleh MAMPU maupun oleh pihak lain, termasuk swadaya lembaga Mitra/Sub-Mitra. Kajian ini juga dimaksudkan untuk memberikan beberapa gambaran tentang bagaimana pengalaman perempuan miskin dalam menjalani inisiatif pemberdayaan ekonomi. Secara khusus, review ini akan menginformasikan perkembangan strategi MAMPU untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan miskin. Melalui studi ini, MAMPU ingin memperjelas tujuan pemberdayaan yang terfokus pada peningkatan pendapatan dan penghidupan.

Saudara terpilih menjadi salah satu peserta yang diharapkan bersedia memberikan informasi dari pengalaman dalam program pemberdayaan ekonomi. Informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan studi dimaksud. Keikutsertaan dalam hal ini bersifat sukarela.

KUESIONER UNTUK RUMAH TANGGA

INFORMASI RUMAH TANGGA			
Propinsi/Kab _____		Mitra Utama _____	
Kecamatan/Desa _____		Sub-Mitra _____	
No _____	RT: _____	Tgl..... _____	Interviewer _____

Kode Responden:

Profil Responden

1. **Nama** :
2. **Usia** : Tahun
3. **Jenis Kelamin** : 1. Perempuan 2. Laki-Laki
4. **Status Perkawinan** : 1. Menikah 2. Tidak Menikah 3. Perempuan Kepala Keluarga
5. **Suku Bangsa** :
6. **Jumlah Anggota Keluarga di Rumah** : Perempuan : Laki-Laki Total :
7. **Anak** : Perempuan : Laki-Laki Total :
8. **Pendidikan terakhir :**
 1. SD
 2. SMP
 3. SMA
 4. Universitas
 5. Tidak sekolah
 6. Lainnya
9. **Pekerjaan utama**
 1. Petani
 2. Nelayan
 3. Pedagang
 4. Tukang
 5. Buruh
 6. Karyawan
 7. Pegawai negeri
 8. Pengusaha
 9. Sudah pension
 10. Urusan R.T.
 11. Honor
 12. Lainnya

Perkerjaan Sampingan

1. Petani
2. Nelayan
3. Pedagang
4. Tukang
5. Buruh
6. Karyawan
7. Pegawai negeri
8. Pengusaha
9. Sudah pension
10. Urusan R.T.
11. Honor
12. Tidak ada
13. Lainnya

KEPEMILIKAN ASSET RUMAH TANGGA

<p>9. PENDAPATAN PER BULAN (RUMAH TANGGA)?</p>	<p>Di bawah 1 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 1 Antara 1 - 2 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 2 Antara 2 - 3 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 3 Lebih dari 3 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 4</p>	
<p>10 . APA YANG MENJADI SUMBER UTAMA PENDAPATAN KELUARGA?</p>	<p>Pertanian <input type="checkbox"/> 01 Perikanan <input type="checkbox"/> 02 Usaha kecil dagang <input type="checkbox"/> 03 Pegawai negeri <input type="checkbox"/> 04 Karyawan swasta <input type="checkbox"/> 05 Buruh <input type="checkbox"/> 06 Pensiun <input type="checkbox"/> 07 Lainnya _____</p> <p>Catat detail aktifitas sumber penghidupannya, mis. Petani padi; Jawaban boleh lebih dari 1</p>	
<p>11. PENGELUARAN PER BULAN (RUMAH TANGGA)?</p>	<p>Di bawah 1 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 1 Antara 1 - 2 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 2 Antara 2 - 3 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 3 Lebih dari 3 juta Rupiah <input type="checkbox"/> 4</p>	
<p>12. KONDISI RUMAH: BAHAN UTAMA LANTAI</p> <p>CATAT OBSERVASI</p>	<p>Tanah <input type="checkbox"/> 01 Lantai Papan <input type="checkbox"/> 02 Lantai Bambu <input type="checkbox"/> 03 Semen <input type="checkbox"/> 04 Lainnya (sebutkan) _____ <input type="checkbox"/> 05</p>	
<p>13. KONDISI RUMAH: KONDISI ATAP</p> <p>CATAT OBSERVASI</p>	<p>Rumbia <input type="checkbox"/> 01 Plastik <input type="checkbox"/> 02 Seng <input type="checkbox"/> 03 Semen/Genteng <input type="checkbox"/> 04 Lainnya (Sebutkan) <input type="checkbox"/> 05</p>	

<p>14. DARI KISARAN PENGELUARAN DI ATAS, APAKAH BOLEH SIPERKIRAKAN ALOKASINYA? <u>PERKIRAAN PERSENTASE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) • pendidikan anggota keluarga • kesehatan anggota keluarga • transportasi (termasuk cicilan kendaraan) • hiburan dan komunikasi • tabungan • sosial • rokok • lainnya 	
<p>15. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI LAHAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERTANIAN?</p>	<p>Ya..... <input type="checkbox"/> 1 Tdk <input type="checkbox"/> 2</p>	
<p>16. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI TERNAK?</p>	<p>Ya <input type="checkbox"/> 1 Tdk <input type="checkbox"/> 2</p>	
<p>17. JIKA MEMILIKI TERNAK, BERAPA BANYAK TERNAK YANG DIMILIKI? CATAT JIKA ADA SISTEM BAGI HASIL</p>	<p>Sapi ___ ___ Kerbau..... ___ ___ Kuda ___ ___ Kambing ___ ___ Domba..... ___ ___ Ayam ___ ___ Terak babi ___ ___ Lainnya (sebutkan) ___ ___</p>	
<p>18. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI KENDARAAN PRIBADI?</p>	<p>Sepeda Motor Mobil Perahu/KAPAL Lainnya (sebutkan)</p>	
<p>19. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMPUNYAI TABUNGAN? A. YA B. TIDAK</p>	<p>Jika Iya, tabungan disimpan dalam bentuk apa? Bank Emas Koperasi Lainnya (sebutkan)</p>	

20. Bagaimana biasanya ALOKASI WAKTU (PER HARI)

Alokasi Waktu Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga		
Alokasi Waktu untuk kegiatan produksi		
Alokasi waktu untuk kegiatan sosial		

21. Aset-aset apa saja yang dimiliki dan dipergunakan untuk sumber kehidupan/ekonomi rumah tangga?

Modal (Aset)	Daftar modal (bias berupa contoh)	Bagaimana trend nya selama 3 tahun? + tetap -
Aset Sumber Daya Manusia (kesehatan, pengetahuan termasuk pengetahuan dan keterampilan, modal tenaga kerja)		
Aset Modal Sosial (kepercayaan, relasi social termasuk kelompok)		
Modal Fisik (termasuk peralatan produksi, infrastruktur)		
Modal Sumber Daya Alam (Tanah, perairan, hutan)		

d. Gempa		
e. Banjir		
f. Tanah Longsor		
g. Kenaikan harga SEMBAKO		
h. Penurunan harga hasil pertanian		
i. Keluarga terserang sakit/kematian		
j. Ternak hilang		
k. Hasil tanaman yang mau dipanen hilang		
l. Kurangnya bahan makanan di rumah		
m. Lainnya		

24. Apabila menghadapi kesulitan keuangan, apa yang dilakukan oleh anggota Rumah tangga?

Strategi untuk bertahan	3 Tahun Lalu (Centang Jika Ada)	Saat Ini (Centang Jika Ada)
Apakah mengurangi pengeluaran yang bukan kebutuhan pokok/utama		

Strategi untuk bertahan	3 Tahun Lalu (Centang Jika Ada)	Saat Ini (Centang Jika Ada)
Panen lebih awal		
Menjual ternak		
Memburuh		
Menerima kiriman dari anggota keluarga?		
Meminjam uang/makanan?		
Menjual asset yang tidak produktif, mis. Perhiasan		
Mengurangi pembelian pupuk dll		
Memotong hewan		
Migrasi ke tempat lain		
Menjual asset produktif spt tanah		
Mengurangi makanan, porsi atau frekwensi?		

<p>25. APAKAH RUMAH TANGGA INI MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOCIAL DARI PEMERINTAH?</p>	<p>Ya <input type="checkbox"/> 1 Tdk <input type="checkbox"/> 2</p> <p>Jika Ya, program perlindungan social apa saja yang diperoleh? Centang jika ya.</p> <p>RASKIN BPJS Kesehatan</p>	
---	--	--

	BPJS Tenaga Kerja	
--	-------------------	--

<p>26. Jika anggota rumah tangga mengalami kesulitan, dan memerlukan pinjaman kepada siapa yang meminta bantuan?</p> <p>a. Kegagalan panen</p> <p>b. Mengalami sakit</p> <p>c. Mengalami anggota keluarga wafat</p> <p>d. Perkawinan anggota keluarga</p> <p>e. Biaya pendidikan anak</p> <p>f. Modal usaha</p> <p>g. Lainnya _____</p>	<p>(1) Keluarga luas; (2) tetangga; (3) teman (4) pejabat desa (5) Tokoh adat;(6) tokoh agama; (7) Majikan; (8) Rentenir (9) toke; (10) bank; (11) pegadaian; (12) koperasi/KSM/CU</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>Follow up apabila ada peminjaman ke rentenir bagaimana prosesnya dan berapa bunganya, apakah masih terjadi sekarang?</p>
---	--

27. Permasalahan ketidak setaraan gender

PERSPEKTIF GENDER	YA	TIDAK
-------------------	----	-------

Apakah perempuan harus mendapat izin suami bila mengikuti kegiatan diluar rumah?		
Apakah perempuan harus disunat?		
Apakah anda dilibatkan dalam menentukan jumlah anak?		

- o Apakah perempuan memiliki otonomi ketika akan mengunjungi teman, kelompok atau kunjungan belajar ke desa lain?
- o Apa saja praktik adat yang merugikan perempuan?
- o Apakah ada kebiasaan/tradisi yang membatasi keikutsertaan perempuan untuk produksi, pasca-panen dan pemasaran?

28. KESEHATAN:

- Apakah anda pernah berobat/periksa ke puskesmas/pustu?
- Apakah ada hambatan bila ingin berobat ke pelayanan kesehatan?
- Bila bermasalah, apa saja hambatan yang dirasakan bila ingin berobat ke sarana kesehatan?
- Bagaimana jarak yang ditempuh untuk ke pelayanan kesehatan?
- Adakah di daerah ini posyandu?
- Apakah mendapat pelayanan kesehatan ttg reproduksi perempuan secara gratis?
- Apakah mendapat pelayanan keluarga berencana (KB) secara gratis?
- Apakah ada pelayanan kesehatan gratis lainnya untuk perempuan?
- Apakah mendapatkan penyuluhan ttg HIV AIDS?
- Apakah mendapat penyuluhan ttg kesehatan reproduksi?

29. AKSES DAN KONTROL TERHADAP SUMBER DAYA

- Apakah kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya produktif seperti tanah masih berbeda antara laki-laki dan perempuan?
- Atas nama siapa sertifikat tanah (lahan dan atau rumah)?
- Siapakah yang memiliki akses untuk teknologi berikut ini?

Teknologi	Perbedaan penguasaan antara laki-laki dan perempuan
Produksi pertanian	
Produksi industry rumah tangga	
Teknologi transportasi	

<p>36. Pada tingkat RUMAH TANGGA, apa saja perubahan yang terjadi setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>1. _____ _____</p> <p>2. _____ _____</p> <p>3. _____ _____</p> <p>4. _____ _____</p> <p>5. _____ _____</p>
<p>37. Pada tingkat KOMUNITAS, apa saja perubahan yang terjadi setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>1. _____ _____</p> <p>2. _____ _____</p> <p>3. _____ _____</p> <p>4. _____ _____</p> <p>5. _____ _____</p>

DAMPAK KEPESERTAAN PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

38. Apakah setelah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi (PE), Ibu mengalami manfaat dalam bidang Sumber Daya Manusia, seperti di bawah ini?

Sumber Daya Manusia/kekuatan di/dari dalam (power within)	Jika Ya berikan contohnya
Telah terjadi peningkatan akses ke pelayanan kesehatan dan informasi 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan kesempatan Pendidikan atau peningkatan pengetahuan 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lingkungan? 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan peningkatan keterampilan untuk melestarikan lingkungan? 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan kemampuan membaca dan berhitung 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan eningkatakan Pengetahuan dalam hal keungan dasar 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan peningkatakan Pengetahuan dalam hal Hak Asasi dan Hak Hukum 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan peningkatan keterampilan yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan 1. Ya 2. Tidak	
Meningkatnya kepercayaan diri	

1. Ya 2. Tidak	
-------------------	--

39. Apakah setelah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi (PE). Ibu mengalami manfaat dalam hal sumber daya termasuk asset permodalan/keuangan, seperti di bawah ini?

B. Aset Keuangan dan Sumber daya (Power over)	Jika Ya berikan contohnya
Telah terjadi peningkatan Peningkatan Pendapatan 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan Tabungan 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan Akses ke pinjaman 1. Ya 2. Tidak	
Adanya Voucher untuk bantuan 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan Peralatan Produksi 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan Sarana Produksi/ Input (bibit, pupuk, bahan baku) 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan produksi Ternak 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan Stock/persediaan barang 1. Ya 2. Tidak	
Telah terjadi peningkatan Informasi usaha dan pasar 1. Ya 2. Tidak	

40. Apakah setelah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi (PE), Ibu mengalami manfaat dalam hal sumber daya termasuk Aset Agency, seperti di bawah ini?

C. Aset Agency-Kemampuan untuk (Power to - adanya kesadaran dan kemampuan memanfaatkan kesempatan untuk mengakses sumber-sumber yang tersedia)	Jika Ya berikan contohnya
<ul style="list-style-type: none"> Berperan serta dalam keputusan soal ekonomi dalam keluarga 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Akses ke pelayanan dan perlindungan sosial 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Akses ke pekerjaan dan/atau menciptakan peluang pendapatan 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Ikut serta dalam pasar termasuk dengan perusahaan penempatan buruh migran dan pemberi kerja 1. Ya 2. Tidak 	

41. Apakah setelah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi (PE), Ibu mengalami manfaat dalam hal Modal Sosial, seperti di bawah ini?

D. Modal Sosial (Power with - kemampuan apabila bersama dengan orang lain)	Jika Ya berikan contohnya
<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi peningkatan pertemanan 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi peningkatan Jaringan sosial 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi peningkatan Mentor/pembimbing 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi peningkatan Keanggotaan kelompok 1. Ya 2. Tidak 	
<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi peningkatan Hubungan ke pemerintahan desa 1. Ya 2. Tidak 	

<ul style="list-style-type: none">• Telah terjadi peningkatan Hubungan ke pemerintahan kecamatan dan penyedia jasa layanan <p>1. Ya 2. Tidak</p>	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Telah terjadi peningkatan Hubungan dengan organisasi masyarakat dan kelompok lain <p>1. Ya 2. Tidak</p>	
--	--

42. Apakah setelah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi (PE), Ibu mengalami manfaat dalam hal sumber daya termasuk Aset Agency, seperti di bawah ini?

E. Aset yang mendukung/memungkinkan	Jika Ya berikan contohnya
Adanya akte lahir untuk anak	
1. Ya 2. Tidak	
Semakin meningkatnya perlindungan hukum	
1. Ya 2. Tidak	
Semakin dipenuhi hak-hak perempuan	
1. Ya 2. Tidak	
Adanya transportasi yang sensitive terhadap perempuan	
1. Ya 2. Tidak	
Adanya infrastruktur yang lebih baik dan dapat menghemat waktu	
1. Ya 2. Tidak	
Adanya fasilitas yang mendukung perempuan dapat bekerja di luar rumah	
1. Ya 2. Tidak	
Adanya kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan?	
1. Ya 2. Tidak	

43. Apakah ikut serta dalam kegiatan tingkat desa berikut?	Ya	Tidak
Musrenbangdes		
Pembuatan peraturan desa		

Perencanaan anggaran desa		

44. Apakah ada hambatan untuk perempuan berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan tingkat Desa?

45. Dalam hal pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, siapakah yang paling berperan untuk hal-hal di bawah ini?

Hal	Suami	Istri	Suami dan Istri
Pengambilan Keputusan untuk meminjam uang			
Pengambil keputusan untuk menabung			
Memegang uang (utama)			
Keputusan untuk membelanjakan uang			
Keputusan untuk menjual tanah			
Keputusan untuk menjual ternak			
Keputusan untuk menanam jenis tanaman tertentu			
Keputusan untuk kemana hasil produksi dijual			
Keputusan untuk pengaturan kerja di rumah tangga			

Keputusan untuk pembelian barang dapur			
Keputusan untuk pembelian barang/perkakas rumah tangga selain peralatan dapur			
Keputusan untuk partisipasi dalam kegiatan sosial			
Lainnya			

46. Dalam hal pembagian kerja di rumah tangga, apakah setuju terhadap pernyataan berikut?

No.	Hal	Respon	
		Ya (1)	Tidak (2)
a.			
b.	Pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri/perempuan		
c.	Pekerjaan merawat anak dilakukan oleh istri/perempuan		
d.	Urusan mencari uang/nafkah adalah tanggung jawab laki-laki		

47. Bagaimana penilaian Saudari terhadap organisasi perempuan di Desa/Kelurahan?

1	2	3	4	5
Belum ada organisasi perempuan	Organisasi perempuan sudah ada namun belum banyak berperan	Organisasi perempuan memiliki peran untuk keputusan desa	Organisasi perempuan memiliki peran untuk keputusan desa dan kecamatan	Organisasi perempuan memiliki peran untuk keputusan desa, kecamatan dan kabupaten/propinsi

48. Jika organisasi perempuan sudah ada, apa saja kontribusinya

Pada keterampilan perempuan	
Dalam relasi social	
Proses pengambilan keputusan rumah tangga	
Proses pengambilan keputusan di tingkat desa	
Pada jaringan perempuan	

49. Bagaimana penilaian Saudari terhadap keterlibatan perempuan dalam pemasaran?

1	2	3	4
Perempuan tidak memiliki akses perempuan untuk penjualan hasil produksi	Perempuan memiliki akses untuk penjualan hasil produksi ke pasar. namun terbatas karena urusan rumah tangga	Perempuan memiliki akses untuk penjualan hasil produksi ke pasar. namun terbatas karena alasan transportasi	Perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk urusan penjualan hasil